



KIAT Guru



Pendidikan Dasar di Pelosok Indonesia:

Hasil Survei dari Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur

Desember 2019



Australian Government



SUPPORTED BY
THE WORLD BANK
IBRD • IDA | WORLD BANK GROUP

LOCAL
SOLUTIONS TO
POVERTY



© 2019 The World Bank

1818 H Street NW, Washington DC 20433

Telepon: 202-473-1000; Website: www.worldbank.org

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dokumen ini adalah produk dari staf Bank Dunia. Temuan, interpretasi, dan kesimpulan yang diekspresikan dalam dokumen ini tidak serta merta mencerminkan pandangan Direktur Eksekutif Bank Dunia atau pemerintah yang mereka wakili. Bank Dunia tidak menjamin keakuratan data yang tercantum dalam dokumen ini. Batas-batas, nuansa, denominasi, dan informasi apapun yang dipaparkan dalam dokumen ini tidak menyiratkan penilaian Bank Dunia tentang status hukum suatu wilayah atau dukungan atau pengakuan atas batas-batas tersebut.

Hak dan Izin

Materi dalam dokumen ini tunduk pada hak cipta. Bank Dunia mendorong diseminasi pengetahuan, untuk itu dokumen ini dapat direproduksi, seluruhnya atau sebagian, untuk tujuan non komersial selama diberikan atribusi penuh pada karya ini.

Atribusi — Tata cara mengutip dokumen ini adalah sebagai berikut: "Bank Dunia.2019.Pendidikan Dasar di Pelosok Indonesia: Hasil Survei dari Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur. © Bank Dunia. "

Semua pertanyaan tentang hak dan lisensi, termasuk hak cipta turunan, harus ditujukan ke Unit Publikasi Bank Dunia, Grup Bank Dunia, 1818 H Street NW, Washington, DC 20433, AS; faks: 202-522-2625; e-mail: pubrights@worldbank.org.

Pendidikan Dasar di Pelosok Indonesia:

Hasil Survei dari Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur

UNIT PEMBANGUNAN SOSIAL

BANK DUNIA – INDONESIA

DESEMBER 2019



Daftar Isi

Ucapan Terimakasih	vii
Daftar Singkatan	xi
Ringkasan Eksekutif	xiii
<hr/>	
01 Pendahuluan	1
<hr/>	
02 Lingkup Studi: Lokasi, Instrumen, dan Sampel	5
Pemilihan Wilayah Studi	5
Instrumen Survei	7
Partisipan dan Responden Studi	9
Deskripsi Desa Lokasi Studi	9
<hr/>	
03 Konteks Sekolah	13
Karakteristik Sekolah	13
Ketersediaan Sekolah	13
Penyebaran Murid	13
Fasilitas Sekolah	14
Anggaran Sekolah	15
Bahasa dan Kurikulum yang Digunakan di Sekolah	16
Waktu Belajar dan Mengajar pada Tahun Akademik 2015/16	16
Pengawasan dan Rapat Sekolah pada Tahun Akademik 2015/16	17
Guru dan Kepala Sekolah	18
Karakteristik Kepala Sekolah dan Guru di Sekolah	18
Kondisi Kehidupan	22
Kegiatan di Sekolah dan di Luar Sekolah	23
Insentif dan Motivasi Kepala Sekolah dan Guru	29
Gaji dan Tunjangan	29
Persepsi, Tantangan, dan Kepuasan Kepala Sekolah dan Guru	32

04 Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat dalam Pendidikan	37
Orang Tua	37
Latar Belakang Orang Tua	37
Dukungan Orang Tua Terhadap Anak dan Kegiatan di Rumah	39
Ekspektasi Orang Tua Terhadap Anak-Anak Mereka	41
Komite Sekolah	41
Latar Belakang dan Pendirian Komite	41
Manajemen Komite	41
Keterlibatan Orang Tua dan Komite di Sekolah	43
Keterlibatan Orang Tua dan Komite di Sekolah	43
Kepuasan Orang Tua	44
Kepuasan Komite	45
<hr/>	
05 Ketidakhadiran Guru di Kelas	47
Definisi dan Statistik	47
Definisi dan Pengukuran	47
Tidak Adanya Kelas atau Kelas Tanpa Kehadiran Guru	47
Ketidakhadiran Guru di Sekolah	48
Ketidakhadiran Guru pada Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas	50
Faktor Penentu Ketidakhadiran Guru	50
<hr/>	
06 Ketidakhadiran dan Hasil Belajar Murid	55
Ketidakhadiran Murid	55
Tingkat Hasil Belajar Murid	55
Faktor Penentu Hasil Belajar Murid	59
<hr/>	
07 Kesimpulan	61
Lampiran A. Tabel	63
Lampiran B. Klasifikasi Kompetensi Murid	83
Catatan	85

Daftar Gambar, Peta dan Tabel

Gambar

Gambar 1	Pertemuan Sekolah dengan Pemangku Kepentingan Eksternal, 2015/16	18
Gambar 2	Topik Bahasan pada Rapat Internal	19
Gambar 3	Tingkat Pendidikan Kepala Sekolah dan Guru	21
Gambar 4	Masa Kerja Kepala Sekolah dan Guru di Sekolah Tempat Bekerja Sekarang	22
Gambar 5	Median Total Penghasilan Bulanan	27
Gambar 6	Median Gaji Pokok Bulanan	27
Gambar 7	Median Total Tunjangan Bulanan	28
Gambar 8	Kepuasan Orang Tua Terhadap Kualitas Pendidikan dan Hasil Belajar Murid	46
Gambar 9	Kepuasan Komite Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan dan Sekolah	46

Peta

Peta 1	Kabupaten Wilayah Studi dan Jumlah Sekolah di Setiap Kabupaten	5
---------------	--	---

Tabel

Tabel 1	Karakteristik Kabupaten Wilayah Studi Dibandingkan dengan Rata-Rata Provinsi dan Nasional	6
Tabel 2	Jumlah Sampel di Wilayah Studi	7
Tabel 3	Partisipan dan Responden Studi	8
Tabel 4	Karakteristik Desa Lokasi Studi	10
Tabel 5	Jarak dan Waktu Perjalanan dari Sekolah ke Beberapa Lembaga Utama	11
Tabel 6	Jarak dan Waktu Perjalanan dari Balai Desa ke Lembaga Administrasi dan Keuangan	65
Tabel 7	Karakteristik Kepemimpinan Desa	12
Tabel 8	Ketersediaan Sarana Pendidikan di Desa	14
Tabel 9	Karakteristik Populasi Murid di Sekolah	15
Tabel 10	Distribusi Gender Murid, Berdasarkan Kelas	65

Tabel 11 Ketersediaan Sarana Utama Sekolah	66
Tabel 12 Sumber Pendanaan Untuk Sekolah, Tahun Akademik 2015/16	16
Tabel 13 Beban Biaya Orang Tua, Tahun Akademik 2015/16	17
Tabel 14 Bahasa Pengajaran, Kurikulum, dan Muatan Pengajaran, Tahun Akademik 2015/16	64
Tabel 15 Waktu Pengajaran, Tahun Akademik 2015/16	65
Tabel 16 Pengawasan dan Rapat Sekolah, Tahun Akademik 2015/16	18
Tabel 17 Demografi Kepala Sekolah dan Guru	20
Tabel 18 Status Sertifikasi Guru	21
Tabel 19 Pengalaman Kerja Kepala Sekolah dan Guru	22
Tabel 20 Karakteristik Kepala Sekolah	23
Tabel 21 Karakteristik Guru	24
Tabel 22 Kondisi Keseharian Kepala Sekolah: Jarak Rata-Rata, Waktu Perjalanan, dan Biaya Transportasi dari Rumah ke Sekolah	67
Tabel 23 Kondisi Keseharian Guru: Jarak Rata-Rata, Waktu Perjalanan, dan Biaya Transportasi dari Rumah ke Sekolah	68
Tabel 24 Kegiatan Guru di Sekolah, Tahun Akademik 2015/16	25
Tabel 25 Kegiatan Tambahan Kepala Sekolah: Pelatihan, Pekerjaan Lain, dan Keterlibatan dalam Organisasi Lokal	26
Tabel 26 Kegiatan Tambahan Guru: Pelatihan, Pekerjaan Lain, dan Keterlibatan dalam Organisasi Lokal	27
Tabel 27 Evaluasi Guru oleh Kepala Sekolah, Tahun Akademik 2015/16	28
Tabel 28 Cara Pengiriman Gaji Kepala Sekolah	29
Tabel 29 Mekanisme Pengiriman Gaji Guru	29
Tabel 30 Jumlah Rata-Rata Tunjangan Kepala Sekolah	68
Tabel 31 Jumlah Rata-Rata Tunjangan Guru	69
Tabel 32 Penyediaan Tunjangan Kepala Sekolah dan Guru	70
Tabel 33 Opini Kepala Sekolah Tentang Guru dan Murid	32
Tabel 34 Tantangan yang Dihadapi Guru	33
Tabel 35 Kepuasan Guru Terhadap Pemangku Kepentingan Pendidikan	72
Tabel 36 Kepuasan Guru Terhadap Gaji Mereka	73
Tabel 37 Informasi Latar Belakang Orang Tua	39
Tabel 38 Pendidikan Anak dan Keterlibatan Orang Tua	40
Tabel 39 Partisipasi Anak dalam Pekerjaan Berbayar, Tidak Berbayar, dan Rumah Tangga	41
Tabel 40 Ekspektasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak	41
Tabel 41 Karakteristik Komite Sekolah	74
Tabel 42 Karakteristik Responden, Proses Pemilihan, dan Sumber Pendanaan Komite Sekolah	43
Tabel 43 Keterlibatan Orang Tua di Sekolah, Tahun Akademik 2015/16	45

Tabel 44 Kegiatan Komite Sekolah, Tahun Akademik 2015/16	75
Tabel 45 Kelas yang Diamati Tanpa Kehadiran Guru	48
Tabel 46 Ketidakhadiran Guru di Sekolah	49
Tabel 47 Ketidakhadiran Guru pada Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas	51
Tabel 48 Regresi OLS Ketidakhadiran Guru di Kelas Terkait Karakteristik Guru dan Sekolah Pilihan	52
Tabel 49 Ketidakhadiran Murid, Insiden, dan Penyebab Berdasarkan Kelas	76
Tabel 50 Nilai Tes Murid: Statistik Deskriptif	56
Tabel 51 Nilai Tes Murid dalam Bahasa Indonesia dan Matematika, Berdasarkan Pendidikan Orang Tua	53
Tabel 52 Klasifikasi Kompetensi Murid dalam Bahasa Indonesia, Berdasarkan Kelas	75
Tabel 53 Klasifikasi Kompetensi Murid dalam Matematika, Berdasarkan Kelas	78
Tabel 54 Regresi OLS Nilai Tes Murid Terkait Karakteristik Murid dan Sekolah Pilihan	60
Tabel 55 Ketersediaan Sekolah Dasar di Tingkat Kecamatan	79
Tabel 56 Rerata Nilai Tes Murid, Berdasarkan Kelas dan Jenis Kelamin	80
Tabel 57 Ketidakhadiran Murid, Berdasarkan Kelas dan Jenis Kelamin	81
Tabel 58 Regresi OLS Karakteristik Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru Terkait Kekurangan Guru yang Dilaporkan di Sekolah	82



Ucapan Terima Kasih

Studi analitik “KIAT Guru Indonesia: Meningkatkan Kinerja Guru dan Akuntabilitas” dipimpin oleh Dewi Susanti (*Senior Social Development Specialist*) dengan tim inti yang terdiri dari Christopher Bjork (*Professor of Educational Studies, Vassar College*); Arya Gaduh (*Associate Professor of Economics, University of Arkansas*); Jan Priebe (*Research Fellow, German Institute of Global and Area Studies*); dan Menno Pradhan (*Professor, Amsterdam Institute for International Development - Free University and University of Amsterdam*). Adama Bah (*Development Economist, KIT Royal Tropical Institute*), Jan Priebe, dan Dewi Susanti menyusun laporan ini. Tim analisis penelitian terdiri dari Rajius Idzalika (*Monitoring and Evaluation Analyst, Former Consultant, World Bank*); Kurniawati (*Data Management Analyst, TNP2K*); Sharon Kanthy Lumbanraja (*Research and Knowledge Management Analyst, TNP2K*); dan Indah Ayu Prameswari (*Research and Knowledge Management Associate, TNP2K*).

Pengumpulan dan pengolahan data dipimpin oleh Dedy Junaedi (*Survey Team Leader, Consultant, World Bank*); Lulus Kusbudiharjo (*Survey Assistant Team Leader, Consultant, World Bank*); Anas Sutisna (*Survey Assistant Team Leader, Consultant, World Bank*); dan Mulyana (*Data Programmer, Consultant, World Bank*), dengan kontribusi besar pengumpulan data yang dilakukan oleh Anggitya Eki Adista, Agustian, Aulia Subur Prasetyo Aji, Sulthani Al Aziz, Riska Ayu Andriyani, Meritaningrum Anggraeni, Fitri Nur Annisa, Rizwar Ansyari, Kartika Yoga Asmara, Doni Aswandi, Johannes Adio B, Budiyanto, Fiske Kristina Chandrawati, Sartika Dewi, Santi Dwiningsih, M Makhrus Effendi, Nurul Endrastuti, Mochamad Faizin, Niza Ferlina, Paulus Fernandez, Astarina Fiona, Muhammad Firdaus, Fitra, Ikhwani, Hendri Gunawan, Yuyu Gustiana, Rois Habibi, Vembri Harjanti, Syarif Hidayat, M Ikhsanudin, Farikha Fathul Imami, Nurul Isnaini, Wulan Kusuma Jati, Hikmat Catur Jayusman, Panggung Dwi Kuncoro, Mugi Lestari, Ade Liska, Budi Marwanto, Amrinsiana Merry, Siti Munawaroh, Syirojan Muniron, Ria Arbiati Ningtyas, Irvan Noer, Nur Aji Nugroho, Nurbaiti, Sigit Sawung Pamuji, Andriyani Prabawati, Aninda Pratiwi, Jayus Priyana, Nunik Pudyastini, Lilik Hadi Purwanto, Deny Puspitasari, Dani Ramdani, Ramdhony, Rano, A Rifa'i, Deni Riyanto, Ade Rizky, Nur Rochim, Anton Rohmadi, Sabiruddin, Rahmat Saiful, Dedy Samsiar, Itmamul Wafa Samudra, Teguh Santoso, Idha Ayu Setyawati, Setyorini, Isti Sofia, Subadri, Sukiyanto, Ika Sundari, Fanser Syahtriawan, Nanang Tanjung, Taufan, Taufiqqurohman, M Yahya Yogo Utomo, Ariani Widiastuti, Rini Widiastuti, Wiwit Widiyani, Arief Setio Widodo, Ika Widyaningsih, Dewi Widyastuti, Tyani Aji Windu, Retno Suci Wulandari, Tri Widadi Wulandari, Rohmad Yasin Y, Rangga Sukma Yana, Hanifan Yudhistira, Yuliawati, Zezen Zaenudin dan Muhammad Zulfan. Caroline Tupamahu (*Project Team Leader, BaKTI*); Setiawan Cahyo Nugroho (*Technical Coordinator, KIAT Guru, TNP2K*); dan Tri Yuni Rinawati (*Operations Coordinator, KIAT Guru, TNP2K*) mengoordinasikan masukan-masukan dan mendukung pelaksanaan survei mewakili TNP2K dan BaKTI.

Anggota tim pendukung termasuk Gregorius Kelik Endarso (*Operations Analyst, World Bank*); Yulia Herawati (*Social Development Specialist, World Bank*); Lily Hoo (*Former Senior Social Development Specialist, World Bank*); Audrey Sacks (*Senior Social Development Specialist, World Bank*); dan tim klaster Pendidikan Indonesia, dipimpin oleh Tazeen Fasih (*Lead Economist*) dan Noah Bunce Yarrow (*Senior Social Education Specialist*). Megha Kapoor (*Knowledge Management Officer, World Bank*); Chatarina Ayu Widiarti (*Program Analyst, World Bank*); dan Fazlania Zain (*Communication and Operations Consultant, World Bank*) memberikan dukungan menyeluruh kepada tim. Audrey Sacks dan Andrew B. Ragatz (*Senior Education Specialist, World Bank*) meninjau naskah laporan ini dan memberikan masukan yang membangun untuk penyelesaian laporan. Penyelesaian proses publikasi laporan ini oleh Dinda Putri Hapsari (*Knowledge Management Consultant, World Bank*), dan Desain dan tata letak laporan oleh Yohanes Cahyanto Aji.

Bank Dunia berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia (Kemendikbud) dan Tim Nasional untuk Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di bawah Kantor Wakil Presiden Indonesia (TNP2K) atas saran dan dukungan yang sangat penting bagi keberhasilan prakarsa ini. Bank Dunia secara khusus berterima kasih kepada Bapak Bambang Widianto (Sekretaris Eksekutif, TNP2K); Bapak Sumarna Surapranata (mantan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud); Bapak Supriano (Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Kemendikbud); Bapak E. Nurzaman (Sekretaris Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan periode Tahun 2015-2018, Kemendikbud); Ibu Dian Wahyuni (Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Kemendikbud); Bapak Praptono (Direktur Pengembangan Guru Pendidikan Dasar, Kemdikbud); Bapak Temu Ismail (Kepala Seksi Hukum, Tata Kelola dan Ketenagakerjaan, Kemendikbud); dan Ibu Budi Kusumawati (Kepala Subbagian Hukum, Tata Kelola dan Ketenagakerjaan, Kemendikbud) atas arahan dan dukungannya.

Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Pemerintah Australia dengan murah hati mendukung pembiayaan studi ini dan memberikan arahan dan dukungan berkelanjutan kepada Tim. Selain itu, Tim Kerja berterima kasih atas arahan yang diberikan oleh *Country Management Unit* termasuk Rodrigo Chaves (*Country Director*); Rolande Simone Pryce (*Operations Manager*); dan Camilla Holmemo (*Program Leader*). Kevin Tomlinson (*former Social Development Program Manager*), dan Nina Bhatt (*Social Development Practice Manager*) memberikan pendampingan dari segi pengawasan kepada Tim Kerja.

Daftar Singkatan

ACDP	<i>Analytical and Capacity Development Partnership</i>
ASER	<i>Annual Status of Education Report</i>
Kemendikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
KIAT Guru	Kinerja dan Akuntabilitas Guru
NTT	Nusa Tenggara Timur
OECD	<i>Organisation for Economic Co-operation and Development</i>
OLS	<i>Ordinary Least Squares</i>
PISA	Programme for International Student Assessment
PLN	Perusahaan Listrik Negara
PNS	Pegawai Negeri Sipil
IDR	Rupiah Indonesia
SLA	<i>Student Learning Assessment</i>
TAS	<i>Teacher Absence Survey</i>
TIMSS	<i>Trends in International Mathematics and Science Study</i>
UNICEF	<i>United Nations Children's Emergency Fund</i>



PETA INDONESIA

WAWASAN NUSANTARA



Ringkasan Eksekutif

Indonesia membutuhkan tenaga kerja yang sangat terampil dan berpendidikan agar dapat terus bersaing di dunia yang semakin mengglobal. Pemerintah Indonesia mengakui bahwa tenaga kerja yang berpendidikan tinggi dan terampil sangat penting dalam upaya mengurangi ketidakesetaraan dan kemiskinan. Untuk memastikan pendidikan mendapat perhatian yang memadai, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan 20 persen dari anggaran pemerintah nasional dan kabupaten untuk pendidikan. Target ini tercapai pada tahun 2009 dan terus berlanjut sampai sekarang.

Indonesia telah mencapai partisipasi universal untuk pendidikan dasar dan menengah. Perhatian Pemerintah terhadap pendidikan melalui kebijakan-kebijakannya, serta pertumbuhan ekonomi yang baik selama dua dekade terakhir, telah memungkinkan partisipasi bruto di tingkat pendidikan dasar mencapai hampir 100 persen, sementara partisipasi bruto di tingkat pendidikan menengah meningkat dari 55 persen menjadi lebih dari 86 persen.¹

Walaupun partisipasi pendidikan berhasil ditingkatkan, murid Indonesia masih memiliki hasil belajar yang rendah, terutama di daerah perdesaan dan terpencil. Berbagai studi menunjukkan bahwa lama seseorang mengenyam pendidikan dan angka partisipasi tidak berkorelasi dengan kualitas pendidikan. Dengan kata lain, "bersekolah bukan berarti belajar" (Pritchett 2013; Bank Dunia 2018a). Dalam semua asesmen internasional (seperti PISA, TIMSS, dan PIRLS), murid Indonesia menempati peringkat bawah (Hanushek dan Woessmann 2007; OECD 2017; Bank Dunia 2017). Selama 20 tahun terakhir, hasil belajar murid Indonesia tidak mengalami peningkatan (OECD 2017; Beatty et al.2018). Selain itu, penelitian menunjukkan bahwa sekolah dasar dan menengah di daerah perdesaan dan terpencil memiliki hasil belajar yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan sekolah-sekolah di perkotaan (Stern dan Nordstrum 2014; BPS 2017; Beatty et al.2018).

Kesenjangan hasil pendidikan di perdesaan dibandingkan perkotaan dipengaruhi oleh adanya tantangan dari sisi penyedia layanan dan pengguna layanan. Dari perspektif penyedia layanan, ketidakhadiran guru di kelas adalah tantangan utama di daerah terpencil di negara ini. Sebuah survei ketidakhadiran guru yang pertama kali dilakukan di Indonesia menemukan rata-rata nasional 15 persen guru absen dari sekolah, dengan tingkat ketidakhadiran 24 persen bagi mereka yang bekerja di daerah terpencil (Chaudhury, et al.2006). Survei lain yang lebih terkini menemukan bahwa walaupun ketidakhadiran guru di kelas secara umum telah berkurang, tingkat ketidakhadiran guru di kelas pada wilayah perdesaan tetap tinggi, yaitu 20 persen, dibandingkan dengan ketidakhadiran guru di kelas pada wilayah perkotaan, sebesar 6 persen (ACDP 2016). Tingkat ketidakhadiran guru di kelas pada wilayah yang lebih terpencil seperti Papua dan Papua Barat bahkan lebih tinggi lagi, yaitu 37 persen (UNICEF 2012). Sementara itu, dua pertiga sekolah di daerah terpencil tidak memiliki guru, tetapi dua pertiga sekolah perkotaan memiliki terlalu banyak guru (Bank

Anggaran pemerintah pusat dan kabupaten untuk pendidikan

20%

tercapai pada tahun 2009

Partisipasi bruto di tingkat sekolah menengah

55%

menjadi lebih dari

86%

Ketidakhadiran guru di kelas

15%

(2006)

Ketidakhadiran guru di kelas pada daerah terpencil

24%

(2006)

¹ Partisipasi kasar adalah persentase populasi yang berada di sekolah tanpa memandang usia, dibandingkan dengan jumlah populasi usia sekolah pada tingkat sekolah tertentu. World Bank World Development Indicator Database, <https://data.worldbank.org/indicator/SE.SEC.ENRR?locations=ID>

Survei tahap awal KIAT Guru ini mencakup

270

sekolah dasar terpendil antara tahun 2016 - 2017



Dunia 2013b). Dari perspektif pengguna layanan, tingginya tingkat kemiskinan di perdesaan menghambat keluarga untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke sekolah (BPS 2016; Bank Dunia 2016). Pandangan orang tua tentang pendidikan juga menentukan tingkat partisipasi. Pendidikan lebih dini tidak menghasilkan dampak langsung, namun lebih sering berarti berkurangnya satu atau beberapa anak yang dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga di perdesaan. Dengan demikian, karena pendidikan kurang dihargai, partisipasi di perdesaan menjadi lebih buruk.

Sejak awal 2000-an, Pemerintah Indonesia telah mengalihkan fokus kebijakan pendidikan pada peningkatan kualitas dan kesetaraan.

Upaya peningkatan kualitas termasuk menyediakan lebih banyak sumber daya bagi sekolah (melalui Bantuan Operasional Sekolah); meningkatkan kualifikasi guru; meningkatkan partisipasi masyarakat melalui komite sekolah; dan menentukan tolok ukur kinerja murid berdasarkan asesmen internasional. Selain itu, Pemerintah Indonesia kini memberikan bantuan tunai langsung kepada murid dari latar belakang keluarga miskin untuk bersekolah; dan menetapkan kebijakan rotasi guru secara sistematis untuk memastikan pemerataan penyebaran guru.

Sejak tahun 2016, Bank Dunia mendukung Pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kinerja guru dan partisipasi masyarakat dalam pendidikan melalui KIAT Guru.

KIAT Guru (Kinerja dan Akuntabilitas Guru) dilaksanakan di lima kabupaten, yaitu Ketapang, Landak, dan Sintang (di Provinsi Kalimantan Barat), serta Manggarai Barat dan Manggarai Timur (di Provinsi Nusa Tenggara Timur). Sebelum memulai KIAT Guru, sebuah survei tahap awal, yang hasilnya dirangkum dalam laporan ini, dilakukan di 270 sekolah dasar terpendil antara tahun 2016-2017 dengan berbagai pemangku kepentingan lokal, termasuk staf sekolah (kepala sekolah dan guru); komite sekolah; kepala desa; dan orang tua. Instrumen survei dirancang untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan dasar di daerah terpendil. Laporan ini menyajikan gambaran terperinci mengenai enam temuan utama survei dibawah ini:

Keterbatasan konektivitas

149^{km}

rata-rata lima jam perjalanan dari rumah dan sekolah ke ibukota kabupaten

29%

wilayah studi yang memiliki koneksi listrik

17%

wilayah studi yang memiliki akses internet

1. Sekolah dan desa memiliki berbagai keterbatasan yang menghambat peningkatan hasil pendidikan yang baik.

Ada keterbatasan konektivitas: secara rata-rata, rumah tangga dan sekolah berjarak 149 km atau lima jam perjalanan dari ibukota kabupaten; hanya 29 persen memiliki koneksi ke listrik; akses internet terbatas (17 persen); dan jarak jauh ke lembaga keuangan memengaruhi proses pengambilan gaji guru (rata-rata 52 km atau 2,3 jam). Hambatan prasarana juga memengaruhi penempatan guru yang lebih muda dan bermotivasi tinggi di daerah perdesaan dan terpendil. Selain itu, biaya yang terkait dengan keterpendilan juga memengaruhi pemerintah dalam memprioritaskan pendanaan untuk sekolah. Sumber daya yang tersedia di sekolah-sekolah percontohan mungkin memperlihatkan kelayakan: 91 persen memiliki toilet dengan rasio jenis kelamin yang seimbang (50 persen untuk perempuan); 54 persen sekolah memiliki perpustakaan; dan 39 persen memiliki buku teks yang memadai. Namun kesenjangan dalam bidang-bidang ini tidak akan dapat diatasi tanpa memperhatikan *bagaimana* dana dialokasikan, dan bukan hanya berfokus pada *jumlah* alokasi.

2. Kekhasan karakteristik sekolah dalam hal ukuran kelas, komposisi guru, dan manajemen sekolah perlu menjadi pertimbangan bagi kebijakan pendidikan.

Meskipun rasio kelas cukup sebanding dengan rata-rata nasional (20 murid per kelas di daerah terpencil dibandingkan dengan 23 di tingkat nasional), guru daerah terpencil sering harus menggantikan guru yang tidak hadir dan mengajar beberapa kelas (di 25 persen sekolah survei) meskipun belum terlatih untuk melakukannya. Hasil survei menunjukkan bahwa guru tetap yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) baru mencapai 40 persen, sehingga kekurangan tenaga pengajar diisi oleh guru kontrak yang merupakan mayoritas dari tenaga pengajar yang ada (42,5 persen guru honorer dikontrak oleh sekolah dan 15,8 persen dikontrak oleh kabupaten atau provinsi). Dibandingkan dengan guru tetap, guru kontrak memiliki kualifikasi lebih rendah, gaji yang jauh lebih rendah, dan karenanya lebih mungkin memiliki pekerjaan sampingan. Cukup banyak dari mereka yang tidak memiliki gelar pendidikan tinggi: 34 persen guru dan 18 persen kepala sekolah hanya lulusan sekolah menengah atas. Selain itu, meskipun Bahasa Indonesia seharusnya menjadi bahasa pengantar utama di sekolah dasar, penelitian ini mengungkapkan bahwa hal tersebut seringkali tidak terjadi. Hampir sepertiga sekolah di Nusa Tenggara Timur menggunakan bahasa daerah dalam kegiatan belajar mengajar. Meskipun hal ini dapat meningkatkan pemahaman pembelajaran, kondisi ini menimbulkan tantangan ketika murid mengikuti ujian nasional dalam Bahasa Indonesia.

3. Penghasilan guru sangat timpang, dan dapat memengaruhi motivasi guru.

Perbedaan penghasilan guru bermula pada status pegawai dan sertifikasi. Rerata penghasilan bulanan guru PNS yang tersertifikasi adalah Rp8,4 juta, sementara PNS yang tidak tersertifikasi berpenghasilan sekitar Rp4,6 juta per bulan. Mereka yang non-PNS berpenghasilan terendah, dengan pendapatan bulanan rata-rata Rp 550.000.²

4. Ketidakhadiran guru di sekolah dan di kelas merupakan masalah serius.

Kunjungan mendadak ke sekolah sampel mendapati 25 persen ruang kelas tanpa guru, dan 17 persen guru tidak hadir di sekolah pada hari tertentu. Analisis kami menunjukkan bahwa guru laki-laki dan status PNS berkaitan dengan ketidakhadiran guru di kelas, demikian juga kurangnya pengawasan dari kepala sekolah. Dengan kata lain, guru perempuan dan guru kontrak lebih sering mengajar. Analisis kami juga menunjukkan bahwa guru yang dievaluasi cenderung memiliki tingkat kehadiran yang lebih baik di sekolah. Oleh karena itu, memastikan pemantauan dan pengawasan guru dapat meningkatkan kehadiran guru.

5. Hasil belajar murid rendah.

Sebagian besar murid yang dites menunjukkan kemampuan yang tertinggal dua tingkat di bawah kelas yang mereka ikuti saat ini dan mereka belum menguasai standar dasar dari tingkat kelas sebelumnya. Murid kelas empat, misalnya, menunjukkan kompetensi murid kelas dua. Analisis kami mengaitkan hasil belajar murid yang rendah dengan pendidikan orang tua yang rendah; lebih sedikit waktu yang didedikasikan untuk pendidikan anak mereka; dan keterlibatan antara komite sekolah dan guru yang jauh lebih sedikit.

Komposisi guru

40%

guru tetap yang merupakan pegawai negeri sipil

42,5%
dikontrak oleh sekolah

15,8%
dikontrak oleh kabupaten atau provinsi

Ketidakhadiran guru di kelas

Kunjungan mendadak ke sekolah sampel mendapati

25%

ruang kelas tanpa guru

17%

guru tidak hadir di sekolah pada hari tertentu

² Nilai tukar adalah sekitar Rp14.000 per USD1 pada tanggal publikasi.

Kepuasan Orang Tua

★★★★★ ★★★★★



orang tua dan komite sekolah melaporkan bahwa mereka puas dengan kualitas pendidikan dan hasil belajar

6. Kepuasan orang tua dengan kualitas pendidikan dan hasil belajar berbeda dengan temuan studi.

Pada saat wawancara, orang tua mengatakan bahwa mereka secara aktif mendukung studi anak-anak mereka di rumah dan mengetahui mata pelajaran yang tidak dikuasai anak-anak mereka. Sebagai bukti keterlibatan aktif orang tua dalam pendidikan anak-anak mereka, lebih dari empat perlima orang tua dalam sampel berkunjung ke sekolah anak mereka dan lebih dari empat perlima komite sekolah mengadakan rapat terpisah dengan kepala sekolah dan orang tua selama tahun akademik 2015/16. Secara umum, orang tua dan komite sekolah melaporkan bahwa mereka puas dengan kualitas pendidikan dan hasil belajar. Temuan terakhir ini agak mengejutkan mengingat tingkat ketidakhadiran guru di kelas yang tinggi dan hasil belajar murid yang rendah di wilayah studi. Temuan ini menunjukkan bahwa orang tua memiliki ekspektasi yang sangat moderat terhadap kualitas pendidikan yang diberikan di sekolah, atau mereka tidak sepenuhnya memahami standar layanan yang seharusnya diberikan oleh guru.

Berdasarkan temuan survei, kami mengidentifikasi enam rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan hasil belajar di sekolah di daerah terpencil. Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia yang baik dapat berkontribusi pada pendidikan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi itu sendiri bukan jaminan bagi peningkatan hasil belajar murid. Untuk memberikan kualitas pendidikan yang lebih baik bagi anak-anak di daerah terpencil, sangat penting bagi Pemerintah Indonesia untuk menjalankan serangkaian kebijakan yang komprehensif.



Perbaikan prasarana—jalan, telekomunikasi, dan listrik yang lebih baik—akan berkontribusi pada kemudahan akses ke daerah-daerah terpencil. Terkait dengan itu, renovasi sarana sekolah, termasuk penyediaan perumahan untuk guru, perlu diprioritaskan untuk meningkatkan kondisi kerja guru yang ditugaskan di daerah-daerah tersebut.



Ketidakhadiran guru di kelas adalah masalah serius yang perlu ditangani karena secara langsung memengaruhi pembelajaran murid di sekolah. Perbaikan prasarana kemungkinan akan mengurangi ketidakhadiran guru di kelas karena mempermudah pengawasan ke sekolah, dan mempercepat waktu tempuh ke lembaga keuangan, kesehatan, dan lainnya. Pemerintah Indonesia dapat mempertimbangkan pembayaran elektronik gaji dan tunjangan guru guna mengurangi kebutuhan para guru untuk bepergian. Selain itu, berbagai cara untuk meningkatkan akuntabilitas guru perlu diuji efektivitasnya bersamaan dengan pemberian sanksi kepada guru dengan kinerja rendah.



Meningkatkan hasil belajar murid perlu dimulai dengan menyampaikan hasil belajar dapat dipahami oleh pemangku kepentingan pendidikan, melacak perkembangan dari waktu ke waktu, dan membandingkan hasil di tingkat sekolah dengan hasil di tingkat kabupaten atau nasional. Kolaborasi antara guru dan orang tua untuk mendukung pembelajaran murid kemungkinan juga dapat meningkatkan aspirasi dan prospek karier yang lebih baik di kalangan murid.



Meningkatkan pengetahuan dan kesadaran orang tua akan tingkat ketidakhadiran guru di kelas yang tinggi dan hasil belajar yang rendah kemungkinan akan meningkatkan tuntutan mereka dalam peningkatan kualitas pendidikan. Hal ini memerlukan penetapan standar layanan yang diharapkan dari guru dan diketahui oleh para pemangku kepentingan pendidikan. Selain itu, peningkatan kesadaran akan peran dan partisipasi orang tua dalam mendukung pembelajaran anak sangat penting untuk meningkatkan keterlibatan mereka.



Mekanisme untuk menjadikan tunjangan guru lebih efektif dalam meningkatkan kinerja guru dan hasil belajar murid perlu diidentifikasi dan diuji untuk implementasi oleh pemerintah. Sebagai contoh, jumlah tunjangan yang dibayarkan harus dibuat bersyarat berdasarkan kehadiran guru, kinerja guru, dan/atau sebagian kecil dari hasil belajar murid.



Kualifikasi dan keterampilan guru di daerah terpencil perlu ditingkatkan. Dalam jangka pendek, harus lebih banyak diberikan pelatihan pengembangan kapasitas dengan memprioritaskan guru di daerah terpencil atau dengan menetapkan persentase tertentu dari peserta pelatihan untuk guru di daerah terpencil. Dalam jangka panjang, harus lebih banyak guru yang lebih berkualitas dan lebih muda didistribusikan ke daerah-daerah terpencil dengan kesepakatan waktu penugasan, yang dapat meningkatkan poin kredit mereka menuju sertifikasi yang lebih cepat atau kualifikasi mereka untuk menjadi PNS. Perbaikan prasarana juga akan memungkinkan guru untuk mempertimbangkan pendidikan tinggi, mengikuti pelatihan pengembangan kapasitas, atau mengambil kursus pembelajaran jarak jauh.

Melalui KIAT Guru, Pemerintah Indonesia, dengan bantuan teknis dari Bank Dunia, telah mulai mengatasi beberapa tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan di daerah terpencil.

Menyadari bahwa ketidakhadiran guru di kelas adalah hambatan serius dalam penyediaan layanan pendidikan, KIAT Guru menggugah kesadaran para pemangku kepentingan tentang masalah ini, seiring dengan fakta bahwa hasil belajar murid di 270 sekolah rata-rata berada dua tingkat di bawah standar kurikulum nasional. KIAT Guru menguji dua mekanisme untuk meningkatkan kehadiran guru, kinerja layanan guru, dan hasil belajar murid. Mekanisme Akuntabilitas Sosial (MAS) memberi anggota masyarakat peran eksplisit untuk memantau dan mengevaluasi kinerja layanan guru dan memastikan akuntabilitas guru. Sementara itu, Mekanisme Pembayaran berbasis Kinerja (MPK) mengaitkan pembayaran Tunjangan Khusus Guru dengan kehadiran guru atau kualitas layanan guru. Dua mekanisme ini digabungkan menjadi tiga kelompok pendekatan, yaitu (1) MAS; (2) MAS + MPK berbasis kehadiran guru; dan (3) MAS + MPK berbasis kualitas kinerja layanan guru. Sebanyak 270 sekolah yang termasuk dalam survei dibagi secara acak ke dalam tiga kelompok intervensi dan dibandingkan dengan kelompok kontrol.

Bank Dunia telah melakukan evaluasi atas pelaksanaan KIAT Guru dan menemukan dampak positif.

Survei kedua di 270 sekolah dilakukan pada awal 2018 dan hasilnya dibandingkan dengan survei awal yang tercakup dalam laporan ini. Evaluasi dampak menemukan bahwa ketiga kelompok intervensi KIAT Guru memiliki kinerja yang lebih baik secara statistik dan signifikan daripada kelompok kontrol yang tidak menerima intervensi KIAT Guru. MAS yang dikombinasikan dengan MPK berbasis kehadiran guru ("Kelompok 2") memiliki efek positif terkuat terhadap hasil belajar murid dalam matematika dan Bahasa Indonesia (masing-masing pada 0,19 dan 0,17 standar deviasi). Kelompok 2 meningkatkan kehadiran guru penerima TKG di ruang kelas dan meningkatkan keterlibatan orang tua dalam rapat dengan guru dan dalam mengawasi pembelajaran di rumah (Gaduh, et al, 2019). Evaluasi dampak ini disertai dengan penelitian kualitatif yang dilakukan di sembilan sekolah studi, yang temuannya memperkuat rekomendasi untuk Kelompok 2 sebagai pendekatan yang paling efektif (Bjork & Susanti, 2019). Evaluasi dampak, penelitian kualitatif, dan monitoring proses menghubungkan keberhasilan intervensi dengan empat elemen utama: (a) meningkatkan kesadaran orang tua tentang hasil belajar murid dan keterlibatan mereka dalam meningkatkan pembelajaran; (b) menjaga akuntabilitas guru melalui beberapa indikator evaluasi kinerja yang sederhana dan objektif; (c) secara aktif melibatkan para pemangku kepentingan eksternal dalam mendukung, memantau, dan mengevaluasi penyediaan layanan pendidikan; dan (d) membayar tunjangan guru berdasarkan indikator kinerja objektif.

Saya Sebagai Anak Perempuan atau



01

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia menyadari pentingnya pendidikan dalam meningkatkan produktivitas dan mengurangi kemiskinan dan ketimpangan. Peningkatan anggaran pemerintah untuk pendidikan sebanyak tiga kali lipat sejak tahun 2001 telah menghasilkan banyak kemajuan dalam upaya mencapai partisipasi sekolah dasar dan menengah pertama. Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengamanatkan 20 persen dari anggaran pemerintah nasional dan kabupaten untuk pendidikan, hal tersebut telah dicapai sejak tahun 2009. Pada tahun 2017, angka partisipasi kasar anak Indonesia berusia 13 hingga 15 tahun mencapai lebih dari 95 persen.³

Fokus kebijakan pendidikan di Indonesia saat ini adalah peningkatan kualitas dan kesetaraan. Hal tersebut meliputi pelaksanaan yang lebih besar kepada sekolah atas sumber daya pendidikan (melalui Bantuan Operasional Sekolah⁴), meningkatkan kapasitas dan kualifikasi guru, meningkatkan partisipasi masyarakat melalui komite sekolah, dan menentukan standar hasil belajar murid melalui partisipasi dalam asesmen internasional. Pemerintah Indonesia juga menyediakan bantuan langsung tunai kepada murid dari keluarga miskin, serta berupaya meningkatkan kesetaraan pendidikan dengan memperbaiki tata kelola penyebaran guru.

Terdapat reformasi dalam kebijakan pendidikan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan guru, namun kinerja guru tetap stagnan. Undang-undang no.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mewajibkan guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana, dan menyelesaikan proses sertifikasi pada tahun 2015.⁵ Bagi guru yang telah menyelesaikan proses sertifikasi,⁶ undang-undang tersebut memberlakukan tunjangan sertifikasi hingga 100 persen dari gaji pokok. Bagi mereka yang bekerja di daerah terpencil tidak hanya menerima tunjangan sertifikasi, tetapi juga ditambah dengan tunjangan daerah terpencil.⁷ Setengah dari anggaran pendidikan nasional telah dialokasikan untuk gaji dan tunjangan guru yang berjumlah lebih dari tiga juta guru, yang pada tahun 2018 mencapai Rp225 triliun. Namun kondisi yang masih terjadi adalah, guru yang menerima tunjangan daerah terpencil memiliki tingkat ketidakhadiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan guru yang tidak menerima tunjangan di sekolah yang sama. Demikian juga hasil belajar murid dari guru bersertifikasi tidak berbeda dengan murid dari guru yang tidak bersertifikasi.⁸

³ Badan Pusat Statistik 2018.

⁴ Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah dana operasional yang dikelola sekolah yang dialokasikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan jumlah murid yang terdaftar di sekolah. Pada tahun 2018, besar dana BOS adalah Rp800.000 per murid per tahun.

⁵ <http://peraturan.go.id/uu/nomor-14-tahun-2005.html>.

⁶ Proses sertifikasi guru mengharuskan guru memiliki gelar sarjana, menyerahkan portofolio pengalaman mengajar mereka, dan lulus tes kompetensi. Pada saat ini sertifikasi guru berlaku seumur hidup, tanpa ada proses sertifikasi ulang.

⁷ Tunjangan Khusus Guru dialokasikan untuk guru yang ditugaskan di daerah khusus, termasuk daerah terpencil. Untuk kemudahan referensi, kami menggunakan istilah tunjangan daerah terpencil dalam laporan ini.

⁸ Toyamah et al. 2010; De Ree et al. 2018.

Murid-murid Indonesia memiliki tingkat hasil belajar yang relatif rendah. Berdasarkan semua asesmen internasional, hasil belajar murid Indonesia berada di peringkat terbawah di antara negara-negara peserta asesmen.^{9,10} Selain itu, hanya sedikit kemajuan yang telah dicapai dalam hasil belajar murid selama 20 tahun terakhir (OECD 2016; Beatty et al. 2018). Asesmen dari Programme for International Student Assessment (PISA) hanya kurang dari satu dari dua murid Indonesia yang memiliki kemampuan dasar dalam membaca yang dibutuhkan dalam kehidupan yang efektif dan produktif.¹¹ Berdasarkan Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), nilai matematika murid kelas empat Indonesia berada di peringkat 53 di antara 57 negara peserta.¹² Berdasarkan asumsi perkembangan kemampuan murid pada tes PISA dari tahun 2003 hingga 2015, *World Development Report 2018* memproyeksikan bahwa Indonesia akan membutuhkan waktu 48 tahun untuk mencapai kemampuan rata-rata matematika dan 73 tahun untuk kemampuan membaca di negara-negara maju yang tergabung dalam *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), jika praktik pendidikan tidak berubah (Beatty 2018; Bank Dunia 2018a). Pada kenyataannya, praktik “bersekolah namun tidak belajar”¹³, lama murid mengenyam pendidikan serta angka partisipasi tidak selalu memberikan dampak pada kualitas pendidikan yang ada. Mengingat pentingnya kualitas pendidikan peningkatan taraf ekonomi dan kesejahteraan seseorang, serta pertumbuhan ekonomi,¹⁴ pemerintah di seluruh dunia perlu fokus untuk mencapai hasil belajar murid yang lebih baik. Selain itu, perlu dipahami bahwa hasil belajar murid sangat bervariasi di berbagai wilayah di Indonesia, dimana hasil di perdesaan dan daerah terpencil sangat jauh tertinggal dari perkotaan.¹⁵

Kesetaraan pendidikan di perdesaan dan daerah terpencil yang miskin masih menjadi tantangan (Bank Dunia 2013b). Wilayah perdesaan memiliki tingkat kemiskinan yang secara konsisten lebih tinggi (14,1 persen) dibandingkan dengan perkotaan (8,2 persen), konektivitas yang lebih buruk, dan kualitas layanan dasar yang lebih rendah (BPS 2019). Akibatnya, lebih dari sepertiga peningkatan kesenjangan dari tahun

2002 hingga 2012 dapat dilihat dari tempat seseorang dilahirkan dan siapa orang tuanya (Bank Dunia 2016). Kesenjangan antara perdesaan dan perkotaan tetap ada dalam hal penyediaan dan hasil layanan pendidikan. Dua pertiga sekolah di daerah terpencil kekurangan guru, sementara dua pertiga sekolah perkotaan memiliki terlalu banyak guru (Bank Dunia 2013b). Sekitar 50 persen dari populasi usia 15 tahun ke atas di perdesaan belum menyelesaikan atau hanya menyelesaikan pendidikan dasar, dibandingkan dengan 35 persen di perkotaan (BPS 2018).

Ketidakhadiran guru di kelas merupakan kendala yang signifikan di daerah terpencil. Pada tahun 2003, studi tentang ketidakhadiran guru di kelas yang pertama kali dilakukan di Indonesia menemukan bahwa tingkat ketidakhadiran guru di sekolah dasar negeri dalam lingkup nasional sekitar 19 persen.¹⁶ Meskipun angka ini berkurang menjadi 10 persen pada tahun 2014, namun satu dari lima guru di daerah terpencil masih tidak hadir di kelas.¹⁷ Selain itu, ketidakhadiran guru di Indonesia juga dikaitkan dengan meningkatnya ketidakhadiran murid¹⁸; lebih tingginya tingkat putus sekolah, khususnya di daerah terpencil¹⁹; serta menurunnya nilai tes murid.²⁰

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan dan sumber daya untuk berfokus pada peningkatan penyediaan layanan pendidikan di perdesaan dan daerah terpencil. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 32 Tahun 2007, dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 menetapkan daerah khusus yang meliputi daerah-daerah terpencil, perbatasan, serta rawan bencana dan konflik. Guru yang ditempatkan di daerah ini berhak mendapatkan beberapa kompensasi dan tunjangan tambahan, mulai dari tunjangan perumahan, promosi reguler, promosi khusus, keamanan dan perlindungan kerja, beasiswa, serta prioritas untuk meningkatkan kualifikasi akademik, sertifikasi, dan kompetensi. Selain itu, kini guru berhak untuk mendapatkan tunjangan sebesar dua atau tiga kali lipat gaji pokok mereka, jika mereka memenuhi ketentuan yang disyaratkan. Seorang guru yang bersertifikasi, misalnya, harus memenuhi persyaratan untuk dapat menerima tunjangan profesi (tunjangan sertifikasi), sehingga guru menerima hasil pembayaran

⁹ Negara-negara yang berpartisipasi terdiri dari 34 negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), serta beberapa negara mitra di Amerika Latin, Eropa Timur, Asia, dan Timur Tengah dan Afrika Utara.

¹⁰ OECD 2016; World Bank 2018a.

¹¹ OECD 2016.

¹² Mullis et al. 2016.

¹³ Pritchett 2013; World Bank 2018a.

¹⁴ Hanushek dan Woessmann 2007.

¹⁵ ACDP 2014; Stern dan Nordstrum 2014.

¹⁶ Usman, Akhmadi, dan Suryadarma 2004; World Bank 2004; Chaudhury et al. 2006.

¹⁷ ACDP 2014.

¹⁸ Toyamah et al. 2010.

¹⁹ UNICEF 2012.

²⁰ Usman, Akhmadi, dan Suryadarma 2004; Suryadarma et al. 2006.

beberapa kali lipat dari gaji pokoknya. Demikian pula mereka yang bekerja di daerah khusus berhak menerima tunjangan khusus, yang berkisar antara Rp1,5 juta hingga dua kali lipat gaji pokok guru. Jadi jika seorang guru PNS bersertifikasi bekerja di daerah terpencil, ia berhak atas total penghasilan hingga tiga kali lipat dari gaji pokoknya. Peningkatan penghasilan guru yang signifikan mungkin terlihat sebagai insentif yang penting bagi guru dalam meningkatkan kinerja mereka, namun sebuah studi Bank Dunia menemukan bahwa tidak terdapat dampak dari guru bersertifikasi terhadap hasil belajar murid (De Ree et al., 2018). Hasil serupa ditemukan terkait pemberian tunjangan khusus, di mana guru penerima tunjangan memiliki tingkat ketidakhadiran di kelas tertinggi dibandingkan dengan guru non-penerima tunjangan (Toyamah et al., 2010).

Sebagai tindak lanjut intervensi kebijakan, Pemerintah Indonesia dengan bantuan teknis dari Bank Dunia telah mengimplementasikan program KIAT Guru sejak tahun 2016. KIAT Guru bertujuan untuk meningkatkan kehadiran guru, kinerja layanan guru, dan hasil belajar murid di sekolah dasar daerah terpencil. Sebelum pelaksanaan berbagai intervensi, Bank Dunia melakukan sebuah survei di beberapa wilayah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang tantangan dalam penyediaan layanan pendidikan dasar di daerah terpencil. Wilayah studi terdiri dari lima kabupaten di Indonesia, yaitu Ketapang, Landak, dan Sintang (di Provinsi Kalimantan Barat) dan Manggarai Barat dan Manggarai Timur (di Provinsi Nusa Tenggara Timur/NTT). Laporan ini menyajikan deskripsi terperinci dari temuan survei yang dilakukan di total 270 sekolah dasar di 235 desa yang sangat terpencil. Meskipun pengambilan sampel, instrumen, dan pertanyaan penelitian disusun agar sesuai dengan kebutuhan spesifik KIAT Guru, temuan dari survei ini relatif bersifat umum dalam menginformasikan kondisi pendidikan di wilayah studi.



ROSTER BELAJAR KELOMPOK

- Nama kelompok Belajar = **Ungay**
- Mata Pelajaran = **PKn**
- Hari/Tanggal = **10/10/2018**
- Nama-nama anggota Kelompok =

1. **GLEDYSIA LODONG (LEDU)**
2. **FLAFIANUS TANGIS (RAFU)**
- SRILIA JEMHA (SRI)**
- FORTUNATUS BARUNG (Mbarung)**
- KOLINTUS POGOL (KOLIN)**

Agas Belajar Kelompok =

- Mengerjakan PKn
- Belajar mata Pelajaran yang diajarkan hari itu
- Belajar mata Pelajaran Besok
- Waktu belajar 10 menit

ROSTER HARIAN KELAS IV SDN M...

SENIN	AGAMA	IPA
PKn	AGAMA	MATEK
BINUS	PJOK	MATEK
AGAMA		

JUMAT BINA... SAKTU

02

Lingkup Studi: Lokasi, Instrumen dan Sampel

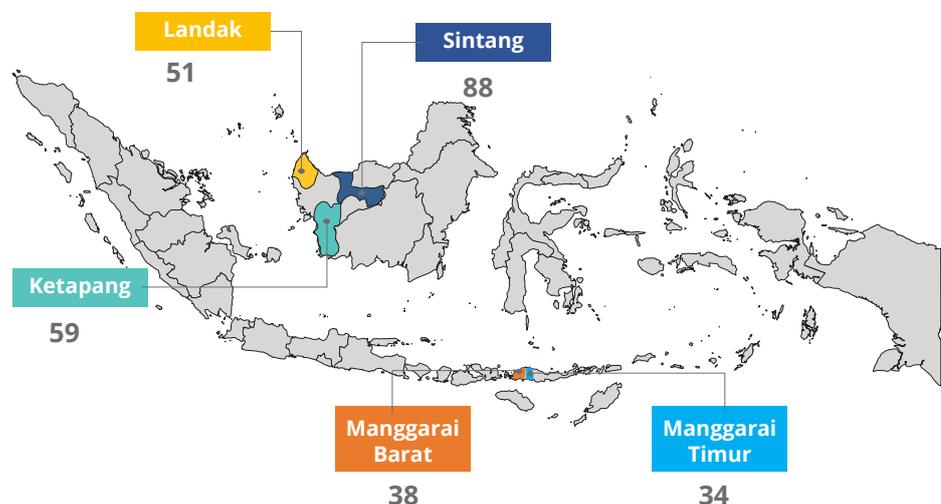
Laporan studi ini memiliki susunan sebagai berikut:

- Bagian 2 menjelaskan lokasi studi.
- Bagian 3 menyajikan konteks sekolah.
- Bagian 4 membahas keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam pendidikan.
- Bagian 5 menganalisis ketidakhadiran guru di sekolah dasar sampel.
- Bagian 6 menganalisis hasil belajar murid.
- Bagian 7 menyajikan kesimpulan studi.

Pemilihan Wilayah Studi

Kabupaten lokasi studi mewakili lima dari 122 kabupaten tertinggal di Indonesia. Pemilihan kabupaten berdasarkan pada daftar kabupaten tertinggal yang disusun oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada tahun 2015. Daftar ini dipersempit melalui parameter yang ditetapkan oleh proyek KIAT Guru. Kabupaten di lokasi yang sangat terpencil, rawan konflik, serta memiliki pengguna layanan pendidikan yang sangat rendah, tata kelola yang sangat lemah, dan biaya operasional yang sangat tinggi tidak dimasukkan dalam daftar. Kabupaten terpilih memiliki setidaknya 40 sekolah dasar di daerah terpencil yang termasuk dalam kategori sekolah yang memenuhi syarat sebagaimana dijelaskan tersebut. Berdasarkan hasil konsultasi dengan Pemerintah di tingkat nasional, daftar ini kemudian lebih dipersempit dan ditinjau untuk mengidentifikasi sekolah-sekolah yang memiliki isu anekdotal tentang ketidakhadiran guru di kelas, dengan pemerintah kabupaten yang menunjukkan keinginan untuk melakukan reformasi. Daftar terakhir (Peta 1) mencakup tiga kabupaten di Kalimantan Barat (Ketapang, Sintang, dan Landak) dan dua kabupaten di NTT (Manggarai Barat dan Manggarai Timur). Sekolah-sekolah yang memenuhi syarat seleksi dalam studi ini memiliki minimal 70 murid, terletak setidaknya satu jam perjalanan dari ibukota kabupaten, dan memiliki sedikitnya tiga guru yang menerima tunjangan daerah terpencil.

Peta 1. Kabupaten yang Wilayah Studi dan Jumlah Sekolah di Setiap Kabupaten



Tabel 1 menyajikan karakteristik lima kabupaten lokasi studi: kemiskinan, keterpencilan, unit administrasi, populasi, dan sekolah, dengan ringkasan temuan yang dijelaskan di bawah ini.

Dibandingkan dengan kabupaten lain di Indonesia, lima kabupaten lokasi studi memiliki tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Tingkat kemiskinan kelima kabupaten lokasi studi lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat kemiskinan provinsi dan nasional, kecuali Sintang, yang memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional (11 persen pada 2016). Kabupaten di Kalimantan Barat memiliki tingkat kesejahteraan lebih tinggi daripada kabupaten-kabupaten di NTT dan memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah daripada rata-rata nasional. Namun tiga kabupaten di Kalimantan Barat memiliki tingkat kemiskinan lebih rendah daripada kabupaten lain di provinsi tersebut. NTT memiliki tingkat kemiskinan rata-rata 22 persen dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional 11 persen. Manggarai Barat berada di bawah rata-rata provinsi dan Manggarai Timur di atasnya, dengan hampir 28 persen penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan.

Kelima kabupaten lokasi studi memiliki karakteristik provinsi yang berbeda dalam hal unit administratif, tetapi memiliki lebih banyak sekolah dasar dan sekolah yang lebih terpencil dibandingkan dengan rata-rata nasional. Tabel 1 menyajikan jumlah rata-rata desa yang tergolong sangat terpencil menurut Indeks Pembangunan Desa 2015.²¹ Kalimantan Barat, 50-80 persen desa di kabupaten Sintang tergolong sangat terpencil. di Manggarai Barat dan Manggarai Timur, sekitar sepertiga desa dikategorikan sangat terpencil, jauh lebih tinggi daripada tingkat provinsi (hanya 14 persen desa yang tergolong sangat terpencil).

Rata-rata populasi desa di lima kabupaten ini relatif kecil dibandingkan dengan tingkat nasional, namun relatif besar dibandingkan dengan tingkat provinsi. Kelima kabupaten lokasi studi memiliki populasi lebih kecil dari rata-rata kabupaten secara nasional, tetapi lebih besar dari rata-rata kabupaten di provinsi masing-masing. Tiga kabupaten Kalimantan Barat, yang memiliki penduduk rata-rata 415.000 jiwa, jauh lebih besar daripada kabupaten NTT yang memiliki

Tabel 1. Karakteristik Kabupaten Wilayah Studi Dibandingkan dengan Rata-Rata Provinsi dan Nasional

	Kalimantan Barat				Nusa Tenggara Timur			Rata-rata Nasional
	Ketapang	Landak	Sintang	Rata-rata Provinsi	Manggarai Barat	Manggarai Timur	Rata-rata Provinsi	
Tingkat kemiskinan (%)	10,99	12,32	10,07	7,87	19,35	27,71	22,19	10,86
Desa-desa yang sangat terpencil berdasarkan IDM (#)	136	79	287	72	55	59	21	26
Desa-desa yang sangat terpencil berdasarkan IDM (%)	51,91	51,30	82,23	48,31	32,54	33,52	13,96	16,28
Kecamatan	21	13	14	12	10	9	14	14
Desa	262	154	349	148	169	176	151	161
Rata-rata # desa per kecamatan	12	12	25	12	17	20	11	12
Total populasi (# individu)	482.831	361.469	400.789	338.349	256.105	275.622	227.083	504.680
Rata-rata populasi desa (# individu)	1.843	2.347	1.148	2.284	1.515	1.566	1.503	3.139
Sekolah dasar	526	457	429	305	259	329	368	289
Rata-rata # sekolah dasar per desa	2	3	1	2	2	2	2	2

Sumber:

- Kecamatan dan desa (2017): Biro Pusat Statistik <https://www.bps.go.id/website/fileMenu/Perka-BPS-No55-Tahun-2017.pdf>.
- Individu dan rumah tangga: SUSENAS Maret 2016 (perhitungan sendiri).
- Data sekolah: Kemendikbud <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp>.
- Tingkat kemiskinan (2016): Biro Pusat Statistik https://www.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Data-dan-Informasi-Kemiskinan-Kabupaten-Kota-2016-.pdf.
- Desa dengan status IDM (2015): Kemendes http://kedesa.id/id_ID/repository/indeks-desa-membangun-indonesia/.

Catatan: IDM = Indeks Desa Membangun; Kemendikbud = Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; SUSENAS = Survei Sosial Ekonomi Nasional.

²¹ Indeks Pembangunan Desa dikembangkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (2015).

penduduk rata-rata 265.000 jiwa. Namun kabupaten wilayah studi di Kalimantan Barat memiliki penduduk per desa yang lebih sedikit daripada desa-desa di rata-rata kabupaten di provinsi ini.

Instrumen Survei

Survei ini menggunakan instrumen untuk mengukur ketidakhadiran guru di kelas dan hasil belajar murid. Survei ketidakhadiran guru di kelas mengacu kepada instrumen Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis (*Analytical and Capacity Development Partnership*, atau ACDP) yang digunakan pada survei tahun 2014, berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk *World Development Report 2004*.^{22,23} Kehadiran guru diamati secara langsung oleh pencacah selama kunjungan sekolah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Kegiatan ini mengumpulkan informasi tentang keberadaan guru (di dalam atau di luar sekolah, dan di dalam atau di luar kelas), kegiatan guru (berhubungan

atau tidak dengan tugas mengajar) selama jam sekolah, dan ketidakhadiran murid di sekolah. Pengamatan ini menghasilkan data untuk menilai tingkat ketidakhadiran guru di sekolah, ruang kelas, dan tugas mengajar.

Student Learning Assessment (SLA) mencakup kompetensi murid dalam literasi dan numerasi, sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam kurikulum nasional 2006. Instrumen SLA adalah tes yang diperuntukkan bagi kelas khusus, yang dikembangkan berdasarkan kerangka kerja dan temuan dari perangkat asesmen internasional dan nasional. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan murid dari tingkat dasar hingga tinggi dalam membaca dan menulis (dalam hal ini, bahasa Indonesia) dan mengerjakan soal-soal matematika.²⁴ Tes ini dikembangkan untuk mencakup penyebaran pertanyaan tingkat kelas bawah secara lebih luas, dan menangkap penyebaran hasil belajar murid yang lebih normal. SLA diberikan kepada semua murid di kelas satu hingga lima di sekolah sampel.²⁵ Dari 28.790 murid

Tabel 2. Jumlah Sampel di Wilayah Studi

Kelas	Jenis Kelamin	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
			Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Jumlah murid yang terdaftar di sekolah							
1	Laki-laki	3.192	633	511	1.080	485	483
	Perempuan	2.685	517	462	888	404	414
2	Laki-laki	2.924	564	484	925	452	499
	Perempuan	2.458	488	408	776	372	414
3	Laki-laki	3.068	615	465	1.024	492	472
	Perempuan	2.616	481	397	864	475	399
4	Laki-laki	3.080	552	557	938	541	492
	Perempuan	2.815	522	449	957	492	395
5	Laki-laki	3.126	552	520	1.015	533	506
	Perempuan	2.826	525	429	996	450	426
Jumlah murid yang hadir di sekolah pada hari pelaksanaan tes							
1	Laki-laki	2.802	537	436	949	431	449
	Perempuan	2.375	441	391	799	359	385
2	Laki-laki	2.641	491	434	838	402	476
	Perempuan	2.280	448	370	720	344	398
3	Laki-laki	2.838	551	410	973	459	445
	Perempuan	2.489	448	367	831	456	387
4	Laki-laki	2.884	492	513	897	516	466
	Perempuan	2.662	476	420	905	477	384
5	Laki-laki	2.918	495	479	964	507	473
	Perempuan	2.723	500	408	964	433	418

²² Chaudhury et al. 2006.

²³ Usman, Akhmadi, and Suryadarma 2004; Toyamah et al. 2010; UNICEF 2012; ACDP 2014.

²⁴ ASER 2014; Gove and Wetterberg 2011; Mullis et al. 2016; Platas et al. 2014; Uwezo 2012.

yang terdaftar di kelas satu hingga lima, 26.612 murid mengikuti tes SLA bahasa Indonesia dan matematika (Tabel 2) dan hadir pada hari pelaksanaan tes yang dilakukan oleh pencacah. Murid kelas satu dan dua mengikuti tes secara individual, yaitu satu orang murid mengerjakan tes pada satu waktu dan diberi waktu 25 menit untuk tes bahasa Indonesia dan 15 menit untuk tes matematika. Murid kelas tiga hingga lima diberi waktu 45 menit untuk tes bahasa Indonesia dan 50 menit untuk tes matematika, dan mengikuti tes secara berkelompok.²⁶

SLA adalah tes pilihan ganda, dengan tiga hingga empat pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan.²⁷ Ada 23 pertanyaan dalam tes bahasa Indonesia dan 30 pertanyaan dalam tes matematika untuk setiap tes di masing-masing tingkat kelas. Kecuali tes untuk kelas satu, semua tes tingkat kelas lainnya dikembangkan dengan penyebaran yang luas atas pertanyaan-pertanyaan tingkat kelas yang lebih rendah, mengingat tes-tes tersebut diberikan pada pertengahan semester pertama tahun akademik. Murid belum diajarkan, karena itu belum menguasai, banyak bagian dari materi tes pada tingkat kelas mereka saat ini. Oleh karena itu, 80 persen pertanyaan untuk tes bahasa Indonesia dan tes

Tabel 3. Partisipan dan Responden Studi

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Kecamatan	33	8	7	7	6	5
Desa	235	59	38	82	27	29
Rumah tangga	5.400	1.179	1.020	1.761	760	680
Murid yang terdaftar di kelas 1-6	35.543	7.350	5.682	11.449	5.709	5.353
Murid yang terdaftar di kelas 1-5	28.791	5.449	4.682	9.463	4.696	4.501
Murid yang dites untuk SLA	26.613	4.879	4.228	8.840	4.384	4.282
Sekolah	270	59	51	88	38	34
Kepala sekolah	270	59	51	88	38	34
Kepala sekolah PNS	268	58	51	87	38	34
Guru yang terdaftar di sekolah	2.293	508	370	700	385	330
Guru yang disurvei	1.917	420	300	585	332	280
Guru PNS	755	140	133	240	137	105
Guru non-PNS	1.162	280	167	345	195	175
Jumlah guru non-PNS (%)	39	33.33	44.33	41.03	41.27	37.50
Guru kontrak	348	176	27	60	18	67
Guru honorer	814	104	140	285	177	108
Guru bersertifikasi	265	52	50	91	48	24
Guru tidak bersertifikasi	1.652	368	250	494	284	256
Komite sekolah	268	58	50	88	38	34
Aktif	254	56	48	82	35	33
Tidak aktif	14	2	2	6	3	1

Catatan: Jumlah kecamatan, desa, dan sekolah dalam sampel. PNS = Pegawai Negeri Sipil; SLA = *Student Learning Assessment*.

²⁵ Agar guru tidak mempersiapkan murid sebelum mengikuti tes, pengumuman tes diberikan kepada guru dan murid sehari sebelum pelaksanaan. Semua murid yang berpartisipasi memulai dengan tes bahasa Indonesia dengan batas waktu 25 menit untuk kelas satu dan dua, dan 45 menit untuk kelas tiga hingga lima. Tanpa diselingi istirahat, kecuali atas permintaan murid, selanjutnya murid mengikuti tes matematika dengan batas waktu 15 menit untuk kelas satu dan dua, dan 50 menit untuk kelas tiga hingga lima. Perbedaan waktu pengujian antara kelas yang lebih rendah dan yang lebih tinggi ditentukan berdasarkan jenis soal tes. Soal tes untuk kelas yang lebih rendah sebagian besar tentang pengenalan (misalnya pengenalan huruf dan angka) yang membutuhkan waktu pengerjaan lebih sedikit daripada soal tes yang lebih kompleks untuk kelas tingkat atas (misalnya pemahaman bacaan dan pengerjaan soal-soal matematika).

²⁶ Pemikiran di balik perbedaan waktu pengujian berdasarkan usia adalah bahwa murid di kelas yang lebih rendah berada dalam fase awal pembelajaran dan tidak sepenuhnya mampu membaca dan menulis sendiri, sehingga memerlukan bantuan secara individual yang lebih intensif untuk memahami instruksi pengerjaan tes. Untuk murid di kelas yang lebih rendah, administrator membantu dengan membacakan instruksi atas masing-masing soal kepada murid dan menuliskan jawaban mereka pada lembar jawaban. Administrator menerima pelatihan tentang cara melakukan tes ini, misalnya bahwa administrator tidak diperkenankan memberikan petunjuk jawaban kepada murid. Sebelumnya, praktik ini dilakukan oleh Stern dan Nordstrum (2014) dan ASER (2014). Murid kelas tiga ke atas biasanya sudah terbiasa membaca dan menulis sendiri sehingga tes disampaikan dengan cara biasa yang mengharuskan murid untuk membaca instruksi dan menulis jawabannya sendiri. Untuk menghindari kecurangan dalam pengaturan kelompok tes, disusun dua versi buklet tes dengan urutan yang bervariasi atas pertanyaan-pertanyaan yang sama. Murid yang duduk bersebelahan satu sama lain diberi buklet tes dengan versi berbeda.

matematika mengacu pada standar kurikulum tingkat kelas yang satu dan dua tingkatan kelas lebih rendah. Sisanya (20 persen dari pertanyaan) mengacu pada standar kurikulum tingkat kelas yang sedang diikuti murid.

Lima kuesioner diadaptasi dari survei sebelumnya yang dilakukan di Indonesia.²⁸ Kuesioner ini mengumpulkan informasi terperinci dari kepala desa, kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua dari anak-anak murid sekolah dasar.²⁹

Kuesioner kepala desa mengumpulkan informasi tentang karakteristik populasi desa, akses terhadap sumber energi dan layanan dasar, hubungan sosial, serta tingkat keterpencilan. Kuesioner kepala sekolah mengumpulkan informasi yang komprehensif tentang kegiatan operasional sekolah, termasuk ketersediaan prasarana fisik utama, karakteristik populasi murid, proses pengajaran, dan hasil ujian kelulusan murid. Serupa dengan kuesioner kepala sekolah, kuesioner guru mengumpulkan informasi tentang latar belakang guru, tingkat pendidikan, pengalaman, kondisi kehidupan, kegiatan di dalam dan di luar sekolah, alokasi waktu guru di antara berbagai tugas yang terkait dengan tugas mengajar, gaji dan tunjangan yang mereka terima, dan motivasi serta kepuasan mereka. Kuesioner komite sekolah berfokus pada sejarah komite, informasi keuangan, kegiatan manajemen sekolah, dan kepuasan terhadap kualitas sekolah. Kuesioner orang tua mengumpulkan informasi tentang latar belakang sosial ekonomi orang tua, tingkat keterlibatan dengan sekolah, pengawasan pembelajaran di rumah, keterlibatan dalam tugas sekolah anak mereka, dan ketidakhadiran murid.

Partisipan dan Responden Studi

Studi ini mencakup 270 sekolah dasar yang berlokasi di 235 desa terpencil di 33 kecamatan. di antara sekolah-sekolah ini, 198 ada di Kalimantan Barat dan 72 di NTT. Tabel 3 menyajikan ukuran sampel dan jumlah populasi di wilayah studi. Perwakilan kepala sekolah dan komite sekolah di 270 sekolah ini diwawancarai, berikut 235 kepala desa. Sekolah sampel terdiri dari 35.543 murid. Dari 28.791 murid di kelas satu hingga lima, 92 persen berpartisipasi dalam SLA.³⁰ Survei ini juga mengumpulkan informasi tentang 5.400 orang tua murid yang mengikuti SLA yang dipilih secara

acak, atau empat orang tua dari setiap kelas (hanya untuk kelas satu hingga lima). Jika sebuah sekolah tidak memiliki tingkat kelas tertentu, empat orang tua dari tingkat kelas lainnya dipilih sebagai gantinya.

Deskripsi Desa Lokasi Studi

Desa lokasi studi memiliki populasi rata-rata 1.400 orang, jumlah tersebut setengah dari rata-rata populasi nasional (3.100 orang per desa). di antara lima kabupaten, Sintang memiliki populasi terendah (1.000) dan Landak memiliki populasi terpadat (2.000) (Tabel 4). Secara rata-rata, anak-anak usia sekolah (usia 4 hingga 20) mencakup 35 persen dari populasi di lima kabupaten. Namun ada perbedaan besar dalam populasi anak-anak usia sekolah antar kabupaten, dari 22 persen populasi di Ketapang hingga 46 persen di Manggarai Timur. Anak-anak usia sekolah dasar mencakup sekitar 40 persen dari populasi usia 4 hingga 20 tahun.

Dari perspektif etno-religius, desa lokasi studi sangat homogen dengan tingkat konflik yang rendah. Mayoritas penduduknya berasal dari kelompok agama dan etnis lokal mayoritas. Rata-rata, di 76 persen desa, lebih dari 80 persen penduduknya termasuk kelompok etnis mayoritas, dibandingkan dengan rata-rata 51 persen desa yang lebih dari 80 persen penduduknya menganut agama mayoritas, yakni Katolik. Namun ada perbedaan yang mencolok di antara kabupaten NTT, di mana Katolik dianut hampir 90 persen dari populasi, dan kabupaten Kalimantan Barat, di mana agama-agama lain tersebar lebih merata di antara penduduknya. Penganut agama Islam dan Protestan masing-masing 12-34 persen dan 15-39 persen di kelima kabupaten. Rata-rata, sekitar 11 persen desa (atau 26 desa) melaporkan pernah mengalami konflik lokal dalam setahun terakhir, dengan nol desa di Manggarai Barat hingga 16 persen desa di Landak. Alasan utama yang diberikan atas terjadinya konflik lokal ini adalah kebijakan publik, penyediaan layanan publik, dan masalah ekonomi.

Akses listrik, telekomunikasi, dan internet sangat bervariasi di seluruh desa. Mayoritas desa (90 persen) memiliki akses terhadap sumber daya listrik, tetapi sangat sedikit (29 persen) yang memperoleh daya dari jaringan listrik milik negara (PLN). Akses terhadap listrik PLN berkisar antara 15 persen di Manggarai Barat hingga 44 persen di Ketapang. Jenis bahan bakar untuk memasak yang digunakan di desa lokasi studi berbeda-beda dan masing-masing provinsi memiliki kekhasan tersendiri. Semua penduduk desa di kabupaten NTT, misalnya, menggunakan kayu bakar untuk memasak dan tidak ada yang menggunakan gas atau elpiji (LPG). di Kalimantan

²⁷ Tes bahasa Indonesia untuk kelas satu dan dua (hanya) memberikan empat pilihan jawaban untuk masing-masing 48 dan 39 persen dari pertanyaan.

²⁸ World Bank 2013a, 2015; ACDP 2014; Pradhan et al. 2014.

²⁹ Data dalam laporan ini mengacu kepada instrumen yang merupakan komponen survei kuantitatif. Selain itu, data kualitatif juga dikumpulkan di daerah percontohan, namun hal tersebut tidak dibahas dalam laporan ini.

³⁰ 10 persen murid tidak hadir pada hari pelaksanaan tes.

Tabel 4. Karakteristik Desa Lokasi Studi

	Semua Wilayah	West Kalimantan			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Karakteristik demografis						
Total populasi	1.396	1.576	2.097	999	1.328	1.328
Usia sekolah (4-20) individu	495	352	737	369	493	607
Usia sekolah (4-20) individu (% total populasi)	35,5	22,4	35,2	36,9	37,1	45,7
Usia pra sekolah dasar (4-6)	89	62	132	68	95	103
Usia sekolah dasar (7-12)	193	178	264	153	196	202
Usia sekolah dasar (7-12) (% total populasi)	13,9	11,3	12,6	15,3	14,8	15,2
Usia sekolah dasar (7-12) (% populasi usia sekolah)	39,1	50,6	35,8	41,6	39,8	33,3
Usia sekolah menengah pertama (13-15)	108	61	172	78	100	149
Usia sekolah menengah atas (16-20)	104	51	169	69	102	153
Rumah tangga/keluarga	717	828	1.061	517	662	677
Penggunaan energi dasar dan infrastruktur komunikasi (% desa dengan akses)						
Listrik PLN	29	44	32	26	15	21
Listrik non-PLN	90	92	89	88	100	86
Bahan bakar memasak: gas atau LPG	35	46	29	54	0	0
Bahan bakar memasak: kayu bakar	64	54	63	46	100	100
Telepon seluler	90	90	71	93	100	100
Internet	17	12	16	13	56	7
Penyebaran agama di antara penduduk (% populasi desa)						
Islam	16,2	34,1	12,9	11,6	10,7	1,8
Kristen - Protestan	23,6	15,2	38,8	36,7	1,1	3,5
Katolik	59,4	48,9	48,3	50,5	88,2	94,8
Budha	0,34	0,1	0,03	0,88	0	0
Hindu	0,04	0,15	0	0	0	0
Konfusius	0,01	0,02	0	0,010	0	0
Lainnya	0,38	1,46	0	0	0	0
Homogenitas dan konflik masyarakat						
Jumlah agama yang ada di desa	2.460	2.780	2.820	2.770	1.310	1.480
% desa dengan lebih dari 80% populasi menganut agama mayoritas	51	53	11	39	88	100
% desa dengan lebih dari 50% populasi menganut agama mayoritas	88	81	79	88	100	100
% desa dengan lebih dari 80% populasi etnis mayoritas	76	63	82	88	70	69
% desa dengan lebih dari 50% populasi etnis mayoritas	93	93	100	98	89	76
Terjadinya konflik lokal di desa selama setahun terakhir	11	14	16	13	0	3
Konflik terkait kebijakan/layanan publik (% konflik dalam setahun terakhir)	35	38	17	36	0	100
Konflik terkait masalah ekonomi (% konflik dalam setahun terakhir)	23	13	33	27	0	0
Konflik terkait masalah pribadi (% konflik dalam setahun terakhir)	15	25	33	0	0	0

Catatan: LPG = Elpiji/Liquefied Petroleum Gas; NTT = Nusa Tenggara Timur; PLN = Perusahaan Listrik Negara

Barat, 29 persen desa di Landak, 46 persen di Ketapang, dan 54 persen di Sintang menggunakan gas untuk memasak dan sisanya menggunakan kayu bakar bekas. Sebagian besar desa (seluruhnya di kabupaten NTT) memiliki akses terhadap jaringan telepon seluler, namun hanya 71 persen yang memiliki akses di Landak. Akses internet kurang tersebar luas di antara 7 hingga 16 persen desa yang melaporkan memiliki akses. Pengecualian yang luar biasa adalah Manggarai Barat, dengan 56 persen desa lokasi studi memiliki akses terhadap internet.

Tingkat keterpencilan desa lokasi studi bervariasi terkait akses terhadap layanan kesehatan dan jarak serta waktu perjalanan ke lembaga administrasi dan keuangan utama. di semua kabupaten, pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) dan staf layanan kesehatan dapat dicapai dalam waktu kurang dari satu jam perjalanan dari sekolah (Tabel 5). Lokasi rumah sakit lebih jauh dari sekolah, rata-rata sekitar 100 kilometer atau hampir empat jam perjalanan jauhnya. Rata-rata desa berada 149 kilometer atau hampir lima jam perjalanan dari ibukota kabupaten. Lembaga yang terdekat dengan balai desa adalah kantor kecamatan, yang berjarak rata-rata 28 kilometer atau sekitar 1,3 jam waktu perjalanan dari desa. Kantor-kantor pemerintah kabupaten tetangga sering kali berjarak lebih dekat dari sebuah desa—hampir

satu jam lebih dekat di Manggarai Barat dan 1,2 jam lebih dekat di Ketapang. Lembaga keuangan terletak lebih dekat ke desa-desa lokasi studi daripada kantor pos di semua kabupaten kecuali Sintang. Ada sedikit perbedaan antar provinsi dalam jarak dan waktu perjalanan ke bank dan Anjungan Tunai Mandiri (ATM). di kabupaten NTT, koperasi lebih dekat daripada bank, dan di Kalimantan Barat, koperasi kredit (*credit union*) lebih dekat ke desa.

Jenis keterpencilan yang berbeda ditemukan di kabupaten Kalimantan Barat dibandingkan dengan kabupaten NTT. Jarak sedikit lebih panjang di kabupaten Kalimantan Barat daripada di kabupaten NTT, antara 14 kilometer di Manggarai Barat hingga 38 kilometer di Sintang. Lokasi kabupaten Kalimantan Barat lebih jauh dari lembaga administrasi dan keuangan utama daripada kabupaten NTT (Tabel 6, dalam Lampiran A), namun waktu perjalanan di kabupaten Kalimantan Barat lebih pendek atau serupa dibandingkan dengan kabupaten NTT. Misalnya, dibutuhkan waktu yang hampir sama untuk mencapai kantor kecamatan di Sintang (38 kilometer) dengan di Manggarai Barat (14 kilometer). Hal ini mencerminkan perbedaan kualitas prasarana jalan dan topografi.³¹

Tabel 5. Jarak dan Waktu Perjalanan dari Sekolah ke Beberapa Lembaga Utama

		Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
			Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Dinas pendidikan daerah	Jarak (km)	124,8	205,3	87	132,1	77,1	78,1
	Waktu perjalanan (jam)	4,8	6,7	3,2	5,0	4,4	3,4
UPTD di kecamatan	Jarak (km)	41,6	37,0	48,7	56,0	20	27,4
	Waktu perjalanan (jam)	2,1	1,5	2,3	2,5	1,7	2,4
Rumah sakit terdekat	Jarak (km)	102,6	170,5	65,5	123,4	36,0	61,8
	Waktu perjalanan (jam)	3,9	5,2	2,7	4,7	2,6	2,9
Pusat kesehatan masyarakat terdekat	Jarak (km)	10,9	8,6	13,1	16,3	4,8	4,4
	Waktu perjalanan (jam)	0,7	0,5	0,8	0,8	0,6	0,5
Klinik/staf kesehatan terdekat	Jarak (km)	5,5	4,8	7,3	2,3	4,2	13,9
	Waktu perjalanan (jam)	0,4	0,3	0,5	0,3	0,7	0,8
Bank terdekat	Jarak (km)	52	49,9	44,5	82,6	24,4	21,2
	Waktu perjalanan (jam)	2,3	1,8	2,2	3,1	1,9	1,3
Pasar terdekat	Jarak (km)	35,6	32,4	39,2	54,2	12,8	14,6
	Waktu perjalanan (jam)	1,7	1,3	2	2,2	1,3	1,1

Catatan: km = kilometer; UPTD = Unit Pelaksana Teknis Daerah (unit pelaksana teknis kabupaten di tingkat kecamatan).

³¹ Beberapa kantor kecamatan di Kalimantan Barat dihubungkan oleh Jalan Tol Trans-Kalimantan, sedangkan hanya beberapa kantor kecamatan di NTT yang dihubungkan oleh jalan-jalan besar beraspal. Demikian pula kecamatan-kecamatan di Kalimantan Barat memiliki akses yang lebih baik terhadap prasarana telekomunikasi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan di NTT. Namun berdasarkan anekdot dari tim pelaksana dan

mempertimbangkan jarak dan waktu tempuh dari kantor kecamatan ke desa, desa-desa lokasi studi di Kalimantan Barat lebih sulit dijangkau dibandingkan dengan desa-desa di NTT. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh banyaknya sungai yang harus dilalui dengan perahu di sepanjang jalan antara kantor kecamatan dan desa di Kalimantan Barat.

Dari 235 desa yang disurvei, hanya 2 persen kepala desa adalah perempuan, biasanya menikah dengan laki-laki berpendidikan sekolah menengah. Sebagian besar desa (94 persen) dipimpin oleh kepala desa atau pelaksana tugas (Plt) kepala desa (tabel 7). Sebagian besar desa yang tidak memiliki kepala desa (10 dari 13) berlokasi di Ketapang. Mayoritas responden perangkat desa (177 orang, atau 75 persen responden) adalah kepala desa atau Plt kepala desa. Kebanyakan kepala desa adalah lelaki yang sudah menikah, berusia pertengahan empat puluhan, dengan pendidikan sekolah menengah

(tingkat pendidikan tertinggi yang dicapai) yang tinggal di desa. Hanya ada tiga kepala desa perempuan, satu di Ketapang dan dua di Landak. di Manggarai Barat, 15 persen kepala desa tinggal di desa lain di kecamatan yang sama. Responden yang bukan kepala desa memegang posisi sekretaris desa (36 desa) atau kepala urusan desa (22 desa). Kebanyakan dari mereka juga menikah dengan laki-laki berpendidikan sekolah menengah dan tinggal di desa, namun mereka sedikit lebih muda dari kepala desa, dengan usia rata-rata 39 tahun.

Tabel 7. Karakteristik Kepemimpinan Desa

	Semua Wilayah	West Kalimantan			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
# Desa	235	59	38	82	27	29
Jenis responden dan karakteristik						
Kepala desa atau Plt kepala desa (% responden)	75	47	76	79	96	100
Kepala desa atau Plt kepala desa (#)	177	28	29	65	26	29
Lainnya: sekretaris (% responden)	15	24	18	17	4	0
Lainnya: sekretaris (#)	36	14	7	14	1	0
Lainnya: kepala urusan (% responden)	9	29	5	4	0	0
Lainnya: kepala urusan (#)	22	17	2	3	0	0
Masa kerja di kantor (tahun)	3	3	3	3	3	5
Desa tanpa kepala desa (% responden)	6	17	5	0	4	0
Desa tanpa kepala desa (#)	13	10	2	0	1	0
Kepala desa - Demografi dan pendidikan						
Usia (tahun)	44	45	42	41	47	47
% Perempuan	2	4	7	0	0	0
% menikah	97	100	97	97	88	100
% pendidikan dasar	0.100	0	3	0	0	0
% pendidikan menengah pertama	14	21	14	12	23	0
% pendidikan menengah atas	68	61	48	77	58	83
% pendidikan tinggi	18	18	34	11	19	17
Responden lain - Demografi dan pendidikan						
Usia (tahun)	39	37	49	38	41	-
% Perempuan	5	10	0	0	0	-
% menikah	98	100	100	94	100	-
% pendidikan dasar	3	3	11	0	0	-
% pendidikan menengah pertama	5	6	0	6	0	-
% pendidikan menengah atas	83	87	78	76	100	-
% pendidikan tinggi	9	3	11	18	0	-
Kepala desa - Lokasi tempat tinggal (% kepala desa)						
Desa	92	86	86	98	85	97
Desa lain di kecamatan	6	11	7	2	15	3
Kecamatan lain di kabupaten	2	4	7	0	0	0
Responden lain - Lokasi tempat tinggal (% responden lain)						
Desa	95	94	100	94	100	-
Desa lain di kecamatan	3	3	0	6	0	-
Kecamatan lain di kabupaten	2	3	0	0	0	-

03

Konteks Sekolah

Karakteristik Sekolah

Ketersediaan Sekolah

Sekolah dasar negeri merupakan sekolah yang paling banyak tersedia di lima kabupaten, dengan hampir seperempatnya menyelenggarakan pembelajaran kelas rangkap. Pelaksanaan program pembangunan sekolah dasar terbesar di dunia terjadi di Indonesia, antara tahun 1973 dan 1978 (Duflo 2001). Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 8, hampir semua desa Kalimantan Barat memiliki setidaknya satu sekolah dasar negeri. Delapan puluh lima persen desa di NTT memiliki sekolah dasar negeri. Institusi pendidikan lain lebih tersedia dan beragam di seluruh kabupaten lokasi studi. Secara rata-rata, 42 persen desa memiliki sedikitnya satu sarana pendidikan anak usia dini, dengan angka terendah di Manggarai Barat (26 persen) dan tertinggi di Manggarai Timur (62 persen). Taman kanak-kanak lebih jarang ada di desa lokasi studi—tidak ada desa di Manggarai Timur yang memiliki taman kanak-kanak, sementara 25 persen desa di Ketapang memiliki setidaknya satu taman kanak-kanak. Secara rata-rata, 46 persen desa memiliki sekolah menengah pertama, dengan variasi lintas kabupaten, antara 33 persen di Manggarai Barat hingga 72 persen di Manggarai Timur. Secara umum, sekolah menengah atas jarang tersedia, hanya 6 persen dari 235 desa memiliki sedikitnya satu sekolah menengah atas. Wilayah studi mencakup 22 sekolah dasar swasta, 20 di antaranya berada di NTT (Tabel 55, dalam Lampiran A). Sekitar 2 persen desa memiliki madrasah tingkat sekolah dasar. Hampir seperempat sekolah, mulai dari 18 persen di kabupaten NTT hingga 34 persen di Ketapang, menyelenggarakan pembelajaran kelas rangkap (Tabel 9). Pembelajaran kelas rangkap ini didefinisikan sebagai kelas di mana seorang guru mengajar murid dari dua atau lebih tingkat kelas pada saat yang sama (Little 2006).

Penyebaran Murid

Jumlah murid per sekolah sedikit lebih rendah dari rata-rata nasional. Tabel 9 menyajikan jumlah murid di wilayah studi dan penyebarannya di kelas-kelas di sekolah. Rata-rata ada enam kelas per sekolah (satu kelas per angkatan) di sekolah sampel.³² Sekolah-sekolah ini memiliki rasio murid-guru 16 berbanding 1, hanya sedikit di bawah rata-rata nasional 17 berbanding 1. Jumlah rata-rata murid per sekolah berkisar antara 111 di Landak hingga 157 di Manggarai Timur, jauh di bawah rata-rata nasional, yaitu 191³³. Namun, 78 persen sekolah dasar di Indonesia memiliki kurang dari 250 murid, dan hampir 50 persen memiliki kurang dari 150 murid.³⁴ Secara keseluruhan, ada sekitar 20 murid per angkatan belajar di wilayah studi (19-20 di Kalimantan Barat dan 21-22 di NTT).

³² Suatu kelas berjalan hingga satu tahun akademik dan mengacu kepada tingkat tertentu dalam sistem sekolah, ada kurikulum khusus yang harus diajarkan kepada murid pada tingkat ini, dan ketika mereka belum mencapai tingkat yang disyaratkan, murid dapat diminta untuk mengulang kelas. Kelompok belajar kurang lebih mengacu kepada kelompok murid yang secara fisik terkumpul di ruang kelas tertentu dan menerima pelajaran secara bersamaan.

³³ World Bank 2018b.

³⁴ World Bank 2008.

Tabel 8. Ketersediaan Fasilitas Pendidikan di Desa

		Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
			Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
PAUD	Ketersediaan (% desa)	42	49	42	34	26	62
	Jumlah	1	1	2	2	1	1
Taman kanak-kanak (TK)	Ketersediaan (% desa)	11	25	3	10	7	0
	Jumlah	1	1	5	1	2	
Sekolah dasar negeri	Ketersediaan (% desa)	96	100	100	99	85	86
	Jumlah	2	2	3	1	2	1
Sekolah dasar swasta	Ketersediaan (% desa)	16	17	3	0,1	44	48
	Jumlah	1	2	1	1	1	1
Sekolah dasar Islam	Ketersediaan (% desa)	2	3	3	0	7	0
	Jumlah	3	2	8		1	
Sekolah menengah pertama	Ketersediaan (% desa)	46	47	53	37	33	72
	Jumlah	1	1	1	1	1	1
Sekolah menengah atas	Availability (% villages)	6	7	5	2	4	17
	Number	2	1	2	6	1	1

Catatan: Ketersediaan (% desa) mengacu kepada jumlah desa lokasi studi dengan setidaknya satu jenis sekolah; angka tergantung pada ketersediaan di desa. PAUD = Pendidikan Anak Usia Dini program awal pendidikan anak; TK = Tunjangan Khusus.

Dari 35.543 murid yang terdaftar di sekolah studi, ada kesenjangan gender yang lebih besar di tingkat kelas bawah. Secara total, sekitar 47 persen murid adalah perempuan (Tabel 10, dalam Lampiran A). Dari kelas satu hingga lima, kesenjangan terbesar antara jumlah murid laki-laki dan perempuan ditemukan di Manggarai Timur (murid laki-laki lebih banyak sekitar dua atau tiga orang). Kabupaten Kalimantan Barat cenderung memiliki kelompok belajar dengan murid yang sedikit lebih banyak di tingkat kelas bawah daripada di kelas atas, sedangkan di kabupaten NTT jumlah murid sedikit lebih banyak di kelas atas, antara satu hingga lima murid lebih banyak per kelas. Kabupaten NTT, khususnya Manggarai Timur, rata-rata memiliki lebih banyak murid daripada kabupaten studi lainnya, yaitu 26 murid per kelas.

Fasilitas Sekolah

Antara 41 persen hingga 66 persen sekolah memiliki air bersih; hanya 33 persen yang memiliki akses terhadap listrik selama jam sekolah; dan 45 persen memiliki akses terhadap sinyal ponsel. Karakteristik umum sekolah terpencil di Indonesia adalah kurangnya sarana fisik yang berkualitas untuk mendukung proses belajar mengajar. Toyamah et al. (2010) dan ACDP (2014) menemukan bahwa ada korelasi langsung antara ketersediaan sarana sekolah dan ketidakhadiran guru di kelas. Sejalan dengan itu, sekolah sampel kurang memiliki akses universal terhadap sarana utama sekolah. Tabel 11 (dalam Lampiran A) menunjukkan bahwa sekolah sampel cenderung tidak setara dalam hal ketersediaan

sarana fisik. Untuk sarana pendukung kegiatan belajar mengajar, ada perbedaan signifikan dalam ketersediaan perpustakaan sekolah, mulai dari 43 persen di Landak hingga 91 persen di Manggarai Timur. Sekitar 35 hingga 40 persen sekolah di semua kabupaten memiliki jumlah buku pelajaran yang cukup.

Kabupaten-kabupaten Kalimantan Barat lebih memiliki sarana bangunan dan sarana lain, terutama toilet, dibandingkan dengan kabupaten NTT. Sebagai contoh, 96 persen sekolah di Landak memiliki ruang guru, dibandingkan dengan 50 persen sekolah di Manggarai Timur. Demikian pula, 63 persen sekolah di Sintang memiliki ruang kepala sekolah, dibandingkan dengan 26 persen sekolah di Manggarai Barat. Secara keseluruhan, sekitar 90 persen sekolah memiliki sarana toilet, dengan persentase yang lebih rendah di NTT (79-85 persen). Fasilitas toilet ini termasuk ketersediaan toilet di sekolah terlepas dari apakah toilet tersebut tersedia untuk guru atau murid; tampaknya lebih banyak tersedia toilet untuk guru dibandingkan untuk murid. Selain itu, murid perempuan di Kalimantan Barat lebih memiliki akses terhadap toilet khusus perempuan daripada murid laki-laki. di Kalimantan Barat, rata-rata 70 persen sekolah sampel memiliki toilet untuk guru, hampir 60 persen memiliki toilet untuk murid perempuan, dan 50 persen memiliki toilet untuk murid laki-laki. Sementara di NTT, rata-rata 82 persen sekolah sampel memiliki toilet untuk guru, 30 persen memiliki toilet untuk murid perempuan, dan 21 persen memiliki toilet untuk murid laki-laki.

Tabel 9. Karakteristik Populasi Murid di Sekolah

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Ukuran sekolah dan distribusi kelompok belajar berdasarkan kelas						
Rata-rata # murid per sekolah	132	125	111	130	150	157
Rasio murid-guru	16	14	16	16	15	16
Total # kelompok belajar	1,753	384	306	563	256	244
kelompok belajar kelas # 1	298	65	51	100	41	41
kelompok belajar kelas # 2	299	63	52	97	43	44
kelompok belajar kelas # 3	298	64	51	95	47	41
kelompok belajar kelas # 4	290	65	51	91	44	39
kelompok belajar kelas # 5	288	63	51	91	42	41
kelompok belajar kelas # 6	280	64	50	89	39	38
Rata-rata # kelompok belajar per sekolah	6.5	6.5	6.0	6.4	6.7	7.2
Rata-rata ukuran kelompok belajar	20	19	19	20	22	21
Sekolah dengan kelompok belajar multi-kelas (%)	24	34	24	22	18	18
Populasi murid						
# murid	35.543	7.350	5.682	11.449	5.709	5.353
# murid laki-laki	18.706	3.847	3.048	5.968	2.995	2.848
# murid perempuan	16.837	3.503	2.634	5.481	2.714	2.505
Hasil kelulusan murid, 2015/16						
# murid di kelas 6	21	20	20	21	25	24
# murid laki-laki di kelas 6	10	10	10	10	12	11
# murid perempuan di kelas 6	11	10	10	11	13	13
# lulusan	21	20	20	21	25	24
# lulusan laki-laki	10	10	10	10	12	11
# lulusan perempuan	11	10	10	11	13	13
Rata-rata nilai UN	149	113,7	112,3	160,7	187,2	194,7
Nilai dalam Bahasa Indonesia	60,2	56,3	50,1	59,7	66,4	77,3
Nilai dalam matematika	54,8	50,2	45,2	52,9	64,7	72
Nilai dalam sains	61,1	59,7	50,5	62,0	64,0	74,1

Catatan: UN = United Nations.

Anggaran Sekolah

Semua sekolah menerima dana operasional dari pemerintah pusat. Jumlah dana yang diterima dari pemerintah pusat melalui Bantuan Operasional Sekolah untuk tahun akademik 2015/16 bervariasi antara Rp89 juta di Landak dan Rp 131 juta di Manggarai Timur (Tabel 12).^{35,36} Pemerintah daerah juga berkontribusi untuk dana operasional sekolah,³⁷ kecuali sekolah-sekolah di Landak, yang tidak menerima dana dari pemerintah daerah mana pun. di empat kabupaten studi lainnya

yang melaporkan telah menerima dukungan keuangan, pemerintah kabupaten merupakan sumber dana operasional sekolah kedua terpenting, meskipun ada variasi yang signifikan di seluruh kabupaten terkait jumlah dana yang diterima oleh sekolah. di Manggarai Barat dan Manggarai Timur, masing-masing 16 persen dan 12 persen sekolah, menerima Rp33 juta dan Rp23 juta dari pemerintah kabupaten. di Ketapang dan Sintang, rata-rata sekitar 90 persen sekolah menerima Rp10 juta dari pemerintah kabupaten mereka. Al-Samarrai dan Cerdan-Infantes (2013) menemukan ada perbedaan antara jumlah sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten ke sekolah untuk gaji guru dengan sumber daya yang dialokasikan untuk dukungan pendidikan langsung. Kabupaten memang cenderung mengalokasikan sebagian besar anggaran mereka untuk membayar gaji--khususnya untuk guru kontrak--

³⁵ Nilai tukar adalah sekitar Rp14.000 per USD1 pada tanggal publikasi.

³⁶ Hal ini sejalan dengan temuan dari Al-Samarrai dan Cerdan-Infantes (2013): sekitar setengah dari sekolah negeri di tingkat sekolah dasar dan menengah pertama secara nasional dilaporkan tidak menerima dukungan keuangan tambahan dari pemerintah kabupaten pada tahun 2010.

³⁷ Ini merupakan kumpulan dana dari dana pendukung kabupaten tertentu hingga dana nasional Bantuan Operasional Sekolah.

sehingga menyisakan sedikit ketersediaan sumber daya untuk dukungan langsung ke sekolah. Dana pemerintah provinsi lebih sedikit dan tidak didistribusikan secara homogen di seluruh kabupaten. di NTT, hanya satu sekolah yang menerima dana tambahan dari provinsi, yakni sebesar Rp18 juta untuk Manggarai Barat. di Kalimantan Barat, enam sekolah di Ketapang dan tiga sekolah di Sintang melaporkan telah menerima masing-masing sekitar Rp5 juta dan Rp13 juta per kabupaten dari pemerintah provinsi.

Dana pemerintah mencakup antara 94,0 persen dan 99,5 persen dari dana operasional sekolah.³⁸

Sebagian besar dari sisanya berasal dari kontribusi orang tua (rata-rata, 1,33 persen), yang sangat bervariasi dalam jenis dan jumlahnya (Tabel 13). Secara keseluruhan, biaya yang paling sering dibebankan kepada orang tua adalah untuk seragam sekolah, perayaan, dan ujian.

Bahasa dan Kurikulum yang Digunakan di Sekolah

Bahasa Indonesia adalah bahasa utama yang digunakan di sebagian besar sekolah di wilayah studi. Lebih dari 90 persen sekolah di Kalimantan Barat dan 70 persen di NTT menggunakan bahasa Indonesia (Tabel 14, dalam Lampiran A). Sisanya, di NTT, menggunakan bahasa Manggarai sebagai bahasa pengajaran utama. di Kalimantan Barat, bahasa Melayu (Ketapang) dan Dayak (Sintang dan Landak) dilaporkan

sebagai bahasa pengantar utama di 3 persen hingga 7 persen sekolah dan oleh 2 persen hingga 9 persen guru.

Studi ini menemukan beberapa diskrepansi dalam penggunaan kurikulum nasional di kabupaten-kabupaten yang disurvei.

Sebagian besar guru (74 persen) mengajar setidaknya empat mata pelajaran, dan 14 persen mengajar satu mata pelajaran. Untuk kurikulum, 99 persen kepala sekolah melaporkan bahwa kurikulum 2004 digunakan di sekolah mereka, sedangkan 94 persen guru melaporkan menggunakan kurikulum 2006. Hanya 1 persen kepala sekolah dan guru melaporkan penggunaan kurikulum 2013. Pengumpulan data dalam studi ini tidak mengajukan pertanyaan tambahan yang dapat menjelaskan diskrepansi tersebut, sehingga hal ini dapat menjadi bagian penting untuk ditinjau lebih lanjut dalam studi terkait di masa yang akan datang.

Waktu Belajar dan Mengajar pada Tahun Akademik 2015/16

Sekitar 25 persen sekolah sampel melaporkan bahwa kegiatan belajar mengajar mengalami interupsi setidaknya satu kali selama tahun akademik. Tabel 15 (dalam Lampiran A) menunjukkan bahwa kegiatan belajar mengajar di sekolah sampel berlangsung selama rata-rata 226 hari belajar efektif selama tahun akademik 2015/16, dengan jumlah hari terendah adalah 207 hari di Sintang dan yang tertinggi

Tabel 12. Sumber Pendanaan untuk Sekolah, Tahun Akademik 2015/16

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Barat	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Sumber dana bantuan operasional sekolah						
Pemerintah pusat (% sekolah)	100	100	100	100	100	100
Jumlah dari pemerintah pusat (Rp)	108.695.824	105.881.608	88.737.600	108.972.376	119.043.496	130.656.944
Pemerintah provinsi (% sekolah)	4	5	0	7	3	0
Jumlah dari pemerintah provinsi (Rp)	10.838.640	4.733.334		12.697.733	18.000.000	
Pemerintah kabupaten (% sekolah)	53	92	0	89	16	12
Jumlah dari pemerintah kabupaten (Rp)	12.110.747	10.315.019		11.171.484	33.033.334	23.050.000
Pemerintah pusat (% sekolah)	1	3	0	0	0	6
Jumlah dari pemerintah desa (Rp)	2.400.000	3.000.000				1.800.000
Distribusi dana sekolah yang dilaporkan berdasarkan sumber (%)						
Pemerintah	97,7	97,3	99,5	98,3	97,6	94,3
Biaya dibayar oleh orang tua	1,3	0,7	0,4	1	1,1	5
Kontribusi masyarakat	0,1	0,2	0	0	0,3	0,4
Sumber lain	0,8	2,0	0,1	0,6	1,0	0,4

³⁸ "Dana pemerintah" di sini mengacu pada sumber pendanaan nasional, provinsi, kabupaten, dan desa.

Tabel 13. Beban Biaya Orang Tua, Tahun Akademik 2015/16

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Biaya dibebankan kepada orang tua						
Seragam						
Jumlah sekolah	53	23	2	19	6	3
Jumlah (Rp)	1.146.943	550.870	90.000	1.773.053	88.333	4.573.334
Pembayaran uang sekolah reguler/SPP/komite						
Jumlah sekolah	40	5	1	6	13	15
Jumlah (Rp)	4.534.075	27.000	25.000	2.459.500	3.001.846	8.494.800
Perayaan						
Jumlah sekolah	34	3	0	5	12	14
Jumlah (Rp)	218.176	19.333		280.000	249.000	212.286
Ujian						
Jumlah sekolah	24	8	2	7	6	1
Jumlah (Rp)	454.667	123.125	100.000	490.000	416.167	3.800.000
Lembar kerja murid						
Jumlah sekolah	18	15	1	2	0	0
Jumlah (Rp)	673.222	452.333	8.000	2.662.500		
Biaya pendaftaran/pendaftaran awal						
Jumlah sekolah	11	4	0	0	3	4
Jumlah (Rp)	340.455	652.500			108.333	202.500
Dana kegiatan (ekstrakurikuler)						
Jumlah sekolah	7	2	0	0	4	1
Jumlah (Rp)	64.429	22.500			23.000	314.000
Dana pembangunan sarana/prasarana						
Jumlah sekolah	8	3	1	1	0	3
Jumlah (Rp)	247.375	74.000	50.000	50.000		552.333
Lainnya						
Jumlah sekolah	26	6	1	13	4	2
Jumlah (Rp)	337.423	94.500	2.000	544.846	117.250	326.000

Catatan: SPP = Sumbangan Pembinaan Pendidikan.

244 hari di Manggarai Timur. Jumlah interupsi bervariasi cukup signifikan di seluruh kabupaten. Sekolah-sekolah di Manggarai Timur melaporkan bahwa mereka tidak mengalami interupsi selama tahun akademik 2015/16. Sebaliknya, 34 persen sekolah di Sintang melaporkan mengalami beberapa interupsi.

Waktu belajar mengajar di sekolah sampel berkisar antara 26 jam hingga 33 jam per minggu. Para guru di sekolah sampel menghabiskan rata-rata 26 jam setiap minggu untuk mengajar murid kelas satu. Jumlah jam dalam satu minggu meningkat secara bertahap di setiap kelas, mencapai 31 jam di kelas enam. Waktu belajar mengajar di sekolah-sekolah di NTT sedikit lebih banyak daripada di Kalimantan Barat, mulai dari 27 jam di kelas satu hingga 33 jam di kelas enam.

Pengawasan dan Rapat Sekolah pada Tahun Akademik 2015/16

Rata-rata sekitar 90 persen kepala sekolah melaporkan telah menerima kunjungan pengawasan dari pengawas sekolah atau pejabat lainnya selama tahun akademik 2015/16. Dua pertiga dari guru melaporkan mendapatkan pengawasan dari pejabat pendidikan lain saat mengajar sepanjang tahun (tabel 16).³⁹ Hampir semua kepala sekolah (antara 91 persen hingga 100 persen, tergantung masing-masing kabupaten) melaporkan telah mengadakan rapat internal rutin antara kepala sekolah dan guru (sekitar enam kali selama tahun akademik 2015/16). Ini menyiratkan bahwa rapat internal antara kepala sekolah dan guru dilaksanakan sekitar dua bulan sekali.⁴⁰ Para guru melaporkan frekuensi yang sedikit lebih rendah tentang rapat internal serupa.

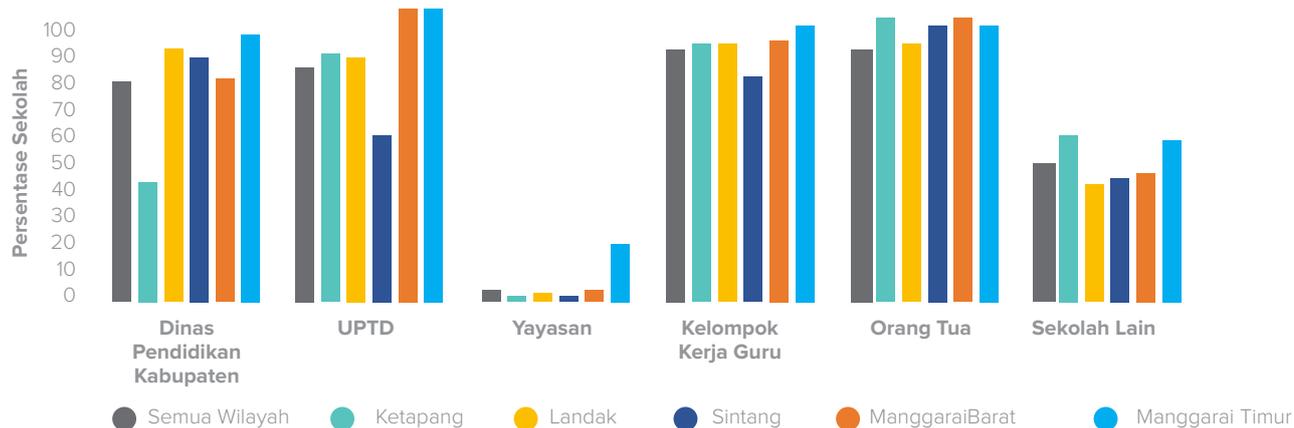
Kepala sekolah atau staf lain juga terlibat dalam beberapa rapat dengan pemangku kepentingan eksternal selama tahun akademik 2015/16. di sebagian besar kabupaten, sekitar 90 persen sekolah mengadakan rapat antara orang tua dan kelompok kerja guru selama tahun tersebut (Gambar 1). Rapat dengan otoritas pendidikan dan unit pelaksana teknis pendidikan kabupaten dan kecamatan juga biasa dilakukan, dengan sekitar 75 dan 80 persen sekolah, masing-masing melaporkan telah mengadakan rapat serupa. Gambar 2 menunjukkan topik yang dibahas pada saat rapat, seperti yang dilaporkan oleh para guru. dalam diskusi ini, proses belajar murid adalah masalah yang paling sering dibahas, diikuti oleh kurikulum, nilai murid, dan kualitas pengajaran.

Guru dan Kepala Sekolah

Karakteristik Kepala Sekolah dan Guru di Sekolah

Hampir semua kepala sekolah, memiliki status pegawai negeri sipil (PNS), namun hanya 40 persen guru yang berstatus PNS. Hanya dua kepala sekolah dalam survei sampel yang bukan pegawai negeri sipil. Sampel penelitian terdiri dari 245 kepala sekolah dan 14 PIt kepala sekolah di 270 sekolah dasar yang disurvei. Untuk 11 sekolah dasar lainnya, responden kuesioner kepala sekolah adalah guru atau staf sekolah lainnya, yang menjawab kuesioner mewakili kepala sekolah atau PIt kepala sekolah yang tidak hadir. Lebih dari 90 persen sekolah adalah sekolah negeri, dengan tiga jenis status guru: guru tetap, guru kontrak, dan guru honorer yang dikontrak oleh pihak sekolah. Guru tetap adalah

Gambar 1. Pertemuan Sekolah dengan Pemangku Kepentingan Eksternal, 2015/16



Tabel 16. Pengawasan dan Rapat Sekolah Tahun Akademik 2015/16

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Pengawasan sekolah dan guru						
Kunjungan dari pengawas/pejabat/yayasan	88	80	80	90	100	97
Pengawasan guru selama mengajar	67	71	62	64	67	73
Rapat internal antara kepala sekolah dan guru						
Laporan kepala sekolah	95	97	94	91	100	100
Rapat internal # rata-rata (kepala sekolah)	6	5	5	6	8	6
Laporan guru	0,88	0,88	0,84	0,88	0,88	0,93
Rapat internal # rata-rata (guru)	5	5	4	4	7	6
Keterlibatan guru dalam menyiapkan program sekolah						
Sepenuhnya	58	60	32	48	71	88
Sebagian	22	27	24	28	14	9

³⁹ Seorang guru dapat diawasi oleh guru lain, kepala sekolah, pengawas, atau orang lainnya yang bekerja untuk institusi pendidikan pemerintah.

⁴⁰ Tahun sekolah di sekolah negeri Indonesia berlangsung dari pertengahan Juli hingga pertengahan Juni.

pegawai negeri sipil dengan masa jabatan tetap (PNS) yang dipekerjakan oleh pemerintah pusat, sementara guru kontrak dipekerjakan oleh pemerintah kabupaten atau provinsi berdasarkan kontrak tahunan. Sementara itu, sekolah mempekerjakan guru honorer dengan status kepegawaian tidak tetap. Sekolah studi memiliki 2.301 guru, sekitar 83 persen di antaranya disurvei menggunakan kuesioner guru.⁴¹ di Ketapang, hanya sekitar sepertiga guru adalah pegawai negeri sipil. Secara keseluruhan, jumlah pegawai negeri sipil di sekolah sampel jauh lebih rendah daripada yang biasanya ditemukan dalam studi lain di sekolah-sekolah Indonesia. Chen (2011) menemukan bahwa rata-rata 70 persen guru adalah PNS dari 400 sekolah dasar negeri sampel yang berlokasi di 54 kabupaten di seluruh negeri, sedangkan Bank Dunia (2008) melaporkan bahwa sekitar 52 persen guru di sekolah dasar di daerah terpencil adalah PNS.

Jumlah guru non-PNS, guru kontrak, dan guru honorer lebih banyak dibandingkan dengan guru PNS—masing-masing 60 persen dan 40 persen dari seluruh sampel. di antara 1.162 guru non-PNS, 814 orang atau sekitar 42 persen dari semua guru sampel, adalah guru honorer; 302 (16 persen) adalah guru kontrak; dan 46 guru sisanya (2 persen) memiliki pekerjaan lain, seperti guru sekolah komunitas atau guru paruh waktu. Penyebaran guru kontrak dan honorer sangat bervariasi antar kabupaten, tetapi guru honorer lebih umum daripada guru kontrak di sekolah sampel, kecuali di Ketapang. Guru honorer dipekerjakan oleh sekolah dan mencakup sekitar 27 persen dari guru sekolah dasar negeri, sedangkan guru kontrak dipekerjakan dengan kontrak tetap dalam penggajian pemerintah.⁴² Menurut Bank Dunia (2013b), jumlah guru sekolah dasar non-PNS meningkat dari 25 persen menjadi 35 persen di seluruh Indonesia

antara tahun 2006 dan 2010. Pada tahun 2010, hampir setengah dari sekolah di Indonesia memiliki antara 20 persen dan 40 persen guru non-PNS dan seperempat dari sekolah memiliki lebih dari 40 persen guru non-PNS.⁴³

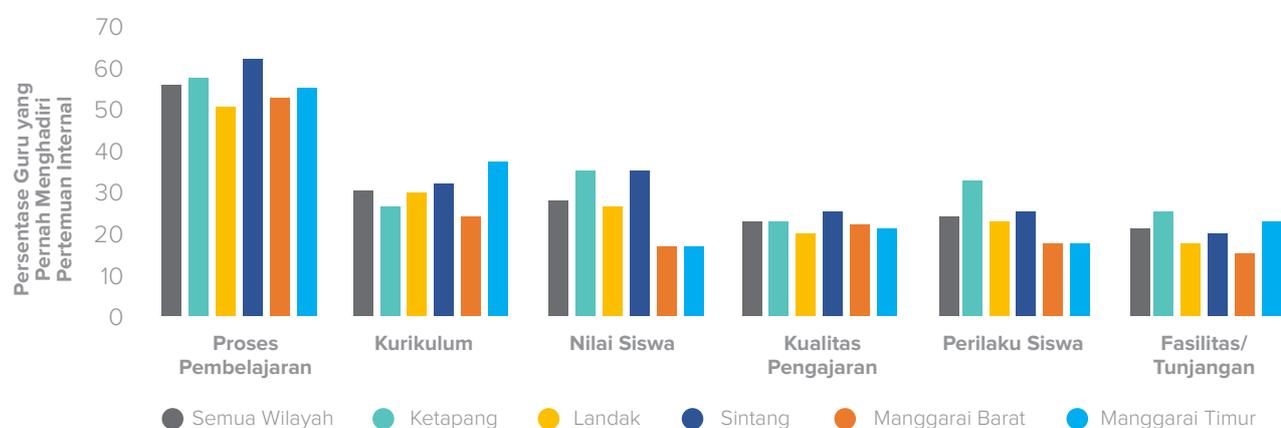
Sebagian besar guru PNS adalah laki-laki (60 persen) dan berusia sekitar 44 tahun, sedangkan kebanyakan guru non-PNS adalah perempuan (60 persen) dan berusia sekitar 30 tahun. Ada

perbedaan yang jelas antara karakteristik demografis guru PNS dan non-PNS. Bank Dunia (2008) menemukan bahwa guru perempuan mencakup 55 persen dari guru sekolah dasar di Indonesia. Sekitar 95 persen guru PNS menikah, dibandingkan dengan 76 persen guru non-PNS. Selain itu, 95 persen guru PNS adalah orang tua dibandingkan dengan 71 persen guru non-PNS. di antara mereka yang merupakan orang tua, guru PNS rata-rata memiliki tiga anak, sedangkan guru non-PNS rata-rata memiliki satu anak. Hanya 3 persen guru PNS dan 2 persen kepala sekolah adalah lajang, sementara untuk guru non-PNS, 22 persennya berstatus lajang. Seperti yang ditunjukkan pada Tabel 17, tipikal kepala sekolah di sekolah sampel adalah laki-laki yang sudah menikah, mendekati usia 50, dengan tiga anak.

Hanya 50 persen lebih sedikit kepala sekolah dan guru di sekolah studi yang bergelar sarjana. UU

Guru Tahun 2005 mengharuskan semua guru memiliki gelar S1, namun, undang-undang tersebut belum sepenuhnya diterapkan di sekolah sampel. Tingkat pencapaian pendidikan kepala sekolah dan guru disajikan pada gambar 3. Data dari sensus guru menunjukkan bahwa hanya 14 persen guru sekolah dasar di daerah terpencil yang memiliki gelar sarjana pada tahun 2010 dibandingkan dengan 27 persen dari semua guru sekolah

Gambar 2. Topik Bahasan pada Pertemuan Internal Sekolah



⁴¹ Sebanyak 17 persen guru tidak hadir di sekolah pada hari pelaksanaan survei karena mereka tidak dijadwalkan untuk mengajar pada hari itu atau dijadwalkan namun mereka absen (lihat Bagian 5).

⁴² Suharti 2013.

⁴³ World Bank 2013b

Tabel 17. Demografi Kepala Sekolah dan Guru

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Status responden (#)						
Sekolah	270	59	51	88	38	34
Kepala sekolah	245	55	38	82	38	32
Plt kepala sekolah	14	2	10	1	0	1
Responden mewakili kepala sekolah	11	2	3	5	0	1
Guru PNS	755	140	133	240	137	105
Guru non-PNS	1162	280	167	345	195	175
Guru kontrak	302	138	24	58	15	67
Guru honorer	814	104	140	285	177	108
Status kepegawaian lainnya	46	38	3	2	3	0
Karakteristik demografi kepala sekolah						
Usia (tahun)	48	47	49	47	51	51
Jenis kelamin: laki-laki (%)	84	81	96	73	100	79
Status perkawinan: menikah (%)	97	97	96	98	97	94
Status perkawinan lajang (%)	2	3	4	1	3	0
Status perkawinan: lainnya (%)	1	0	0	1	0	6
Punya anak (%)	98	98	96	99	95	100
Rata-rata # anak	3	3	3	3	5	4
Karakteristik demografi guru PNS						
Usia (tahun)	44	43	44	45	45	45
Jenis kelamin: laki-laki (%)	60	57	58	61	61	65
Status perkawinan: menikah (%)	95	97	95	94	96	95
Status perkawinan lajang (%)	3	2	3	3	1	3
Status perkawinan: lainnya (%)	2	1	2	3	3	2
Punya anak (%)	95	95	93	95	96	96
Rata-rata # anak	3	2	3	3	4	3
Karakteristik demografi guru non-PNS						
Usia (tahun)	30	30	32	31	30	30
Jenis kelamin: laki-laki (%)	40	36	45	39	36	45
Status perkawinan: menikah (%)	76	78	74	78	74	74
Status perkawinan lajang (%)	22	21	24	18	24	25
Status perkawinan: lainnya (%)	2	1	2	4	2	1
Punya anak (%)	71	73	69	77	66	65
Rata-rata # anak	1	1	1	1	1	1

dasar secara nasional.⁴⁴ Temuan di sekolah sampel menunjukkan proporsi yang hampir sama, dengan 66 persen kepala sekolah dan 60 persen guru PNS memiliki pencapaian tingkat pendidikan yang disyaratkan (Gambar 3). Memang 18 persen kepala sekolah hanya memiliki ijazah sekolah menengah atas, sedangkan 29 persen guru PNS memiliki ijazah tersebut sebagai latar belakang pendidikan tertinggi mereka. Rata-rata 50 persen guru non-PNS memiliki gelar sarjana. Namun statistik ini

menutupi variasi penting di seluruh kabupaten, karena hanya 32 persen guru non-PNS di Ketapang (Kalimantan Barat) yang memiliki gelar resmi yang disyaratkan, dan 78 persen di Manggarai Barat (NTT) memiliki gelar yang sama. dalam hal ini, guru non-PNS di dua kabupaten NTT sangat berkualitas dibandingkan dengan di kabupaten lain. Lebih dari 70 persen guru non-PNS di kabupaten NTT setidaknya memiliki gelar sarjana atau lebih tinggi. Sebaliknya, sekitar sepertiga dari guru non-PNS memiliki gelar sarjana yang disyaratkan (atau lebih tinggi) di Ketapang dan Sintang.

⁴⁴ World Bank 2013b.

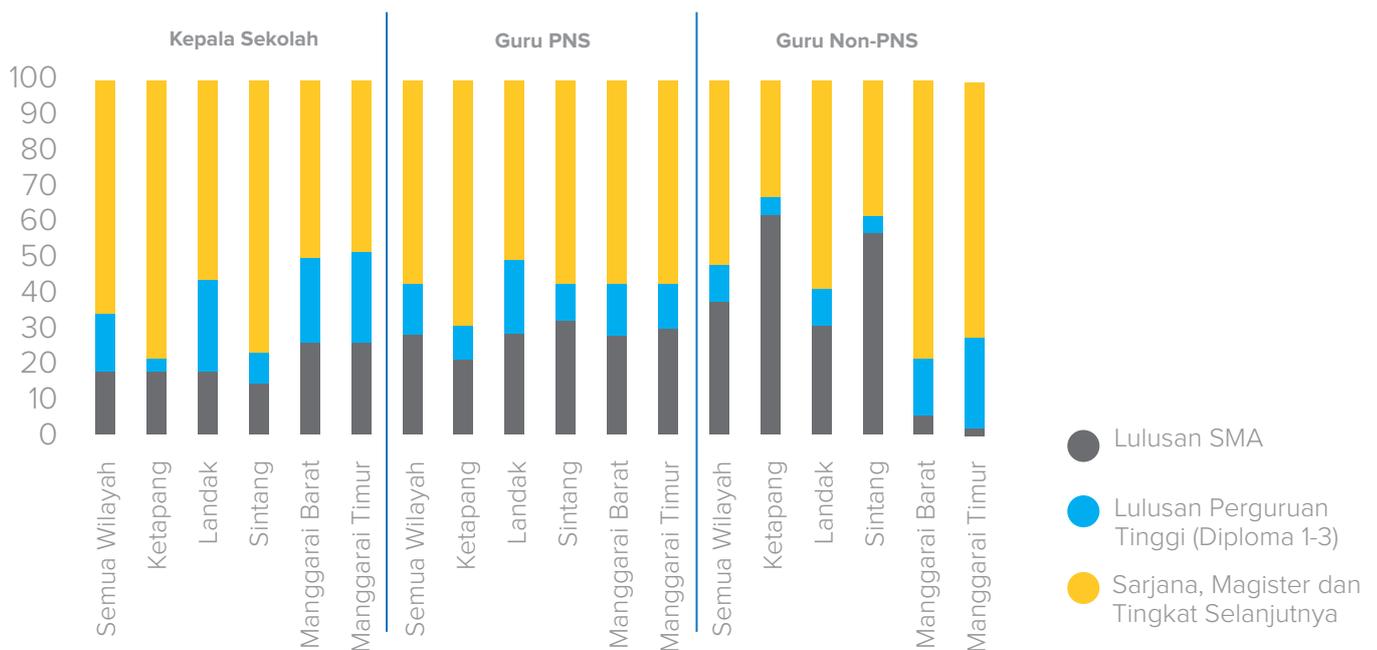
Kurang dari sepertiga guru di sekolah studi memiliki sertifikasi. Tingkat sertifikasi agak rendah, terutama mengingat UU Guru Tahun 2005 menetapkan bahwa semua guru yang mengajar di sekolah-sekolah Indonesia harus telah menyelesaikan proses sertifikasi pada tahun 2015. Sertifikasi memastikan guru memiliki kompetensi yang tepat dan memberi mereka tunjangan sertifikasi yang setara dengan gaji pokok. Tabel 18 menunjukkan bahwa 34 persen guru PNS telah disertifikasi dan hanya 12 persen guru non-PNS yang tersertifikasi. Temuan ini dapat mencerminkan proses mengejar ketinggalan dalam beberapa tahun terakhir, mengingat dua pertiga dari guru bersertifikasi telah disertifikasi sejak tahun 2013.

Terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal masa kerja di sekolah mereka saat ini, antara guru PNS, guru non-PNS, dan kepala sekolah. Gambar 4 menunjukkan masa kerja guru dan kepala sekolah

di sekolah tempat bekerja sekarang. dan Tabel 19 menyajikan pengalaman keseluruhan (tahun bekerja). Enam puluh persen guru PNS telah bekerja di sekolah mereka saat ini sejak sebelum tahun 2005. Antara 20 persen dan 30 persen kepala sekolah memegang posisi mereka di sekolah tempat mereka bekerja sekarang selama kurang dari dua tahun dan 30 persen hingga 60 persen kepala sekolah memegang posisi yang sama selama dua hingga lima tahun. Guru non-PNS adalah staf terbaru di sekolah sampel, dengan masing-masing 29 persen dan 32 persen telah bekerja di sekolah mereka saat ini selama kurang dari dua tahun dan dua hingga lima tahun.

Secara keseluruhan, pengalaman kerja guru PNS berbeda secara signifikan dari kepala sekolah dan guru non-PNS. di antara guru PNS, sekitar 60 persen telah bekerja di sekolah lain sebelumnya dan 49 persen

Gambar 3. Tingkat Pendidikan Kepala Sekolah dan Guru

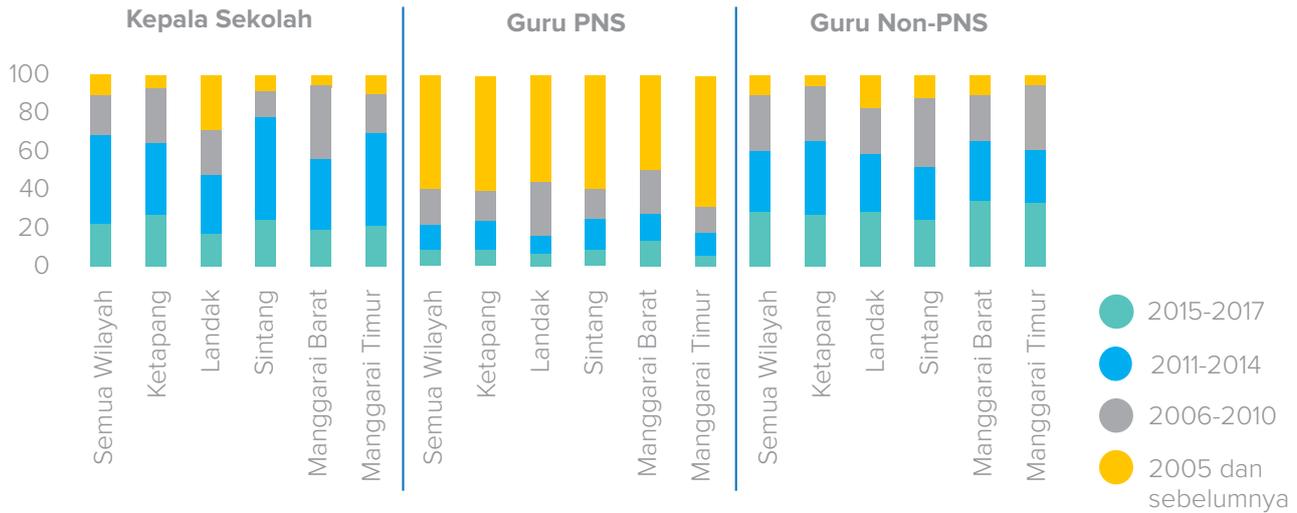


Tabel 18. Status Sertifikasi Guru

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Guru PNS						
Bersertifikasi (% guru PNS)	34	34	34	38	34	23
Bersertifikasi pada tahun 2015-17 (% bersertifikat)	25	27	27	19	33	29
Bersertifikasi pada tahun 2013-14 (% bersertifikat)	38	48	27	41	33	38
Certified in 2011-12 (% certified)	32	19	38	38	26	33
Bersertifikasi pada 2010 dan sebelumnya (% bersertifikat)	5	6	9	2	9	0

Catatan: PNS = Pegawai Negeri Sipil.

Gambar 4. Masa Kerja Kepala Sekolah dan Guru di Sekolah Tempat Bekerja Sekarang



Tabel 19. Pengalaman Kerja Kepala Sekolah dan Guru

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Kepala sekolah terhitung dari sekolah pertama sebagai kepala sekolah (% kepala sekolah)						
Sekolah pertama kepala sekolah adalah sekolah tempat mereka bekerja saat ini	70	56	78	75	68	68
2011-14	6	7	2	3	5	15
2006-10	7	15	2	6	8	3
2005 dan sebelumnya	17	22	18	15	18	15
Guru PNS terhitung dari sekolah pertama (% guru PNS)						
Sekolah pertama guru adalah sekolah tempat mereka bekerja saat ini	38	33	38	40	31	50
2015-17	0	0	0	0	0	0
2011-14	2	4	5	0	2	0
2006-10	11	8	17	8	16	8
2005 dan sebelumnya	49	56	41	53	51	42
Guru non-PNS terhitung dari sekolah pertama (% guru non-PNS)						
Sekolah pertama guru adalah sekolah tempat mereka bekerja saat ini	74	63	74	81	74	80
2015-17	1	0	1	1	1	2
2011-14	8	10	10	4	10	5
2006-10	11	16	8	8	10	11
2005 dan sebelumnya	6	11	7	5	5	2

Catatan: PNS = Pegawai Negeri Sipil.

mulai bekerja sebagai guru di sekolah tempat mereka bekerja saat ini sejak sebelum tahun 2005. Hanya 30 persen kepala sekolah dan 25 persen guru non-PNS yang sebelumnya memegang posisi yang sama di sekolah lain. di antara guru non-PNS yang sebelumnya telah bekerja di sekolah, 25 persen mulai sebelum tahun 2005 dan 46 persen mulai sejak 2006-10.

Kondisi Keseharian

Kepala sekolah di sekolah sampel sebagian besar berasal dari daerah setempat dan guru-guru relatif terintegrasi dengan baik ke dalam wilayah studi.

di antara kepala sekolah, 84 persen berbicara bahasa lokal dengan kefasihan tinggi; hampir 75 persen lahir di kabupaten tempat mereka bekerja; dan 70 persen tinggal di desa tempat sekolah mereka berada (Tabel 20). di antara para guru, 81 persen berbicara bahasa lokal

Tabel 20. Karakteristik Kepala Sekolah (% Kepala Sekolah)

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Kemampuan bahasa lokal						
Tidak fasih atau kefasihan terbatas	8	5	8	14	5	0
Kefasihan rata-rata	8	10	12	8	0	6
Kefasihan tinggi atau sempurna	84	85	80	78	95	94
Lokasi tempat kelahiran dibandingkan dengan lokasi sekolah						
Desa yang sama dengan sekolah	24	29	25	17	24	35
Desa lain, kecamatan yang sama	30	32	27	27	45	18
Kecamatan lain, kabupaten yang sama	19	15	22	24	16	15
Kabupaten lain, provinsi yang sama	16	10	24	11	11	32
Provinsi lain	11	14	2	20	5	0
Lokasi tempat tinggal utama dibandingkan dengan lokasi sekolah						
Desa yang sama dengan sekolah	69	68	55	76	66	76
Desa lain, kecamatan yang sama	26	31	29	23	32	18
Kecamatan lain, kabupaten yang sama	4	0	14	1	3	6
Kabupaten lain, provinsi yang sama	0	0	2	0	0	0
Provinsi lain	0	2	0	0	0	0
# hari yang dihabiskan di tempat tinggal utama tahun lalu	355	354	343	358	358	365
Alasan tinggal di tempat tinggal utama						
Memiliki rumah di sana	69	66	78	59	68	85
Lokasi tempat tinggal resmi	16	20	12	22	8	6
Pasangan/anak-anak tinggal di sana	39	61	31	40	34	12
Orang tua/saudara tinggal di sana	9	17	6	13	3	0
Dekat dengan sekolah	37	32	33	50	45	12
Lainnya	10	10	2	17	11	6

secara hampir sempurna; 80 persen lahir di kabupaten tempat mereka bekerja; dan 81 persen tinggal di desa tempat mereka mengajar (Tabel 21). Namun hanya 57 persen guru yang memiliki rumah di desa tempat sekolah mereka berada, dibandingkan dengan 69 persen kepala sekolah. Beberapa studi sebelumnya menemukan bahwa guru dan kepala sekolah yang lahir di luar provinsi tempat sekolah mereka berada memiliki tingkat ketidakhadiran yang lebih rendah daripada mereka yang lahir di provinsi yang sama di mana sekolah mereka berada.⁴⁵

Sebagian besar kepala sekolah dan guru tinggal di desa yang sama tempat sekolah mereka berada dan menghabiskan banyak waktu dan uang untuk bepergian. Seperti yang ditunjukkan Tabel 22 dan 23 (dalam Lampiran A), rata-rata waktu perjalanan untuk sampai ke sekolah bagi kepala sekolah yang tinggal di desa yang sama dengan sekolah mereka adalah 5 menit

tanpa biaya transportasi. Untuk kepala sekolah yang tinggal di luar desa, rata-rata waktu perjalanan adalah 30 menit dengan median biaya transportasi Rp8.000. Secara umum, guru memiliki kondisi perjalanan yang sama dengan kepala sekolah mereka. Meski demikian, guru yang tinggal di luar desa (20 persen dari guru) tempat mereka mengajar menghabiskan sekitar Rp4.500 untuk transportasi (satu arah).

Kegiatan di Sekolah dan di Luar Sekolah

Secara umum, para guru melaporkan menggunakan lebih dari 90 persen dari jam mengajar yang dijadwalkan. Kebanyakan guru hanya bekerja di satu sekolah. Tabel 24 mencantumkan kegiatan-kegiatan, baik di sekolah maupun di luar sekolah, yang diikuti oleh para guru di sekolah studi. Ketika dilakukan survei, pada minggu sebelumnya guru telah mengajar rata-rata 26 jam dari hampir 28 jam yang dijadwalkan. Namun ada variasi yang cukup besar di seluruh kabupaten dalam hal jam mengajar yang dijadwalkan, mulai dari 26 jam di Landak dan Manggarai Timur hingga 33 jam di Manggarai Barat.

⁴⁵ Toyamah et al. 2010; ACDP 2014.

Tabel 21. Karakteristik Guru (% Guru)

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Kemampuan bahasa lokal						
Tidak fasih atau kefasihan terbatas	1	0.17	1	0.08	0.08	0.06
Kefasihan rata-rata	0.09	0.15	0.11	0.08	0.05	0.08
Kefasihan tinggi atau sempurna	0.81	0.69	0.79	0.84	0.86	0.86
Lokasi tempat kelahiran dibandingkan dengan lokasi sekolah						
Desa yang sama dengan sekolah	39	39	39	40	31	42
Desa lain, kecamatan yang sama	24	21	21	23	30	27
Kecamatan lain, kabupaten yang sama	17	14	24	17	19	13
Kabupaten lain, provinsi yang sama	12	7	10	12	14	18
Provinsi lain	9	18	6	8	6	0
Lokasi tempat tinggal utama dibandingkan dengan lokasi sekolah						
Desa yang sama dengan sekolah	81	81	72	86	80	82
Desa lain, kecamatan yang sama	16	16	19	13	19	18
Kecamatan lain, kabupaten yang sama	2	2	8	1	1	0
Kabupaten lain, provinsi yang sama	0	0	1	1	1	0
Provinsi lain	0	0	0	0	0	0
# hari yang dihabiskan di tempat tinggal utama tahun lalu	359	355	357	361	359	361
Alasan tinggal di tempat tinggal utama						
Memiliki rumah di sana	57	56	61	61	48	54
Lokasi tempat tinggal resmi	14	15	12	17	16	5
Pasangan/anak-anak tinggal di sana	63	85	47	71	56	40
Orang tua/saudara tinggal di sana	25	36	24	24	19	19
Dekat dengan sekolah	32	41	23	28	44	25
Lainnya	4	10	4	2	2	0

Mengingat bahwa murid biasanya bersekolah enam hari seminggu di Indonesia, hal ini menyiratkan bahwa guru di daerah sampel rata-rata mengajar antara 4,3 jam dan 5,5 jam yang dijadwalkan setiap hari. Ini berbeda dari jumlah jam mengajar mingguan yang dilakukan, yang berkisar antara 22 jam di Manggarai Timur hingga 31 jam di Manggarai Barat. Jam mengajar mingguan yang dilaporkan sendiri oleh responden ini relatif tinggi dibandingkan dengan rata-rata beban mengajar nasional. Bank Dunia (2008) melaporkan bahwa sekitar setengah dari guru sekolah dasar secara nasional memiliki beban kerja kurang dari 18 jam per minggu. Baru-baru ini, Suharti (2013) menemukan bahwa secara nasional hanya 44 persen guru memenuhi jam mengajar minimum yang disyaratkan oleh undang-undang (24 jam), sementara 53 persen guru di perdesaan dan 59 persen di daerah terpencil bekerja kurang dari 18 jam setiap minggu.

Guru juga melaporkan menghabiskan waktu untuk memberi serta menilai ujian dan pekerjaan rumah. Ada rata-rata sekitar 11 ujian murid sekolah dasar sepanjang tahun akademik, meskipun ada variasi yang

signifikan di seluruh kabupaten, dari tujuh ujian di Landak hingga 14 di Ketapang. Pekerjaan rumah diberikan setiap hari oleh sekitar 25 persen guru dan setiap minggu oleh lebih dari 90 persen guru. Sekitar 90 persen guru melaporkan bahwa mereka menilai sendiri pekerjaan rumah murid dan menghabiskan antara tiga jam (Landak) dan lima jam (Manggarai Timur) setiap minggu. dalam alokasi waktu mingguan, menilai ujian dan pekerjaan rumah harian adalah kegiatan guru terpenting ketiga setelah mengajar dan menyiapkan rencana pelajaran. Tugas yang terkait dengan kegiatan belajar mengajar lainnya yang lebih jarang terjadi selama tahun akademik meliputi penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir (antara empat jam di Landak dan 11 jam di Manggarai Timur setiap bulan), serta pelatihan dan pengembangan diri guru (dialokasikan setiap bulan, mulai dari empat jam di Landak hingga delapan jam di Sintang).

Hampir semua kepala sekolah juga mengajar, sementara 68 persen guru melakukan peran lain selain mengajar dengan akses yang sangat beragam terhadap pelatihan pengembangan kapasitas.

Tabel 24. Kegiatan Guru di Sekolah, Tahun Ajaran 2015/16

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Pengajaran						
# Sekolah tempat mengajar	1	1	1	1	1	1
Jam mengajar # yang dijadwalkan minggu lalu	28	28	26	27	33	26
Realisasi # jam mengajar minggu lalu	26	26	23	27	31	22
Rata-rata # murid di kelas setiap hari	20	18	18	19	22	21
Ujian dan pekerjaan rumah - frekuensi						
# Ujian yang dilakukan pada tahun akademik	11	14	7	13	10	10
Pekerjaan rumah diberikan setiap hari (% guru)	26	36	27	24	20	22
Pekerjaan rumah diberikan setidaknya seminggu sekali (% guru)	93	93	87	95	93	95
% pekerjaan rumah dinilai sendiri oleh guru	90	88	93	91	85	92
Jam mingguan yang dihabiskan untuk tugas-tugas mengajar						
Persiapan rencana pembelajaran	5	6	4	4	6	7
Kegiatan mengajar	18	17	17	20	14	20
Penilaian ujian harian dan pekerjaan rumah	4	5	3	4	4	5
Kegiatan remedial	2	2	1	2	2	2
Kegiatan ekstrakurikuler	1	1	1	1	2	2
Jam bulanan yang dihabiskan untuk tugas-tugas mengajar						
Penilaian ujian tengah semester dan ujian akhir	7	9	4	6	7	11
Pelatihan dan pengembangan diri guru	6	4	3	8	6	7
Kegiatan penelitian	0	0	1	0	0	0
Penciptaan alat pengajaran pembelajaran yang inovatif	1	1	0	1	1	2
Peran tambahan di sekolah (% guru)						
Guru memiliki kegiatan tambahan di sekolah	68	75	51	66	67	81
Guru wali kelas	50	42	65	51	38	65
Pengawas ekstrakurikuler	37	38	10	43	38	42
Operator Dapodik	11	11	11	13	13	6
Pengawas perpustakaan	6	9	4	6	5	2
Pengurus komite sekolah	2	1	1	3	1	4

Selain kegiatan utama mereka, hampir semua kepala sekolah telah dijadwalkan untuk mengajar sejak minggu sebelumnya—rata-rata 14 dari 15 jam (Tabel 25). Lebih dari 90 persen kepala sekolah menerima pelatihan pendidikan dalam tiga tahun terakhir. Guru juga melakukan peran lain, termasuk menjadi wali kelas (50 persen guru), pengawas ekstrakurikuler (37 persen), dan petugas data pendidikan kepala sekolah (11 persen). Terkait pelatihan guru tambahan, Tabel 26 menunjukkan sekitar 8 persen guru di Sintang telah mengikuti lokakarya pelatihan dalam enam bulan terakhir dan 18 persen mengahadirinya dalam 12 bulan terakhir. di Manggarai Timur, 31 persen guru yang disurvei melakukan pelatihan dalam enam bulan terakhir dan 43 persen mengahadirinya dalam 12 bulan terakhir.

Mayoritas kepala sekolah dan sekitar 70 persen guru memiliki pekerjaan lain. di antara kepala sekolah (Tabel 25), 68 persen bekerja di sektor pertanian, menghabiskan antara empat jam (Manggarai Barat) dan 24 jam (Landak dan Sintang) dalam kegiatan pertanian setiap bulan. Sebagian kecil kepala sekolah (3 persen) di Ketapang dan Landak melaporkan memiliki pekerjaan mengajar tambahan (di luar sekolah). Pertanian juga merupakan kegiatan kerja paling umum kedua yang dilakukan oleh 54 persen guru. Sebelas persen guru bekerja di bidang non-pertanian dan 5 persen mengajar di luar sekolah. Guru, misalnya, menghabiskan rata-rata 32 jam pada bulan sebelumnya (sekitar delapan jam seminggu) untuk bekerja di pertanian, dibandingkan dengan rata-rata 26 jam mengajar setiap minggu. Meskipun waktu yang dihabiskan oleh para guru untuk

Tabel 25. Kegiatan Tambahan Kepala Sekolah: Pelatihan, Pekerjaan Lain, dan Keterlibatan dalam Organisasi Lokal

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Kegiatan di sekolah						
Mengajar di sekolah yang sama (% kepala sekolah)	94	92	92	98	89	97
Jadwal jam mengajar # (jika mengajar)	15	18	20	14	14	9
Realisasi # jam mengajar (jika mengajar)	14	16	16	14	12	7
Pernah menerima pelatihan dalam pendidikan (%kepala sekolah)	94	90	94	97	92	94
Menerima pelatihan dalam pendidikan dalam 3 tahun terakhir (% kepala sekolah)	90	85	90	94	92	82
Pekerjaan lain bulan lalu						
Mengajar di luar sekolah (% kepala sekolah)	3	8	4	0	0	0
# jam dihabiskan. jika mengajar di luar sekolah	6	5	8			
Penghasilan bulanan rata-rata dari pekerjaan mengajar tambahan (Rp)	450.000	200.000	700.000			
Bekerja di pertanian (% kepala sekolah)	68	61	75	72	58	73
# jam dihabiskan. jika bekerja di pertanian	18	18	24	24	4	8
Pendapatan bulanan rata-rata dari pekerjaan pertanian (Rp)	400.000	500.000	294.667	500.000	187.500	170.833
Pekerjaan non-pertanian lainnya (% kepala sekolah)	8	18	8	5	3	3
Jam dihabiskan. jika memiliki pekerjaan lain	24	38	15	8	4	4
Penghasilan bulanan rata-rata dari pekerjaan lain (Rp)	708.333	1.125.000	1.080.000	500.000	1.250.000	500.000
Keterlibatan dalam organisasi lokal (% kepala sekolah)						
Aktif dalam organisasi lokal	64	81	48	69	55	56
Organisasi pemerintah daerah	13	20	20	6	8	15
Organisasi keagamaan/pemuda/petani	54	66	44	51	55	53
Partai politik atau organisasi non-pemerintah	0	0	2	0	0	0
Organisasi pendidikan/kesehatan/sosial	24	27	12	44	3	12

bertani atau kegiatan lain mungkin tampaknya tidak terlalu memakan waktu atau mengganggu, namun itu adalah waktu yang diambil dari kegiatan beajar mengajar atau rekreasi. Sebagai perbandingan, waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan tambahan jauh lebih tinggi daripada, misalnya, waktu yang dihabiskan untuk pelatihan dan pengembangan diri per bulan (rata-rata lima jam, Tabel 26). Ini mungkin terkait dengan proporsi guru yang rendah (34 persen) di sekolah sampel yang melaporkan bahwa mereka telah tersertifikasi. Memang, De Ree et al. (2018) menemukan bahwa efek penting dari program dan tunjangan sertifikasi adalah untuk mengurangi kemungkinan guru memiliki pekerjaan sampingan.

Pekerjaan sampingan tidak memberi kepala sekolah dan guru penghasilan tambahan yang signifikan. Kepala sekolah dengan pekerjaan sampingan di sektor pertanian menerima median penghasilan bulanan tambahan yang bervariasi antara kurang dari Rp200.000 di kabupaten NTT hingga

Rp500.000 di Sintang dan Ketapang. Para kepala sekolah yang memiliki pekerjaan ekstra non-pertanian menerima tambahan penghasilan dengan median penghasilan bulanan tertinggi (rata-rata Rp700.000), meskipun ada variasi yang signifikan antar kabupaten (Tabel 25). Demikian pula untuk guru yang memiliki pekerjaan sampingan di sektor pertanian, median penghasilan bulanan mereka bervariasi antara Rp167.000 hingga Rp437.000 di Manggarai Barat dan Sintang. Bagi mereka yang memiliki pekerjaan sampingan non-pertanian, median penghasilan bulanan mereka lebih besar, rata-rata Rp500.000 hingga Rp833.000 di Sintang.

Banyak kepala sekolah dan guru berpartisipasi dalam organisasi lokal. Enam puluh empat persen kepala sekolah terlibat dalam satu atau lebih organisasi lokal — organisasi keagamaan, pemuda, atau petani (84 persen); organisasi pendidikan, kesehatan, atau sosial (38 persen); dan organisasi pemerintah daerah setempat (20 persen) (tabel 25). Tabel 26 menunjukkan bahwa sekitar

Tabel 26. Kegiatan Tambahan Guru: Pelatihan, Pekerjaan Lain, dan Keterlibatan dalam Organisasi Lokal

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Pelatihan pendidikan (% guru)						
Menghadiri lokakarya pelatihan dalam 6 bulan terakhir	17	18	15	8	20	31
Menghadiri lokakarya pelatihan dalam 12 bulan terakhir	29	33	26	18	34	43
Pekerjaan lain bulan lalu						
Mengajar di luar sekolah (% guru)	5	9	12	2	2	1
#Jam dihabiskan, jika mengajar di luar sekolah	21	21	21	17	32	17
Penghasilan bulanan rata-rata dari pekerjaan mengajar tambahan (Rp)	200.000	158.333	275.000	180.000	300.000	143.750
Bekerja di pertanian (% guru)	54	46	61	62	41	60
# Jam dihabiskan, jika bekerja di pertanian	32	35	34	39	16	24
Pendapatan bulanan rata-rata dari pekerjaan pertanian (Rp)	300.000	333.333	266.667	437.500	166.667	191.667
Pekerjaan non-pertanian lainnya (% guru)	11	21	16	8	7	2
Jam dihabiskan, jika memiliki pekerjaan lain	42	43	37	43	52	31
Penghasilan bulanan rata-rata dari pekerjaan lain (Rp)	500.000	500.000	500.000	833.333	250.000	654.167
Keterlibatan dalam organisasi lokal (% guru)						
Aktif dalam organisasi lokal	55	62	48	50	55	60
Organisasi pemerintah daerah	20	16	20	19	17	29
Organisasi keagamaan/pemuda/petani	84	76	84	79	94	92
Partai politik atau organisasi non-pemerintah	1	2	3	0	1	2
Organisasi pendidikan/kesehatan/sosial	24	39	19	27	8	14

55 persen guru (1.048) melaporkan bahwa mereka terlibat dalam organisasi lokal. Guru-guru ini terutama terlibat dalam organisasi keagamaan, pemuda, atau petani (84 persen di semua jenis organisasi); organisasi pendidikan, kesehatan, atau sosial (24 persen); dan organisasi pemerintah daerah setempat (20 persen). Keterlibatan dalam organisasi lokal dapat memengaruhi kinerja guru, misalnya dengan adanya tambahan beban kerja bagi mereka. Ini akan mencerminkan temuan ACDP (2014) yang melaporkan tingginya angka ketidakhadiran di antara guru yang juga terlibat dalam organisasi masyarakat.⁴⁶ Namun keterlibatan dalam komunitas lokal dapat menjadikan guru lebih responsif terhadap tuntutan masyarakat terkait peningkatan dalam hasil pengajaran, misalnya, melalui tekanan masyarakat yang dapat mendorong guru untuk berkinerja lebih baik.

Kepala sekolah melakukan evaluasi kinerja guru di sebagian besar sekolah. Lebih dari 70 persen kepala sekolah melaporkan telah mengevaluasi guru di sekolah mereka, dan hampir 80 persen guru melaporkan telah dievaluasi oleh kepala sekolah mereka

selama tahun akademik 2015/16 (Tabel 27). Kriteria utama evaluasi meliputi disiplin atau perilaku guru (87 persen), kemampuan mengajar (76 persen), kehadiran (75 persen), dan kinerja atau perilaku murid mereka (58 persen). Persentase ini sesuai dengan kriteria utama evaluasi kepala sekolah seperti yang dilaporkan oleh guru—disiplin/perilaku guru (80 persen), kehadiran guru (70 persen), kemampuan mengajar (62 persen), dan kinerja atau perilaku murid (57 persen). Sekitar 25 persen kepala sekolah melaporkan telah mengomunikasikan hasil evaluasi kepada guru. Sebaliknya, sekitar 67 persen guru melaporkan telah menerima hasil evaluasi dari kepala sekolah mereka, dengan 97 persen guru menganggap hasil evaluasi tersebut adil dan objektif. Tujuh puluh satu persen kepala sekolah tidak memberikan apresiasi dan penghargaan kepada guru berkinerja tinggi dengan cara apa pun, meskipun 27 persen kepala sekolah melaporkan memberi pujian kepada guru berkinerja tinggi secara verbal. Namun 56 persen guru melaporkan mendapat pujian secara verbal dari kepala sekolah mereka dan 36 persen melaporkan bahwa mereka tidak menerima pengakuan khusus.

⁴⁶ dalam ACDP (2014), kurang dari 1 persen guru melaporkan terlibat dalam program pemerintah sebagai fasilitator.

Tabel 27. Evaluasi Guru oleh Kepala Sekolah, Tahun Akademik 2015/16

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Pelaporan kepala sekolah (%)						
# kepala sekolah yang melaporkan telah melakukan evaluasi guru	195	44	38	57	28	28
Kriteria evaluasi						
Disiplin/perilaku guru	87	86	74	93	89	93
Kemampuan mengajar	76	59	89	84	68	75
Kehadiran guru	75	70	74	79	79	75
Kinerja atau perilaku murid guru	58	50	55	60	61	71
Kreativitas di luar kelas	24	23	13	28	7	50
Lainnya	53	48	39	49	71	68
Hasil evaluasi dikomunikasikan kepada guru	98	98	97	98	96	100
Pengakuan terhadap guru berkinerja tinggi						
Tidak ada	71	67	83	45	97	100
Pujian lisan	27	32	10	55	3	0
Sertifikat penghargaan	1	4	0	0	3	0
Dukungan dengan peluang promosi dan/atau pengembangan diri	3	4	0	1	13	0
Promosi menjadi kepala sekolah	2	4	0	4	0	0
Penghargaan finansial	4	2	6	8	0	0
Pelaporan guru (%)						
# teachers reporting having been evaluated	1,506	342	195	446	263	260
Kriteria evaluasi						
Disiplin/perilaku guru	80	80	70	77	86	86
Kemampuan mengajar	62	71	57	63	59	56
Kehadiran guru	70	72	60	73	70	71
Kinerja atau perilaku murid guru	57	60	50	56	55	62
Kreativitas di luar kelas	24	27	15	20	26	33
Lainnya	35	35	21	26	48	47
Hasil evaluasi dikomunikasikan oleh kepala sekolah	67	65	68	65	62	78
Hasil evaluasi dianggap adil dan objektif	97	96	97	98	96	98
Pengakuan terhadap guru berkinerja tinggi						
Tidak ada	36	36	52	38	25	28
Pujian lisan	56	53	41	53	67	69
Sertifikat penghargaan	1	2	1	1	1	0
Dukungan dengan peluang promosi dan/atau pengembangan diri	3	3	3	2	3	4
Promosi menjadi kepala sekolah	0	1	0	0	0	0
Penghargaan finansial	3	5	1	4	5	1

Insentif dan Motivasi Kepala Sekolah dan Guru

Gaji dan Tunjangan

Hampir semua kepala sekolah harus melakukan perjalanan lebih dari dua jam untuk mengambil gaji mereka. Hampir 50 persen kepala sekolah menerima gaji melalui rekening bank mereka, 32 persen menerima pembayaran tunai langsung dari sekolah, dan 14 persen menerima pembayaran tunai dari kantor pendidikan kecamatan setempat (Tabel 28). Sembilan puluh lima persen kepala sekolah harus melakukan perjalanan ke luar desa, sejauh rata-rata 52 kilometer, untuk mengambil gaji mereka setiap bulan. Jaraknya berkisar dari 19 kilometer di kabupaten NTT hingga 89 kilometer di Sintang, dengan rata-rata waktu perjalanan (satu arah) sekitar 150 menit. Median biaya transportasi (satu arah) kepala sekolah untuk mencapai lokasi pengambilan gaji bervariasi antara Rp16.500 di Ketapang dan Rp67.500 di Sintang.

Terdapat banyak variasi dalam cara pengiriman gaji guru. di antara para guru, 46 persen menerima gaji mereka langsung dari sekolah, 26 persen melalui rekening

bank, 15 persen dari dinas pendidikan kecamatan, dan 13 persen dari dinas pendidikan kabupaten (Tabel 29). Sebanyak 55 persen guru harus pergi ke luar desa untuk mengambil gaji mereka. di antara para guru ini, 75 persen melakukannya setiap bulan dan 17 persen melakukannya setiap triwulan. dalam dinamika yang sama seperti untuk kepala sekolah, guru melakukan perjalanan antara 37 kilometer (Manggarai Barat) hingga 81 kilometer (Sintang) selama sekitar 150 menit untuk mencapai lokasi pengambilan gaji mereka. Median biaya transportasi ke lokasi pengambilan gaji untuk guru bervariasi antara Rp10.000 di Ketapang dan Rp75.000 di Manggarai Timur.

Penghasilan kepala sekolah dan guru sangat berbeda berdasarkan status kepegawaian PNS dan sertifikasi mereka. Kepala sekolah dan guru di daerah sampel melaporkan menerima median penghasilan bulanan, masing-masing sekitar Rp8,25 juta dan sekitar Rp1,5 juta. Gambar 5 menunjukkan rata-rata penghasilan bulanan yang diterima oleh kepala sekolah dan guru selama tahun lalu,⁴⁷ sesuai dengan status sertifikasi dan kontrak mereka (PNS atau lainnya). dalam gambar, perbedaan penting berkaitan dengan

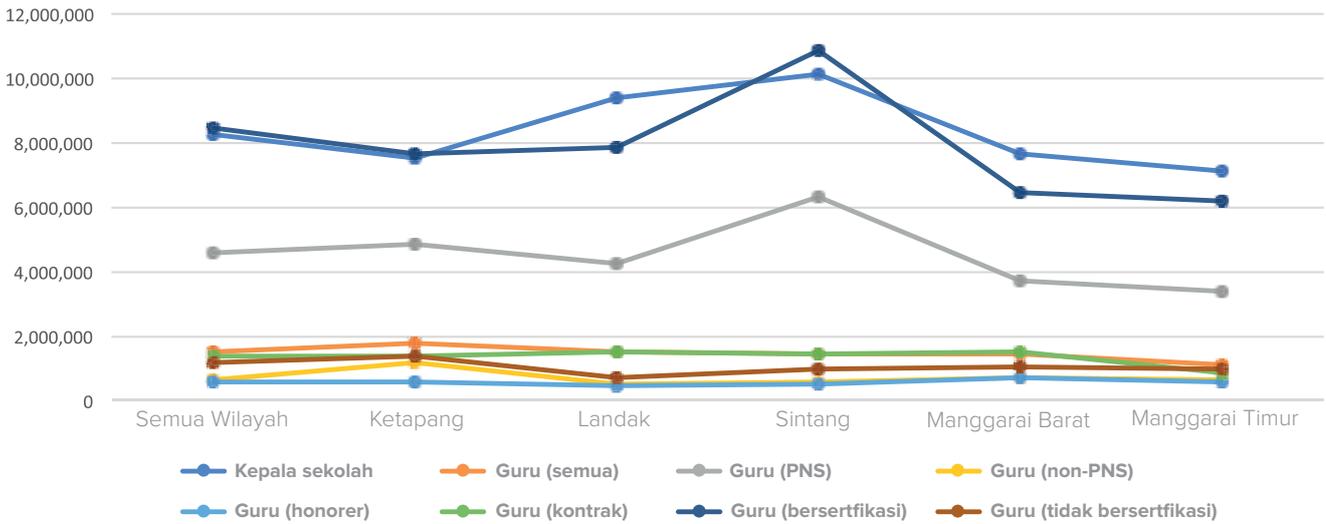
Tabel 28. Cara Pengiriman Gaji Kepala Sekolah

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Sarana penerimaan gaji (% kepala sekolah)						
Ditransfer ke rekening bank	47	0	100	84	3	9
Pembayaran tunai dari dinas pendidikan daerah	3	9	0	1	3	6
Pembayaran tunai dari dinas pendidikan kecamatan (UPPT)	14	11	0	1	51	30
Pembayaran tunai dari sekolah	32	81	0	12	38	39
Lainnya	3	0	0	1	5	15
Jarak, waktu perjalanan, dan biaya dari sekolah ke lokasi pengambilan gaji						
Gaji diambil di luar desa (% kepala sekolah)	95	91	100	99	89	91
Jarak satu arah (km)	52	42	47	89	19	19
Waktu perjalanan (menit)	147	99	134	221	106	91
Median biaya transportasi (Rp)	35,000	16,500	25,000	67,500	50,000	50,000
Frekuensi pengambilan gaji di luar desa (% kepala sekolah)						
Bulanan	97	96	100	94	100	100
Dua bulanan	1	2	0	2	0	0
Triwulan	1	0	0	2	0	0
Lainnya	1	2	0	2	0	0

Catatan: km = kilometers.

⁴⁷ Para responden melaporkan total penghasilan yang mereka terima selama 12 bulan terakhir, yang kemudian dibagi 12 untuk menunjukkan angka penghasilan bulanan. Beberapa kepala sekolah dan guru tidak menerima gaji setiap bulan. Angka penghasilan yang dilaporkan berdasarkan informasi dari masing-masing responden yang mungkin rawan kesalahan penghitungan, mengingat bahwa para guru tidak menerima gaji secara teratur dan dengan jumlah yang bervariasi dari waktu ke waktu

Gambar 5. Median Total Penghasilan Bulanan (Rp)

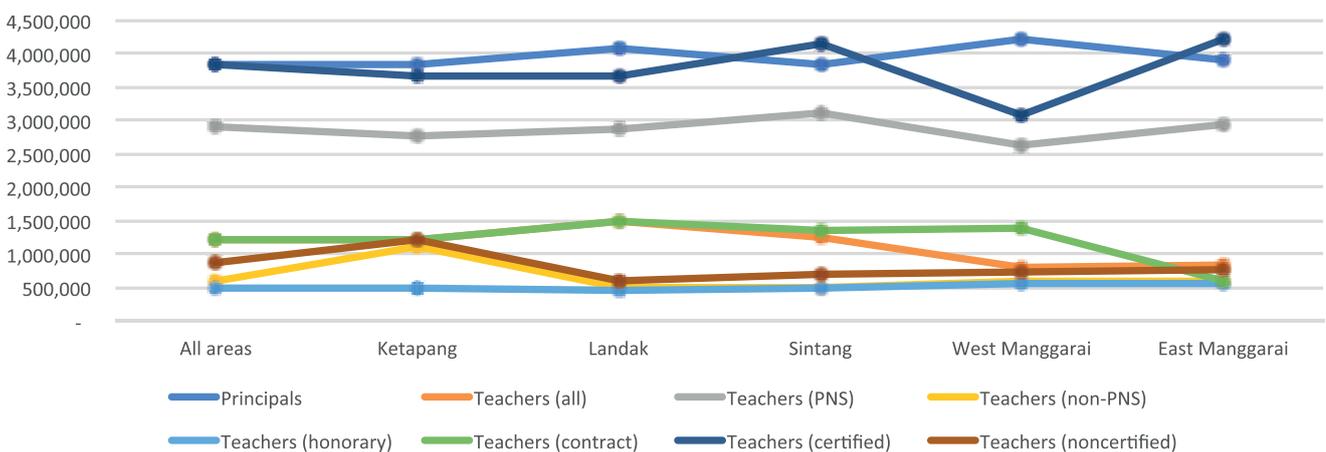


status guru (PNS atau kategori guru lainnya). di semua wilayah studi, rata-rata penghasilan guru bersertifikasi kira-kira sama dengan penghasilan rata-rata kepala sekolah, yaitu sekitar Rp8,4 juta. Pada tahun 2018, secara nasional hampir 1,9 juta guru sekolah dasar dan menengah di Indonesia adalah penerima tunjangan sertifikasi, dengan anggaran tahunan sebesar USD5,6 miliar. Pada tahun yang sama, hampir 69.000 guru sekolah dasar dan menengah menerima tunjangan daerah terpencil, dengan anggaran tahunan sebesar USD183 juta. di Sintang, guru bersertifikasi menerima penghasilan lebih sedikit dari kepala sekolah (rata-rata penghasilan masing-masing Rp10,8 juta dan Rp 10,1 juta). Berikutnya adalah guru-guru PNS yang tidak bersertifikasi, yang menerima rata-rata penghasilan bulanan sekitar Rp4,6 juta, dengan Rp3,4 juta di Manggarai Timur hingga Rp6,3 juta di Sintang. Guru non-PNS dan tidak bersertifikasi memiliki penghasilan yang jauh lebih rendah, dengan sedikit variasi di seluruh

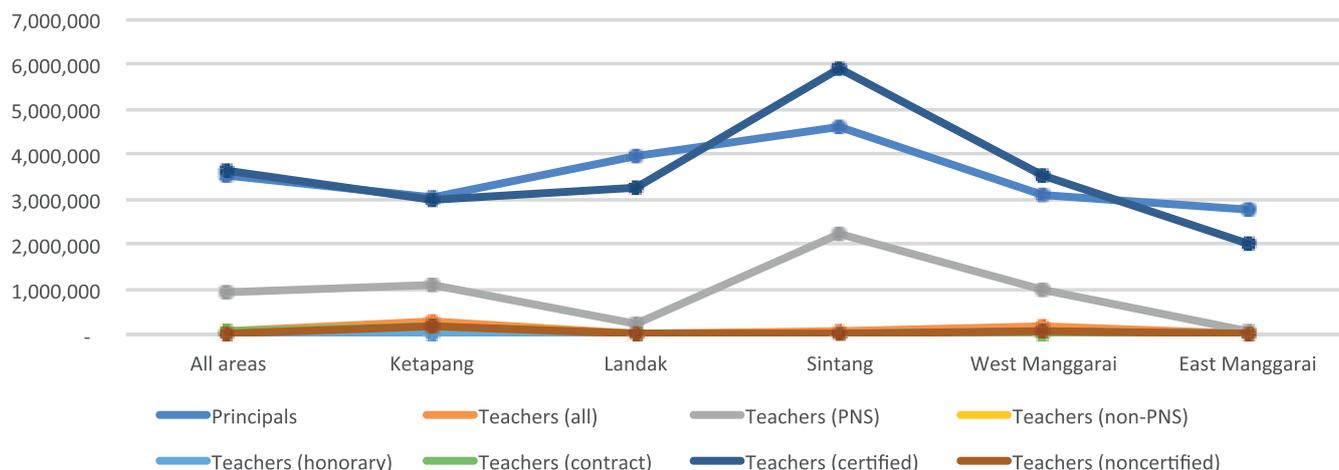
kabupaten. Rata-rata penghasilan bulanan guru kontrak berkisar antara Rp850.000 (Manggarai Timur) dan Rp1,5 juta (Landak dan Manggarai Barat) selama tahun lalu. Rata-rata pendapatan bulanan guru honoror adalah sekitar Rp550.000.

Sebagian besar perbedaan dalam penghasilan guru merupakan dampak dari perbedaan tunjangan tambahan yang mereka terima. Ini dapat diamati dengan cara meninjau gaji pokok dan tunjangan tambahan staf pengajar secara terpisah (Gambar 6 dan 7). Selama tahun lalu, hanya kepala sekolah, guru bersertifikasi, dan guru PNS yang menerima tunjangan tambahan, dengan median bulanan masing-masing Rp3,5 juta, Rp3,6 juta, dan Rp960.000. di antara kategori guru lainnya, mayoritas tidak menerima tunjangan tambahan. Ada juga perbedaan meskipun lebih kecil dalam gaji pokok guru. Para guru honoror menerima rata-rata gaji pokok bulanan sebesar Rp600.000, dengan perbedaan yang sangat kecil antar kabupaten.

Gambar 6. Median Gaji Pokok Bulanan (Rp)



Gambar 7. Median Total Tunjangan Bulanan (Rp)



Guru kontrak dan guru PNS masing-masing menerima Rp1,2 juta dan Rp2,9 juta. Kepala sekolah dan guru bersertifikasi menerima gaji pokok sekitar Rp3,8 juta.

Kepala sekolah dan guru juga dapat menerima tunjangan profesional dan tunjangan daerah terpencil.

Undang-undang Guru Tahun 2005 menetapkan bahwa guru bersertifikasi menerima tunjangan sertifikasi yang setara dengan gaji pokok mereka. Penetapan ini juga memberikan tunjangan daerah terpencil yang sama jumlahnya dengan gaji pokok kepada guru bersertifikasi. Untuk guru tidak bersertifikasi yang telah mengajar sedikitnya dua tahun dan dengan setidaknya 24 jam mengajar setiap minggu di sekolah yang memenuhi syarat, tunjangan daerah terpencil memberikan pemasukan tambahan sekitar Rp1,5 juta per bulan.⁴⁸ Tunjangan tambahan penghasilan hanya diberikan untuk guru yang tidak bersertifikasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2009, jumlah tunjangan tambahan penghasilan untuk guru tidak bersertifikasi ditetapkan sebesar Rp250.000 per bulan.

Hampir semua kepala sekolah menerima beberapa jenis tunjangan tambahan, dengan rata-rata median tunjangan tambahan bulanan sekitar Rp3,5 juta.

Sekitar 70 persen kepala sekolah yang disurvei menerima tunjangan sertifikasi yang bervariasi antara Rp2 juta per bulan di Manggarai Barat hingga Rp3,7 juta per bulan di Landak (Tabel 30, dalam Lampiran A). Sekitar 31 persen kepala sekolah (80 responden) melaporkan telah menerima tunjangan daerah terpencil dalam 12 bulan terakhir. Median jumlah tunjangan bulanan sangat bervariasi antar

kabupaten, dari Rp830.000 di Ketapang hingga Rp2,8 juta di Sintang. Tidak ada kepala sekolah di sekolah sampel di Manggarai Timur yang melaporkan menerima tunjangan daerah terpencil selama 12 bulan terakhir. di Landak, kepala sekolah melaporkan mereka menerima median tunjangan daerah terpencil bulanan sebesar Rp2,7 juta dan median tunjangan tambahan penghasilan Rp100.000.

Median jumlah tunjangan tambahan penghasilan bulanan untuk guru tidak bersertifikasi jauh lebih kecil dari tunjangan daerah terpencil di semua kabupaten, kecuali Manggarai Timur.⁴⁹

Tabel 31 (dalam Lampiran A) menunjukkan bahwa sekitar 84 persen guru PNS dan 45 persen guru non-PNS menerima beberapa tunjangan tambahan selama tahun akademik 2015/16. Median tunjangan tambahan penghasilan bulanan guru PNS dan non-PNS adalah masing-masing sekitar Rp1,3 juta dan Rp200.000. dalam dinamika yang sama seperti untuk kepala sekolah, tunjangan terbesar untuk guru adalah tunjangan sertifikasi, diikuti oleh tunjangan daerah terpencil, dan terakhir tunjangan tambahan penghasilan untuk guru yang tidak bersertifikasi. Untuk ketiga jenis tunjangan, guru PNS menerima jumlah yang jauh lebih besar daripada yang diterima oleh guru non-PNS.

Sekitar 32 persen guru PNS dalam sampel menerima tunjangan sertifikasi.

Median jumlah tunjangan bervariasi antara Rp1,8 juta di Manggarai Barat hingga Rp3,3 juta di Landak (Tabel 31). Hanya lima guru non-PNS yang menerima tunjangan sertifikasi dengan jumlah rata-rata yang diterima para guru ini adalah Rp1,3 juta.

⁴⁸ Tomayah et al. 2010.

⁴⁹ Jumlah tunjangan tambahan penghasilan untuk guru tidak bersertifikasi yang dilaporkan di sini berbeda dari jumlah yang ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 2009. Jumlah yang dilaporkan mungkin termasuk tunjangan tambahan penghasilan untuk guru yang tidak bersertifikasi, yang mungkin didanai melalui anggaran daerah beberapa pemerintah kabupaten.

Median jumlah tunjangan daerah terpencil bulanan sangat bervariasi antar kabupaten.

Sekitar 16 persen guru PNS dan 6 persen guru non-PNS melaporkan telah menerima tunjangan daerah terpencil dalam 12 bulan terakhir (Tabel 31). Untuk guru PNS, tunjangan daerah terpencil bulanan berkisar antara Rp725.000 di Ketapang hingga Rp2,7 juta di Sintang. Untuk guru non-PNS, rata-rata tunjangan daerah terpencil berkisar antara Rp750.000 di Manggarai Timur hingga Rp1,4 juta di Landak dan Sintang.

Median tunjangan tambahan penghasilan bulanan untuk guru tidak bersertifikasi sangat jauh lebih kecil dari tunjangan daerah terpencil di semua kabupaten.

Tunjangan tambahan penghasilan untuk guru tidak bersertifikasi diterima oleh, masing-masing, 35 persen dan 11 persen guru PNS dan non-PNS di wilayah sampel (Tabel 31). Pengecualian di sini adalah guru non-PNS, yang menerima tunjangan daerah terpencil sebesar rata-rata Rp750.000 dan tunjangan penghasilan Rp1 juta per bulan. di Landak, tidak satu pun guru non-PNS yang menerima tunjangan tambahan penghasilan untuk guru tidak bersertifikasi dalam 12 bulan terakhir.

Jumlah kepala sekolah dan guru yang menerima tunjangan sertifikasi meningkat secara stabil antara tahun 2014 dan 2016.

Data tentang gaji dan tunjangan berbasis kinerja untuk guru dan kepala sekolah selama tahun 2014-16 disajikan pada Tabel 32 (dalam Lampiran A). Sebagian besar kepala sekolah dan guru (total lebih dari 90 persen) melaporkan telah menerima keseluruhan berbagai jenis tunjangan selama tahun 2014 dan 2015. Selama tahun anggaran 2016, jumlah kepala sekolah dan guru yang menerima jumlah keseluruhan dari ketiga jenis tunjangan (tunjangan sertifikasi, tunjangan daerah terpencil, dan tunjangan tambahan penghasilan untuk guru yang tidak bersertifikasi) sedikit lebih rendah, yaitu sekitar 60-80 persen, kemungkinan terkait dengan waktu pelaksanaan survei.

Terdapat sejumlah guru dan kepala sekolah yang menerima jumlah keseluruhan tunjangan mereka cukup banyak, dimana hal ini merupakan kondisi yang tidak biasa mengingat banyaknya laporan mengenai penyampaian tunjangan yang kurang optimal di Indonesia.

Tomayah et al. (2010) melaporkan bahwa sekitar 60 persen guru yang memenuhi syarat untuk tunjangan daerah terpencil tidak menerima tunjangan tersebut dalam jumlah penuh, dengan variasi yang luas antar kabupaten. Untuk ketiga jenis tunjangan, jumlah guru yang menerima tunjangan dalam jumlah penuh selama tahun anggaran 2016 lebih banyak (69 persen hingga 82 persen) dibandingkan dengan jumlah kepala sekolah (62 persen hingga 76 persen).

Persepsi, Tantangan, serta Kepuasan Kepala Sekolah dan Guru

Sebagian besar kepala sekolah melaporkan bahwa guru di sekolah mereka memiliki keterampilan mengajar yang baik atau sangat baik, namun sekolah mereka tidak memiliki cukup guru.

Tabel 33 melaporkan persepsi kepala sekolah tentang guru dan murid. Antara 61 persen (Sintang) hingga 87 persen (Manggarai Barat) kepala sekolah menganggap bahwa guru di sekolah mereka memiliki keterampilan mengajar yang baik atau sangat baik. Namun secara rata-rata, sekitar 71 persen kepala sekolah juga melaporkan bahwa sekolah mereka kekurangan guru, meskipun ini sangat bervariasi di seluruh kabupaten. Sebanyak 45 hingga 52 persen kepala sekolah di kabupaten NTT berpendapat demikian dibandingkan dengan 68 hingga 86 persen kepala sekolah di kabupaten Kalimantan Barat. Hasil dari regresi OLS multivariat (Tabel 58, dalam Lampiran A) menunjukkan bahwa kekurangan guru lebih banyak dilaporkan oleh kepala sekolah dan guru yang bekerja di sekolah dengan jumlah guru yang relatif sedikit dan murid yang terdaftar relatif lebih banyak. Selain itu, hasil OLS menunjukkan bahwa sekolah yang mengalami kesulitan akibat tingkat ketidakhadiran guru di kelas yang lebih tinggi cenderung melaporkan kekurangan guru sebagai tantangan sekolah mereka.

Secara khusus, kekurangan staf adalah masalah umum yang dilaporkan oleh sekolah-sekolah di daerah terpencil di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, Bank Dunia (2008) melaporkan bahwa 93 persen sekolah terpencil di daerah sampel mengklaim bahwa mereka kekurangan pegawai. Namun hasil tersebut sangat kontras dengan hasil dari sekolah sampel studi, seperti yang ditunjukkan pada Tabel 9. Sekolah sampel menunjukkan rasio murid-guru yang rendah yaitu 16 banding 1.

Secara umum, kepala sekolah memberikan penilaian yang baik atas murid di sekolah mereka.

Namun ada perbedaan yang jelas antara jumlah kepala sekolah yang menilai disiplin dan kehadiran murid sekolahnya baik atau sangat baik (74 persen) dan kepala sekolah yang menilai kemampuan murid mereka baik atau sangat baik (39 persen) (Tabel 33). Menurut para kepala sekolah, faktor utama yang menghambat pembelajaran murid terkait dengan lingkungan sekolah dan kesadaran orang tua, yaitu kurangnya sarana dan prasarana sekolah (66 persen), kurangnya kesadaran dan dukungan orang tua untuk anak-anak dalam pendidikan mereka (50 persen), kurangnya ketersediaan guru (32 persen), dan faktor geografis (30 persen). Terkait hal tersebut, saran utama yang diberikan oleh kepala sekolah tentang langkah-langkah potensial untuk meningkatkan pembelajaran murid adalah terkait

Tabel 33. Opini Kepala Sekolah tentang Guru dan Murid (% Kepala Sekolah)

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Opini tentang guru						
Keterampilan mengajar guru sekolah						
Sangat buruk/buruk	1	2	0	1	0	0
Baik/sangat baik	73	72	75	61	87	85
Sekolah kekurangan guru	71	68	81	86	45	52
Opini tentang murid						
Disiplin/kehadiran murid sekolah						
Sangat buruk/buruk	2	2	6	0,100	3	0
Baik/sangat baik	74	68	75	74	74	82
Tingkat kemampuan murid sekolah						
Sangat buruk/buruk	9	3	12	13	8	6
Baik/sangat baik	39	39	43	34	42	38
Faktor-faktor yang menghambat pembelajaran murid						
Kurangnya sarana dan prasarana sekolah	66	71	65	68	55	65
Kurangnya kesadaran orang tua	50	42	35	61	45	59
Kekurangan guru	32	29	43	47	5	12
Faktor geografis	30	19	22	45	26	26
Situasi ekonomi orang tua	27	27	20	23	24	53
Cara meningkatkan pembelajaran murid						
Menyediakan sarana/prasarana sekolah yang memadai	67	80	65	66	53	65
Meningkatkan kualitas guru	43	53	27	51	42	32
Meningkatkan dukungan orang tua untuk anak-anak	37	37	27	44	37	32
Menambah jumlah jam pelajaran	31	29	18	23	47	56
Memastikan ketersediaan guru yang cukup	27	24	39	38	8	12
Meningkatkan kerja sama antara sekolah, orang tua, dan pemerintah desa	24	22	10	36	18	21

sarana sekolah (67 persen), kualitas guru (43 persen), dukungan orang tua untuk anak-anak (37 persen), dan jam pelajaran (31 persen).

Tantangan paling signifikan yang dilaporkan oleh guru adalah tidak memadainya prasarana sekolah dan sarana belajar. Delapan puluh delapan persen guru melaporkan hal ini (Tabel 34), dan dua pertiga di antaranya mengatakan tantangan tersebut menghambat kinerja guru. Perangkat mengajar yang tidak cukup juga diakui oleh 87 persen guru, 75 persen di antaranya mengatakan hal ini merupakan tantangan yang menghambat kinerja. Kondisi kerja guru juga merupakan tantangan, terutama tingkat gaji yang rendah (77 persen), meskipun hanya dua perlima dari guru yang menganggap hal ini sebagai tantangan yang cukup menghambat kinerja guru. Ketidakteraturan pembayaran gaji memengaruhi 38 persen guru dalam sampel. Kekurangan guru berdampak pada setengah dari guru dalam sampel, dua pertiga di antaranya

melaporkan hal tersebut menghambat kinerja mereka. Guru menyebutkan beberapa tantangan terkait dengan murid dan perilaku mereka. Enam puluh delapan persen guru melaporkan kurangnya disiplin dan perhatian murid sebagai tantangan, sementara 57 persen melaporkan ketidakhadiran murid sebagai tantangan. Sekitar setengah dari guru-guru ini menganggap bahwa tantangan terkait murid menghambat kinerja. Kurangnya minat orang tua terhadap proses pendidikan anak-anak mereka juga merupakan tantangan bagi 58 persen guru dan kurangnya minat masyarakat merupakan tantangan bagi 41 persen guru.

Secara keseluruhan, para guru relatif puas dengan apresiasi yang mereka terima dari pemerintah pusat atas peran mereka. Seperti ditunjukkan dalam Tabel 35 (Lampiran A), 35 persen guru menilai kepuasan mereka dengan angka 6 atau 7, dalam skala 1 hingga 7 (7 adalah yang paling puas). Namun demikian, ada 15 persen guru yang merasa sangat tidak puas dan menilai

Tabel 34. Tantangan yang Dialami oleh Guru (% Guru)

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Tantangan yang dialami oleh guru dan memengaruhi kinerja						
Ketidaklaikan sarana/prasarana sekolah	88	85	90	89	86	91
Ketidaklaikan sarana/prasarana sekolah menghambat kinerja	68	66	71	69	67	67
Alat mengajar/materi pembelajaran yang tidak memadai	87	83	89	89	86	91
Alat mengajar/materi pembelajaran yang tidak memadai menghambat kinerja	74	70	74	76	73	73
Gaji yang tidak mencukupi	77	76	86	76	68	85
Gaji yang tidak mencukupi menghambat kinerja	40	38	43	41	35	44
Kurangnya disiplin dari murid	68	65	74	61	76	70
Kurangnya disiplin dari murid menghambat kinerja	53	52	52	52	50	63
Kurangnya perhatian murid selama kegiatan belajar	68	69	71	62	71	71
Kurangnya perhatian murid selama kegiatan belajar menghambat kinerja	57	55	55	58	55	61
Kurangnya minat dari orang tua murid	58	70	66	52	52	51
Kurangnya minat dari orang tua murid menghambat kinerja	64	63	69	66	55	66
Murid sering absen	57	60	70	51	51	58
Murid sering absen menghambat kinerja	53	48	53	51	56	62
Kekurangan guru	50	45	68	68	22	34
Kekurangan guru menghambat kinerja	65	61	73	68	51	56
Kurangnya minat dalam pendidikan dari masyarakat	41	48	49	34	41	40
Kurangnya minat dalam pendidikan dari masyarakat menghambat kinerja	56	55	64	58	45	54
Kurangnya kesempatan belajar dan pelatihan	41	49	44	33	39	44
Kurangnya kesempatan belajar dan pelatihan menghambat kinerja	64	68	68	62	60	60
Gaji yang tidak teratur	38	54	37	23	27	55
Gaji yang tidak teratur menghambat kinerja	45	41	60	39	43	47
Rumah jauh dari sekolah	23	19	29	17	26	33
Rumah jauh dari sekolah menghambat kinerja	48	38	52	57	44	47
Terlalu banyak tugas lain selain mengajar	21	25	22	19	16	24
Terlalu banyak tugas lain selain mengajar menghambat kinerja	45	44	49	45	40	45
Pembayaran tidak teratur dan kurangnya transparansi tunjangan khusus (TK)	14	19	13	14	11	14
Pembayaran tidak teratur dan kurangnya transparansi tunjangan khusus (TK) menghambat kinerja	31	29	28	33	29	34
Pembayaran tidak teratur dan kurangnya transparansi tunjangan profesional (TP)	7	10	5	6	5	6
Pembayaran tidak teratur dan kurangnya transparansi tunjangan profesional (TP) menghambat kinerja	30	36	29	22	13	50
Masalah dengan orang tua murid	7	8	6	6	6	8
Masalah dengan orang tua murid menghambat kinerja	52	62	53	62	16	52
Gangguan/permintaan berlebihan dari pejabat di luar sekolah	6	9	4	4	4	8
Gangguan/permintaan berlebihan dari pejabat di luar sekolah menghambat kinerja	55	56	45	65	42	52

kepuasan mereka dengan angka 1. Menariknya, ada sedikit perbedaan antar kabupaten dalam hal kepuasan keseluruhan guru dengan apresiasi pemerintah pusat atas pekerjaan mereka. Namun pemisahan status antara guru PNS dan non-PNS dalam hal ini memunculkan perbedaan yang jelas. Guru PNS jauh lebih puas dengan apresiasi yang ditunjukkan oleh pemerintah pusat — 53 persen dari mereka sangat puas dan hanya 19 persen memiliki tingkat kepuasan rendah atau sangat rendah. di antara guru non-PNS, masing-masing 23 persen dan 47 persen menyatakan tingkat kepuasan yang tinggi dan rendah hingga sangat rendah.

Para guru mengaku puas dengan kinerja dinas pendidikan kabupaten dalam penyelenggaraan sekolah dasar. di antara para guru, 38 persen menilai tingkat kepuasan mereka ada pada angka 6-7, sedangkan hanya 7 persen memberikan angka 1, dan ada sedikit perbedaan di antara lima kabupaten studi (Tabel 35, dalam Lampiran A). Untuk guru PNS dan guru non-PNS, masing-masing 4 persen dan 9 persen menyatakan tingkat kepuasan di angka 1. Empat puluh tujuh persen guru PNS menunjukkan tingkat kepuasan yang sangat tinggi dibandingkan dengan 32 persen guru non-PNS. Para guru melaporkan bahwa mereka juga puas dengan kinerja pemerintah desa dan anggota masyarakat (sebagai kategori bersama) yang membantu pengelolaan manajemen sekolah, dan menghargai peran mereka sebagai guru dari anggota masyarakat yang terlibat dalam manajemen sekolah. Namun tampaknya ada perbedaan yang mencolok antar kabupaten dalam tingkat kepuasan guru dengan apresiasi anggota masyarakat atas peran mereka. Lebih sedikit guru di Landak (sekitar 35 persen, PNS dan non-PNS) menilai tingkat kepuasan mereka ada di peringkat 6-7 pada kriteria ini dibandingkan dengan guru di kabupaten lain, yang hampir setengahnya menilai kepuasan mereka di peringkat 6-7.

Sebagian besar guru puas dengan penghasilan mereka, di mana guru PNS memiliki tingkat kepuasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan guru non-PNS. Secara keseluruhan, 53 persen dan 20 persen guru PNS dan non-PNS menyatakan tingkat kepuasan yang tinggi (6-7), sekali lagi dengan perbedaan besar antar kabupaten (Tabel 36, dalam Lampiran A). di antara guru-guru PNS, 38 persen di Landak dan 62 persen di Sintang, menyatakan kepuasan yang tinggi. di antara guru-guru non-PNS, hanya 10 persen di Manggarai Timur dan 28 persen di Ketapang menyatakan sangat puas dengan gaji/ honor mereka. Sekitar 13 persen guru secara keseluruhan melaporkan tingkat kepuasan yang sangat rendah (1). Namun, angka ini hanya terdiri dari 3 persen guru PNS dan 20 persen guru non-PNS. Ada

perbedaan yang lebih besar antar kabupaten, terutama dalam jumlah guru dengan tingkat kepuasan yang sangat rendah (1), yang berkisar antara 14 persen di Ketapang hingga 38 persen di Manggarai Timur.

Ketika ditanya tentang gaji ideal mereka, sebagian besar guru di sekolah sampel menginginkan gaji yang lebih tinggi daripada gaji mereka saat ini. Enam puluh tiga persen guru PNS dan 6 persen guru non-PNS menyatakan hal ini. Dua puluh persen guru mengatakan bahwa gaji mereka saat ini sangat ideal dan 20 persen guru di kabupaten NTT idealnya ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Jumlah guru PNS yang ingin mendapatkan gaji yang lebih tinggi berkisar antara 5 persen di Sintang hingga 17 persen di Manggarai Timur. di antara guru non-PNS, jumlahnya berkisar antara 4 persen di Landak dan 21 persen di Manggarai Timur dan Manggarai Barat.

Dapat disimpulkan bahwa, sejalan dengan perbedaan signifikan dalam hal gaji dan tunjangan, guru PNS melaporkan kepuasan yang lebih tinggi daripada guru non-PNS dengan dukungan otoritas di tingkat atas dan dengan insentif keuangan yang mereka terima. Masih harus dilihat apakah perbedaan tersebut juga menyebabkan perbedaan dalam kualitas kinerja antara guru PNS dan non-PNS. Secara keseluruhan, kepala sekolah dan guru sepakat melaporkan bahwa pembelajaran dipengaruhi oleh sarana sekolah yang buruk, yang mana hal ini diakui oleh kedua kelompok sebagai tantangan terbesar mereka. Kepala sekolah dan guru juga melaporkan kurangnya minat orang tua terhadap pendidikan anak-anak mereka sebagai tantangan yang signifikan dalam pembelajaran murid. Ini bisa jadi karena kurangnya ketersediaan informasi yang relevan bagi orang tua tentang kemajuan belajar anak-anak mereka (seperti kemampuan belajar, perilaku di sekolah, dan pemberian pekerjaan rumah), dan kurangnya kesadaran tentang cara untuk terlibat lebih aktif dalam proses pendidikan anak-anak mereka (seperti membaca dengan anak mereka, membantu mengerjakan PR, memastikan anak mereka tidak bekerja selama jam sekolah, dan memastikan bahwa anak-anak diberi makan). Studi ini dapat berkontribusi untuk menghasilkan perubahan dalam topik penting ini. yang menarik, kepala sekolah dan guru memiliki persepsi yang sangat berbeda tentang perilaku dan disiplin murid. Sebagian besar kepala sekolah menyatakan cukup puas dengan perilaku murid, sedangkan sebagian besar guru melaporkannya sebagai tantangan yang signifikan.



PERSEKUTUAN LEMBAGA CEMAS TERBUKA

1. Tujuan	2. Maksud
3. Sasaran	4. Manfaat
5. Waktu	6. Tempat
7. Cara	8. Biaya
9. Penanggung jawab	10. Penanggung jawab

PERSEKUTUAN LEMBAGA CEMAS TERBUKA

1. Tujuan	2. Maksud
3. Sasaran	4. Manfaat
5. Waktu	6. Tempat
7. Cara	8. Biaya
9. Penanggung jawab	10. Penanggung jawab

PERSEKUTUAN LEMBAGA CEMAS TERBUKA

1. Tujuan	2. Maksud
3. Sasaran	4. Manfaat
5. Waktu	6. Tempat
7. Cara	8. Biaya
9. Penanggung jawab	10. Penanggung jawab

PERSEKUTUAN LEMBAGA CEMAS TERBUKA

1. Tujuan	2. Maksud
3. Sasaran	4. Manfaat
5. Waktu	6. Tempat
7. Cara	8. Biaya
9. Penanggung jawab	10. Penanggung jawab

DIPERAGAKAN LEMAH

1. Tujuan

2. Maksud

3. Sasaran

4. Manfaat

5. Waktu

6. Tempat

7. Cara

8. Biaya

9. Penanggung jawab

10. Penanggung jawab

DIPERAGAKAN LEMAH

1. Tujuan

2. Maksud

3. Sasaran

4. Manfaat

5. Waktu

6. Tempat

7. Cara

8. Biaya

9. Penanggung jawab

10. Penanggung jawab

04

Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat dalam Pendidikan

Orang Tua

Latar Belakang Orang Tua

Sebagian besar orang tua berperan langsung mengasuh dan pendamping para murid, mempraktikkan agama mayoritas di desa mereka, dan menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia di rumah.

Tabel 37 menunjukkan karakteristik sosial ekonomi orang tua murid di sekolah sampel. Hampir seluruh murid (97 persen) tinggal bersama orang tua mereka. Hanya 181 *caretakers* atau 3 persen dari 5.400 *caretakers* yang disurvei, adalah wali murid. Enam puluh tiga persen wali murid adalah kakek-nenek dari anak-anak, dan 26 persen adalah paman atau bibi. Tidak mengherankan jika agama orang tua dalam sampel adalah, dan sebagian besar, agama-agama utama di desa tempat mereka tinggal, dengan Katolik sebagai agama yang paling banyak dianut orang tua murid dalam sampel. Namun demikian, ada perbedaan antara kedua kabupaten studi di NTT, di mana Katolik dianut 86 persen dan 99 persen orang tua, dan di Kalimantan Barat, dengan cukup banyak penganut agama Islam dan Protestan. Antara 14 persen dan 36 persen orang tua menganut agama Islam dan antara 13 persen hingga 39 persen menganut agama Protestan. Hanya sebagian kecil orang tua yang menggunakan bahasa Indonesia untuk berkomunikasi dengan anak mereka di rumah, dan ini lebih umum terjadi di Kalimantan Barat daripada di kabupaten NTT. di Kalimantan Barat, antara 58 dan 82 persen orang tua menggunakan bahasa Dayak, dan antara 7 persen dan 33 persen menggunakan bahasa Melayu, sebagai bahasa komunikasi pilihan dengan anak mereka. di NTT, 89-93 persen orang tua menggunakan bahasa Manggarai di rumah; sisanya menggunakan bahasa lokal lainnya.

Sebagian besar orang tua berlatar pendidikan sekolah dasar. di kabupaten Kalimantan Barat, antara 53 dan 59 persen orang tua berpendidikan sekolah dasar; 19 hingga 21 persen berpendidikan sekolah menengah pertama; dan 14 hingga 16 persen berpendidikan sekolah menengah atas (Tabel 37). di kabupaten NTT, sekitar 75 persen orang tua berpendidikan sekolah dasar; 13 hingga 15 persen berpendidikan sekolah menengah pertama; dan 8 hingga 10 persen berpendidikan sekolah menengah atas. di Sintang, 11 persen orang tua tidak pernah bersekolah. di kelima kabupaten, antara 7 persen dan 11 persen orang tua tidak dapat membaca dan menulis (menggunakan alfabet Latin).

Hampir semua orang tua bekerja, antara 80 dan 90 persen di sektor pertanian, dan sisanya menyebar antara sektor industri dan jasa.

Sebagian besar orang tua berwirausaha tanpa bayaran, mulai dari 31 persen di Ketapang hingga 68 persen di Manggarai Timur (Tabel 37). di kelima

Tabel 37. Informasi Latar Belakang Orang Tua (% Orang Tua)

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Caretaker utama						
Orang tua	97	97	98	97	97	95
Wali murid	3	3	2	3	3	5
Kakek dan nenek	63	50	85	57	65	73
Paman/bibi	26	30	15	27	26	24
Kakak/adik	6	5	0	12	4	3
Keluarga lain	4	10	0	5	0	0
Lainnya tetapi bukan keluarga	2	5	0	0	4	0
Karakteristik demografis (#)						
Usia orang tua (tahun)	37	37	37	36	39	40
Usia wali (tahun)	49	46	54	47	52	54
Rata-rata ukuran rumah tangga (#)	5	5	5	5	6	5
Rata-rata # anak	3	2	3	2	3	3
Agama						
Islam	18	36	16	14	14	1
Kristen - Protestan	21	13	32	39	0	0
Katolik	61	51	51	47	86	99
Lainnya	0	0	0	0	0	0
Bahasa utama yang digunakan untuk berkomunikasi dengan anak						
Bahasa Indonesia	7	9	8	9	1	1
Malay	12	33	13	7	0	0
Dayak	54	58	78	82	0	0
Manggarai	24	0	0	0	89	93
Lain-lain	3	1	1	2	10	6
Tingkat pendidikan tertinggi						
Tidak mengenyam pendidikan	6	5	5	11	2	2
Sekolah dasar	60	59	55	53	74	72
Sekolah menengah pertama	19	21	23	19	15	13
Sekolah menengah atas	13	14	16	14	8	10
Perguruan tinggi	2	2	1	3	1	3
Kemampuan Literasi						
Mampu membaca dan menulis alfabet Latin	84	83	87	80	90	86
Mampu membaca dan menulis alfabet non-Latin	2	1	1	4	0	4
Mampu membaca dan menulis beberapa huruf	3	7	1	3	0	1
Tidak dapat membaca atau menulis	9	7	8	11	8	8
Status dan sektor pekerjaan						
Bekerja sebulan terakhir	98	98	98	98	98	99
Bekerja di sektor pertanian	85	80	92	82	88	90
Bekerja di sektor industri dan konstruksi	7	7	4	9	6	4
Bekerja di sektor perdagangan dan jasa	8	12	4	9	6	5
Pekerjaan - posisi						
Wirausaha	18	23	19	17	18	9
Wirausaha dengan tenaga kerja tidak dibayar	53	31	49	60	64	68
Wirausaha dengan tenaga kerja dibayar	2	4	2	2	2	2
Pegawai swasta	20	33	28	13	10	16
Pegawai lepas	5	8	1	5	5	3
Pekerja tidak dibayar	1	1	1	1	1	1
Pegawai pemerintah	1	1	0	2	1	1

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Kepemilikan aset rumah tangga						
Rumah	95	93	97	94	96	98
Tanah untuk rumah	93	92	97	89	95	97
Unggas, ternak, atau ikan	70	72	78	67	63	69
Sofa	4	10	3	3	3	1
Meja	56	60	61	43	77	52
Kulkas	12	28	7	13	1	0
TV	49	73	58	57	15	12
Mobil	3	5	2	4	0	0
Motor	56	84	73	66	10	9
Sepeda	14	25	15	15	3	0

kabupaten, antara 9 persen hingga 23 persen melakukan wirausaha berbayar. Sebagian besar orang tua yang tidak berwirausaha adalah karyawan swasta—28 hingga 33 persen di kabupaten sampel Kalimantan Barat dan 10 hingga 16 persen di kabupaten sampel NTT.

Sebagian besar orang tua memiliki rumah berikut tanahnya, dan antara 63 persen hingga 78 persen memiliki unggas, ternak, atau ikan. Rata-rata orang tua di kabupaten Kalimantan Barat, terutama di Ketapang, memiliki beberapa peralatan rumah tangga, seperti televisi (73 persen orang tua di Ketapang), sepeda motor (84 persen), lemari es (28 persen), sepeda (25 persen), atau sofa (10 persen). di NTT, orang tua dalam sampel cenderung memiliki beberapa jenis aset — aset yang paling umum adalah meja (77 persen di Manggarai Barat dan 52 persen di Manggarai Timur). Rata-rata hanya 12-15 persen orang tua di kabupaten NTT memiliki televisi, dan sekitar 10 persen memiliki sepeda motor.

Dukungan Orang Tua Terhadap Anak dan Kegiatan di Rumah

Sebagian besar murid tinggal di dekat sekolah studi, namun mereka tidak mengenyam pendidikan anak usia dini. Namun hal ini bervariasi di seluruh kabupaten, dari 68 persen di Ketapang hingga 95 persen di Manggarai Barat. di Ketapang, 17 persen anak-anak mengikuti kelompok bermain dan 16 persen bersekolah di taman kanak-kanak (Tabel 38). Secara umum, tempat tinggal murid relatif dekat dengan sekolah mereka, rata-rata sekitar 600 meter. Anak-anak membutuhkan sekitar rata-rata 10 hingga 15 menit untuk sampai ke sekolah dan mayoritas tidak mengeluarkan biaya transportasi perjalanan ke/dari sekolah.

Menurut orang tua mereka, murid di daerah sampel menghabiskan banyak waktu untuk

bersekolah dan belajar, bersekolah hampir setiap hari dan belajar di rumah. Orang tua melaporkan bahwa kehadiran di sekolah relatif tinggi—rata-rata anak-anak bersekolah 5,62 hari dari 5,87 hari sekolah per minggu (Tabel 38). Sekitar 60 persen orang tua (mulai dari 36 persen di Manggarai Barat hingga 72 persen di Landak) melaporkan bahwa anak mereka belajar di rumah setiap hari, dan sisanya melaporkan bahwa anak mereka hanya kadang-kadang saja belajar di rumah. Menurut orang tua mereka, hanya 1 hingga 5 persen anak-anak tidak pernah belajar di rumah.

Para orang tua melaporkan bahwa mereka cukup mendukung aktivitas belajar anak-anak mereka di rumah. Sebagian besar, sekitar 80 persen, menyatakan membantu anak mereka belajar di rumah selama sekitar 48 menit per hari (rata-rata) selama minggu sebelumnya. Sekitar 34 persen orang tua melaporkan bahwa orang lain membantu anak mereka belajar selama seminggu terakhir. Bantuan itu tidak berbayar dan berlangsung selama rata-rata 33 menit setiap hari. Sekitar setengah orang tua di daerah sampel menyatakan kadang-kadang atau sering membaca buku teks anak mereka. di kabupaten Kalimantan Barat, sekitar 13 persen orang tua mengatakan tidak pernah membaca buku teks anak mereka dibandingkan dengan 24 hingga 27 persen di kabupaten NTT. Orang tua di kabupaten Kalimantan Barat juga meminta anak-anak mereka untuk lebih sering belajar (lebih dari lima hari seminggu) dibandingkan dengan orang tua di kabupaten NTT (sekitar empat hari per minggu). Mayoritas orang tua, dari 86 persen di Manggarai Barat hingga 96 persen di Sintang dan Manggarai Timur, menyatakan mengetahui mata pelajaran yang tidak dikuasai anak-anak mereka.

Keterlibatan anak dalam pekerjaan orang tua tidak terlalu umum di daerah sampel, meskipun sebagian besar anak membantu pekerjaan rumah tangga. Sekitar dua pertiga orang tua melaporkan

Tabel 38. Pendidikan Anak dan Keterlibatan Orang Tua

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Pendidikan anak usia dini yang diikuti (% orang tua melaporkan)						
Kelompok Bermain (KB)	7	17	6	3	4	6
Taman Kanak-kanak (TK)	10	16	7	14	2	1
Raudhatul Athfal (RA)	0	0	0	0	0	0
Tidak mengenyam PAUD	83	68	88	83	95	92
Jarak ke sekolah						
Median jarak dari rumah ke sekolah (km)	5.9	5.8	5.9	5.8	6.0	6.0
Median waktu perjalanan dari rumah ke sekolah (menit)	5.6	5.5	5.7	5.6	5.6	5.7
Median biaya transportasi dari rumah ke sekolah (Rp)						
Median distance from house to school (km)	0.3	0.3	0.3	0.300	0.5	0.5
Median travel time from house to school (minutes)	10	10	10	5	10	15
Median transportation cost from house to school (Rp)	0	0	0	0	0	0
Belajar di rumah (% orang tua yang melaporkan)						
Anak belajar di rumah setiap hari	58	61	72	57	36	59
Anak belajar di rumah kadang-kadang	39	37	26	40	58	39
Anak tidak pernah belajar di rumah	3	1	2	3	5	2
Anak dibantu oleh caretaker untuk belajar di rumah	82	88	81	82	78	76
Anak menerima bantuan dari caretaker dalam seminggu terakhir	74	79	74	77	67	66
Waktu yang dihabiskan caretaker setiap hari dalam seminggu terakhir, jika bantuan dari caretaker (menit)	48	45	47	45	55	52
Anak dibantu oleh orang lain untuk belajar di rumah seminggu terakhir	34	40	28	29	31	46
Waktu yang dihabiskan setiap hari dalam seminggu terakhir, jika dibantu oleh orang lain (menit)	33.480	30.220	34.860	30.670	38.380	38
Caretaker membayar orang lain untuk membantu anak, jika dibantu oleh orang lain	1	0	2	2	0	0
Jumlah yang dibayarkan kepada orang lain untuk membantu anak per kunjungan, jika dibayar (Rp)	27.521	83.300	32.650	19.375	1.000	0
Kesadaran orang tua akan kinerja anak di sekolah (% orang tua melaporkan)						
Frekuensi membaca buku teks anak						
Tidak pernah	16	12	14	12	27	24
Jarang	19	23	19	17	14	19
Terkadang/sering	53	52	60	56	43	46
Anak tidak punya buku	7	6	3	7	11	6
Orang tua tidak bisa membaca	6	7	4	8	5	5
Orang tua tahu mata pelajaran yang tidak dikuasai anak	93	92	91	96	86	96
Rata-rata # hari dalam seminggu orang tua meminta anak untuk belajar	5	6	5	6	4	5

bahwa anak mereka membantu pekerjaan rumah tangga selama sebulan terakhir (Tabel 39). Anak-anak lebih umum membantu pekerjaan rumah tangga di kabupaten NTT--85 hingga 90 persen orang tua melaporkan bahwa anak mereka mengerjakan tugas rumah tangga sekitar lima jam seminggu dibandingkan dengan 55 hingga 72 persen di kabupaten Kalimantan Barat (sekitar dua hingga empat jam seminggu). Anak-anak bekerja dalam

usaha keluarga di 19 persen rumah tangga di Ketapang, 14 persen di Manggarai Barat dan Manggarai Timur, 10 persen di Sintang, dan 5 persen di Landak. Rata-rata anak-anak menghabiskan sekitar delapan jam per minggu bekerja di usaha keluarga, yang memerlukan waktu perjalanan satu arah sekitar 20 menit. Anak-anak yang bekerja untuk mendapatkan bayaran bukan hal yang umum di daerah sampel, dengan jumlah jam kerja

berbayar mingguan bervariasi dari empat jam di Landak hingga delapan jam di Sintang dan Ketapang. Penghasilan bulanan yang diterima oleh anak-anak yang bekerja untuk mendapatkan bayaran berkisar dari Rp34.500 di Landak hingga Rp81.000 di Ketapang.

Ekspektasi orang tua terhadap anak-anak mereka

Orang tua di daerah sampel berharap anak-anak mereka dapat membaca, menulis, dan berhitung, bersekolah setiap hari, dan naik kelas di sekolah.

di Manggarai Barat, hampir 60 persen orang tua melaporkan bahwa mereka berharap anak-anak mereka dapat membaca, menulis, dan berhitung (Tabel 40). di Ketapang dan Landak, harapan utama dari orang tua adalah agar anak-anak mereka mendapatkan nilai yang tinggi, menjadi juara kelas, dan mengikuti perlombaan. di Sintang, orang tua mengharapkan anak-anak mereka dapat bersekolah setiap hari dan memiliki prestasi yang baik. di kelima kabupaten, antara 28 dan 45 persen orang tua berharap anak-anak mereka akan naik kelas.

Semua orang tua dalam sampel survei mengharapkan anak-anak mereka dapat melanjutkan pendidikan setelah lulus dari sekolah dasar. Sekitar 43 persen orang tua mengharapkan anak-anak mereka bisa berkuliah. Rata-rata sekitar 20 persen orang tua mengharapkan anak-anak mereka mencapai sekolah menengah atas, mulai dari 16 persen

di Manggarai Barat hingga 31 persen di Manggarai Timur. Antara 12 dan 24 persen orang tua menyerahkan hal ini kepada anak-anak mereka.

Salah satu pertanyaan dalam survei adalah apa yang akan orang tua lakukan jika anak mereka tinggal kelas. Sekitar 90 persen orang tua mengatakan mereka akan memberikan nasihat atau menegur anak mereka secara lisan, sebagaimana diperlukan. Sebaliknya, 6 persen orang tua melaporkan bahwa mereka tidak akan melakukan apa pun atau bertanya kepada staf pengajar tentang hal itu. Sembilan dan 4 persen orang tua di Manggarai Barat dan Manggarai Timur masing-masing menyatakan bahwa mereka akan memberikan hukuman fisik kepada anak-anak mereka. di kabupaten lain, proporsi ini lebih rendah, yakni sekitar 2 persen.

Komite Sekolah

Latar Belakang dan Pendirian Komite

Sejak 2002, komite sekolah secara resmi dibentuk sebagai lembaga yang mewakili masyarakat di tingkat sekolah. Ini merupakan konsekuensi dari Keputusan Menteri Pendidikan Indonesia Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan mengikuti prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Tujuan dari aturan ini adalah agar komite sekolah mendukung peningkatan penyediaan layanan pendidikan.

Tabel 39. Keterlibatan Anak dalam Pekerjaan Berbayar, Tidak Berbayar, dan Rumah Tangga

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Pekerjaan berbayar						
Anak bekerja untuk mendapatkan bayaran dalam sebulan terakhir	3	8	1	2	4	3
# Jam mingguan dalam sebulan terakhir, jika bekerja untuk mendapatkan bayaran	8	8	4	8	8	6
Median penghasilan bulanan dari pekerjaan, jika bekerja untuk mendapatkan bayaran (Rp)	30.000	40.000	15.000	3.000	22.000	11.250
Waktu perjalanan satu arah untuk pergi bekerja, jika bekerja untuk mendapatkan bayaran (menit)	16	14	16	13	19	20
Tidak berbayar, bekerja untuk usaha keluarga						
Anak bekerja untuk usaha keluarga dalam sebulan terakhir	12	19	5	10	14	14
# jam mingguan dalam usaha keluarga bulan lalu, jika bekerja untuk keluarga	8	8	7	7	6	11
Waktu perjalanan satu arah untuk menuju usaha keluarga, jika bekerja untuk keluarga (menit)	19	18	18	19	17	25
Pekerjaan rumah tangga						
Anak membantu pekerjaan rumah tangga dalam sebulan terakhir	67	72	55	56	85	90
# Jam mingguan yang dihabiskan untuk melakukan pekerjaan rumah, jika melakukan pekerjaan rumah	4	2	4	4	5	5

Tabel 40. Ekspektasi Orang Tua Terhadap Pendidikan Anak

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Ekspektasi - prestasi anak di sekolah						
Hadir di sekolah setiap hari	40	38	25	44	36	61
Bisa naik ke kelas berikutnya	36	34	45	32	41	28
Mendapatkan nilai tinggi/menjadi juara kelas/mengikuti kompetisi	47	56	51	43	47	38
Bisa membaca/menulis/berhitung	43	42	35	39	57	51
Lainnya	6	16	3	4	3	3
Tidak ada	1	1	0	2	2	0
Ekspektasi - tingkat pendidikan tertinggi anak						
Lulus dari sekolah dasar	1	2	0	1	1	3
Sekolah menengah pertama	3	3	2	2	3	4
Sekolah menengah atas	19	17	20	17	16	31
Perguruan tinggi/universitas	43	38	42	42	48	46
Terserah anak	16	16	19	14	24	12
Setinggi mungkin	18	24	17	25	8	4
Tindakan yang diharapkan jika anak tinggal kelas						
Memberikan saran atau teguran pada anak secara verbal	90	89	90	89	92	90
Memberikan hukuman fisik	3	2	2	1	9	4
Memberikan hukuman non-fisik	2	3	2	2	3	1
Bertanya kepada guru/guru kelas/kepala sekolah	6	9	5	4	7	7
Tidak melakukan apapun	6	4	6	8	5	5
Lainnya	3	8	2	2	2	1

Secara khusus, komite diharapkan akan memantau dan memberikan masukan tentang pengelolaan sekolah (termasuk program, rencana anggaran, peningkatan sarana, dan pelatihan guru), sekaligus secara formal melibatkan orang tua dan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah anak-anak mereka.

Sebagian besar sekolah di daerah sampel memiliki komite sekolah yang aktif, dan sebagian besar komite sekolah mengelola satu sekolah. di antara 270 sekolah yang termasuk dalam studi ini, 254 memiliki komite sekolah aktif, 14 memiliki komite yang tidak aktif, dan dua tampaknya tidak memiliki komite saat survei dilaksanakan (Tabel 41, Lampiran A). Dari 241 sekolah dengan komite aktif (kami memiliki informasi tentang tanggal pendirian mereka), 20 persen didirikan pada tahun 2016-2017, 63 persen pada tahun 2010-2015, 14 persen pada tahun 2005-2009, dan 4 persen sebelum tahun 2005. Sebagian besar komite sekolah aktif (93 persen) hanya mengelola satu sekolah. Untuk menjalankan fungsi komite sekolah, 15 persen memiliki anggaran dasar atau anggaran rumah tangga; 12 persen menerima dana untuk pelaksanaan kegiatan dari sekolah selama tahun akademik 2015/16; dan 2 persen (lima komite) diberi ruang kantor oleh sekolah.

Manajemen Komite

Sebagian besar responden komite sekolah telah bekerja selama lima tahun, dengan mayoritas dari mereka telah lulus dari sekolah menengah atas.

Sebagian besar responden adalah ketua dan beberapa wakil ketua, sekretaris, anggota, dan bendahara. Rata-rata, responden telah menempati posisi mereka di komite sekolah selama kurang lebih lima tahun (Tabel 42). Tingkat pendidikan tertinggi dari responden komite adalah pendidikan menengah atas (36 persen), pendidikan menengah pertama (27 persen), pendidikan dasar (24 persen), dan pendidikan tingkat universitas (6 persen). Sekitar 9 persen responden juga adalah pengurus atau anggota komite sekolah lainnya.

Sebagian besar anggota komite sekolah dipilih secara demokratis. Kuesioner komite sekolah berisi pertanyaan tentang komposisi komite sekolah dan bagaimana anggota komite dipilih. Menurut Chen (2011), komite sekolah harus diketuai oleh perwakilan masyarakat dari luar sekolah dan harus memiliki setidaknya sembilan anggota yang dipilih dari pihak orang tua, tokoh masyarakat, profesional pendidikan, sektor swasta, asosiasi pendidikan, guru, organisasi non-

pemerintah, dan perangkat desa. Secara keseluruhan, pengurus komite di sekolah sampel sebagian besar dipilih melalui proses rapat komite (88 persen dari komite dalam sampel); dan yang lainnya ditunjuk

langsung oleh sekolah (10 persen). Rapat pemilihan pengurus komite dilaporkan dihadiri oleh kepala sekolah (93 persen komite), guru (95 persen), orang tua (88 persen), perangkat dan kepala desa (72 persen),

Tabel 42. Manajemen Komite Sekolah (% Responden Komite)

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Karakteristik responden						
Jenis responden						
Ketua	86	79	94	89	94	73
Wakil ketua	6	11	2	4	0	12
Sekretaris	4	5	2	1	6	9
Bendahara	1	0	2	1	0	0
Anggota	4	5	0	5	0	6
Lama responden memegang peran saat ini (tahun)	5	3	5	3	8	6
Tingkat pendidikan responden						
Tidak lulus sekolah dasar	6	7	2	6	11	0
Sekolah dasar	24	30	19	26	23	21
Sekolah menengah pertama	27	34	25	24	29	24
Sekolah menengah atas	36	21	52	35	34	39
Perguruan tinggi	6	5	0	7	3	12
Paket a/b/c	2	2	2	1	0	3
Responden adalah anggota/pengurus komite untuk sekolah lain	9	16	8	4	9	12
Pembentukan manajemen komite						
Pemilihan pengurus komite						
Pemilihan melalui rapat	88	88	81	87	91	97
Ditunjuk oleh sekolah (kepala sekolah dan guru)	10	11	19	11	6	0
Ditunjuk oleh anggota/pengurus sebelumnya	1	0	0	1	0	3
Lainnya	1	2	0	1	3	0
Kepala sekolah						
Guru	93	96	87	96	94	91
Orang Tua	95	96	87	97	100	94
Pejabat desa/tokoh masyarakat	88	92	97	82	90	81
Anggota komite sebelumnya	72	78	56	77	81	63
Previous committee members	49	33	38	72	45	38
Pemilihan ketua komite pada saat rapat						
Musyawarah tanpa pemungutan suara (konsensus)	24	29	31	27	16	9
Pemungutan suara	75	71	64	73	84	91
Ditunjuk oleh kepala sekolah	1	0	5	0	0	0
Pemilihan pengurus komite lain pada saat rapat:						
Musyawarah tanpa pemungutan suara (konsensus)	29	31	26	39	16	25
Pemungutan suara	52	51	46	40	65	72
Ditunjuk oleh kepala sekolah	3	0	13	3	0	0
Ditunjuk oleh ketua	9	12	3	11	13	3
Ditunjuk oleh orang lain	1	0	3	1	3	0
Hanya ada ketua dalam struktur komite	5	6	10	6	3	0

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Sumber dana komite						
Pengurus/anggota komite menerima gaji	18	9	31	22	11	9
Gaji bulanan rata-rata (Rp)	100.000	100.000	100.000	100.000	58.334	50.000
Sumber insentif:						
Orang Tua	4	0	0	0	25	33
Anggaran sekolah	9	0	7	11	25	0
Dana Bantuan Operasional Sekolah	82	80	93	78	75	67
Sumber lain	4	20	0	0	25	0
Tidak tahu	4	0	0	11	0	0

dan anggota komite sebelumnya (49 persen). Selama rapat pemilihan ini, ketua dipilih melalui pemungutan suara atau konsensus, sedangkan pengurus lain dipilih melalui pemungutan suara, ditunjuk melalui konsensus, atau ditunjuk oleh ketua. Lima persen komite di sekolah sampel hanya memiliki ketua tanpa anggota komite lainnya. Menariknya, Pradhan et al. (2014) menguji efektivitas berbagai reformasi kelembagaan komite sekolah dan menemukan bahwa pemilihan anggota komite tidak mengarah pada peningkatan dalam pembelajaran murid, meskipun hal itu meningkatkan kesadaran masyarakat. Temuan ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat saja tidak memberikan komite legitimasi dan kekuatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan penyediaan layanan pendidikan.

Delapan belas persen komite melaporkan bahwa pengurus dan ketua menerima gaji atas peran mereka dalam komite. di Kalimantan Barat, rata-rata gaji bulanan untuk pengurus atau ketua adalah Rp100.000. di kabupaten NTT jauh lebih rendah, yaitu Rp50.000 hingga Rp60.000. Insentif untuk pengurus dan ketua komite berasal dari dana Bantuan Operasional Sekolah untuk 82 persen komite sekolah yang memberikan gaji kepada pengurus mereka dan dari anggaran sekolah untuk 9 persen komite. di kabupaten NTT, dana untuk pengurus dan/atau insentif ketua berasal dari orang tua di dua sekolah di kabupaten tersebut.

Keterlibatan Orang Tua dan Komite di Sekolah

Keterlibatan Orang Tua dan Komite di Sekolah

Orang tua di sekolah studi secara aktif terlibat dalam urusan sekolah. Lebih dari empat perlima orang tua dalam survei sampel mengunjungi sekolah anak mereka selama tahun akademik 2015/16 (Tabel

43). Namun keterlibatan orang tua dalam urusan bidang studi cenderung terbatas pada interaksi dengan guru atau kepala sekolah tentang masalah yang berkaitan dengan anak mereka sendiri, sebagaimana tercermin dalam temuan serupa oleh penelitian lain.⁵⁰ di antara mereka yang mengunjungi sekolah anak mereka selama tahun akademik 2015/16, 17 persen mendiskusikan hasil ujian anak mereka dengan kepala sekolah, 23 persen dengan guru kelas anak mereka, dan 10 persen dengan guru lain. Lima belas, 12, dan 6 persen orang tua mendiskusikan perkembangan pembelajaran anak mereka secara keseluruhan dengan kepala sekolah, guru kelas, atau guru lain. Sekitar 11 persen orang tua melaporkan telah mendiskusikan kedisiplinan dan/atau kehadiran anak mereka di sekolah dengan kepala sekolah, 9 persen dengan guru kelas, dan 5 persen dengan guru lain. di kabupaten NTT, orang tua berdiskusi dengan kepala sekolah (20 hingga 33 persen), guru kelas (13 persen), dan guru lain (10 hingga 13 persen) mengenai bagaimana mereka atau komite sekolah dapat berkontribusi pada pendidikan anak mereka.

Sebagian besar komite sekolah melaporkan mengadakan setidaknya satu kali rapat tahunan untuk membahas berbagai topik. Hampir empat perlima komite sekolah mengadakan setidaknya satu kali rapat dengan kepala sekolah, orang tua, atau kepala sekolah dan orang tua sekaligus selama tahun akademik 2015/16. Selama tahun akademik 2015/16, 35 persen dari komite melaporkan hanya bertemu dengan kepala sekolah, dan di antara komite ini, 48 persen telah bertemu di bulan sebelumnya. Responden komite melaporkan bahwa mereka membahas topik-topik seperti persiapan evaluasi murid (84 persen dari komite), saran dan keluhan dari orang tua (83 persen), anggaran sekolah dan sumber daya keuangan (77 persen), hasil belajar murid (76 persen), kedisiplinan dan perilaku murid (76 persen), serta kedisiplinan dan

⁵⁰ Chen 2011; Vernez, Karam, and Marshall 2012.

Tabel 43. Keterlibatan Orang Tua di Sekolah, 2015/16 (% Orang Tua)

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Orang tua berkunjung ke sekolah pada 2015/16	82	82	80	82	85	82
Diskusi dengan kepala sekolah, jika berkunjung ke sekolah						
Hasil ujian anak	17	19	13	23	12	12
Pengembangan pembelajaran anak secara keseluruhan	15	13	10	24	10	9
Disiplin/kehadiran anak di sekolah	11	9	8	15	7	10
Kinerja guru/kualitas pengajaran di sekolah	5	4	4	7	5	3
Kontribusi komite/orang tua	13	5	2	13	20	33
Lainnya	3	2	4	3	4	4
Diskusi dengan guru kelas, jika berkunjung ke sekolah						
Hasil ujian anak	23	31	17	27	14	14
Pengembangan pembelajaran anak secara keseluruhan	12	11	8	19	12	6
Disiplin/kehadiran anak di sekolah	9	8	6	13	7	7
Kinerja guru/kualitas pengajaran di sekolah	3	2	2	3	4	0
Kontribusi komite/orang tua	7	2	1	7	13	13
Lainnya	1	1	1	1	2	2
Diskusi dengan guru kelas, jika pergi ke sekolah						
Hasil ujian anak	10	13	4	13	7	9
Pengembangan pembelajaran anak secara keseluruhan	6	6	2	9	7	4
Disiplin/kehadiran anak di sekolah	5	4	2	8	5	4
Kinerja guru/kualitas pengajaran di sekolah	2	2	1	3	4	1
Kontribusi komite/orang tua	5	1	0	5	13	10
Lainnya	1	1	1	1	2	1

perilaku guru (68 persen) (Tabel 44, dalam Lampiran A). Rapat-rapat ini dilaksanakan secara eksklusif atas inisiatif kepala sekolah di 40 persen komite.

Hampir semua komite sekolah memberikan saran dan umpan balik ke sekolah-sekolah, dengan sebagian besar di antaranya dilaksanakan oleh sekolah. Dua puluh satu persen komite sekolah mengadakan rapat internal selama tahun akademik 2015/16 dan 91 persen rapat internal menghasilkan saran atau umpan balik untuk sekolah. Saran dan umpan balik yang dihasilkan oleh rapat internal komite terutama menyangkut rehabilitasi prasarana dan furnitur (63 persen), pentingnya peningkatan disiplin guru dan/atau murid (46 persen), proses belajar mengajar (29 persen), dan pentingnya peningkatan kualitas guru (17 persen). Dari komite-komite yang mengajukan saran ke sekolah mereka, 81 persen melaporkan bahwa sekolah telah menerapkan beberapa saran mereka, khususnya yang menyangkut pentingnya peningkatan disiplin guru dan/atau murid, rehabilitasi prasarana sekolah (33 persen), dan proses belajar mengajar (23 persen).

Singkatnya, orang tua dan komite sekolah tampak terlibat dalam urusan sekolah anak-anak mereka,

berdasarkan laporan dari mereka. Temuan ini berbeda dari Vernez, Karam, dan Marshall (2012), yang menemukan keterlibatan minimal dari komite sekolah dan orang tua dalam urusan sekolah dan menganggap “keduanya menyatakan sikap tidak campur tangan dengan masalah sekolah dan rasa hormat kepada staf sekolah.” Vernez, Karam, dan Marshall (2012) juga tidak menemukan komite terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan kegiatan sekolah. dalam penelitian mereka, kelompok fokus menyatakan bahwa angka 44 persen kepala sekolah yang melaporkan keterlibatan komite sekolah dalam pengambilan keputusan terlalu tinggi. dalam sampel Vernez, Karam, dan Marshall (2012) di 400 sekolah dasar negeri di seluruh Indonesia, kepala sekolah hanya mempertimbangkan komite sekolah sebagai sarana perantara untuk menginformasikan orang tua tentang keputusan sekolah.

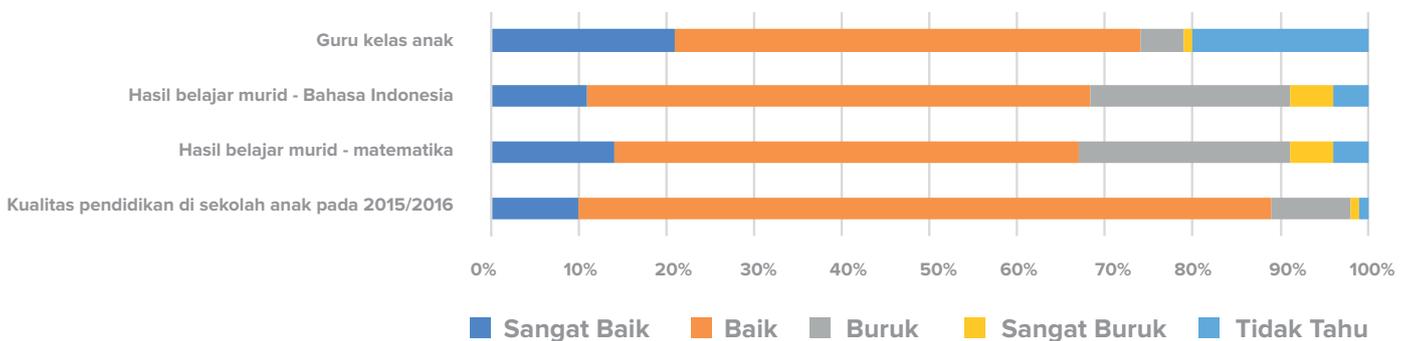
Kepuasan Orang Tua

Sebagian besar orang tua menyatakan puas dengan kualitas pendidikan yang tersedia desa mereka. Delapan belas persen mengatakan sangat puas (tingkat kepuasan 7, pada skala 1-7), dan 65

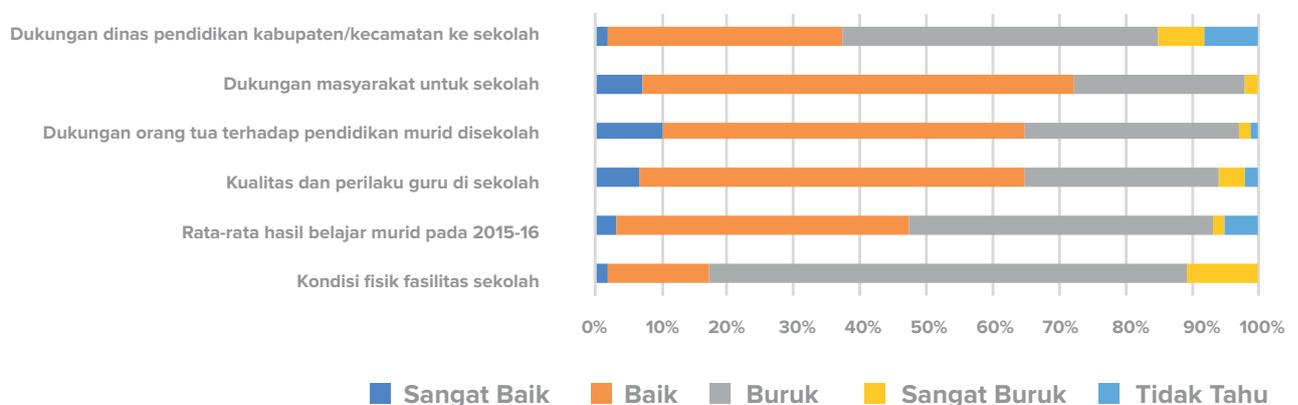
persen puas (tingkat kepuasan 4, 5, atau 6) (Gambar 8). Sepuluh persen orang tua menilai kualitas pendidikan di sekolah anak mereka (selama tahun akademik 2015/16) sangat baik, sementara 79 persen orang tua menilai baik. Dibandingkan dengan tahun akademik 2014/15, kualitas pendidikan pada tahun 2015/16 dianggap lebih baik atau sama baiknya oleh 26 dan 66 persen orang tua. Menurut Chen (2011), kepuasan paradoksal orang tua terhadap kualitas pendidikan di sekolah anak mereka, mengingat interaksi dan keterlibatan mereka yang terbatas dengan sekolah, menimbulkan keraguan mengenai apakah peningkatan akuntabilitas sekolah kepada orang tua di Indonesia akan efektif, mengingat adanya kesan kuat masyarakat dan kecenderungan orang untuk tidak mengeluh atau mengungkapkan ketidakpuasan secara terbuka.

Kepuasan orang tua terhadap guru kelas anak mereka juga relatif tinggi, dengan 21 persen merasa sangat puas dan 53 persen merasa puas. Namun sekitar 20 persen menjawab bahwa mereka tidak tahu apakah mereka puas dengan guru kelas anak mereka sehingga tidak dapat memberikan jawaban.

Gambar 8. Kepuasan Orang Tua Terhadap Kualitas Pendidikan dan Hasil Belajar Murid



Gambar 9. Kepuasan Komite Sekolah Terhadap Kualitas Pendidikan dan Sekolah



Dibandingkan dengan laporan yang disebutkan di atas tentang kepuasan orang tua dengan pendidikan secara keseluruhan,⁵¹ tampaknya kepuasan orang tua di daerah sampel lebih rendah dalam menilai hasil belajar anak-anak mereka dalam matematika dan bahasa Indonesia—sekitar 24 persen orang tua menilai hasil mereka buruk, dan 5 persen menilai sangat buruk.

Kepuasan Komite

Komite sekolah di wilayah studi relatif puas dengan kualitas pendidikan dan sekolah. Secara khusus, komite sekolah sangat puas dengan dukungan masyarakat dan orang tua terhadap sekolah dan kualitas dan perilaku guru (Gambar 9). Namun kepuasan mereka terhadap rata-rata hasil belajar murid selama tahun 2015/16 lebih terbatas—44 persen merasa puas dan 45 persen merasa tidak puas. Hampir setengah dari komite sekolah merasa bahwa dukungan dari dinas pendidikan kabupaten dan kecamatan tidak memuaskan, dan hampir tiga perempat tidak puas dengan kondisi fisik sarana sekolah, yang merupakan cerminan dari ketidakpuasan kepala sekolah dan guru.

⁵¹ Chen 2011.

05

Ketidakhadiran Guru di Kelas

Definisi dan Statistik

Definisi dan Pengukuran

Laporan ini menyajikan tingkat ketidakhadiran guru di kelas dan di sekolah.

Bagian ini melaporkan ketidakhadiran guru di kelas di kelas, yaitu jumlah kelas yang ditemukan tanpa guru. Murid yang dibiarkan tanpa guru merupakan masalah terbesar yang dihadapi sekolah-sekolah di Indonesia. Selain itu, beberapa hal lain tentang ketidakhadiran guru di kelas dilaporkan untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang ketidakhadiran guru di kelas, sejalan dengan penelitian sebelumnya tentang hal ini.⁵² Ketidakhadiran guru di sekolah didefinisikan sebagai jumlah guru yang tidak ada di sekolah pada hari kunjungan. Ketidakhadiran guru di kelas didefinisikan sebagai jumlah guru yang tidak ada di kelas, meskipun mereka berada di sekolah.⁵³

Tidak Adanya Kelas atau Kelas Tanpa Kehadiran Guru

Selama kunjungan mendadak ke sekolah sampel, pencacah secara langsung mengamati 1.705 kelas, yang hampir seperempatnya tanpa kehadiran guru di kelas. Tabel 45 menunjukkan bahwa 398 kelas (rata-rata 23 persen) ditemukan tanpa guru. Jumlah ini sangat bervariasi antar kabupaten, dari 14 persen kelas di Sintang hingga 32 persen di Ketapang. Namun guru yang tidak hadir secara fisik kembali ke kelas sebelum pengamatan pencacah di 327 kelas (19 persen dari semua kelas yang diamati) berakhir.

Studi sebelumnya tentang ketidakhadiran guru di Kelas di Indonesia telah menemukan tingkat ketidakhadiran guru di kelas yang relatif tinggi, meskipun ada sedikit perbaikan dalam beberapa tahun terakhir.⁵⁴ Sebagai contoh, Usman, Akhmadi, dan Suryadarma (2004) menemukan bahwa hampir satu dari lima (19 persen) guru di sekolah dasar negeri Indonesia tidak hadir di ruang kelas. Namun Toyamah et al. (2010) kemudian menemukan penurunan tingkat ketidakhadiran guru di kelas secara keseluruhan sebesar 14 persen. Secara khusus, ketidakhadiran guru di kelas yang lebih rendah ditemukan secara langsung berkaitan dengan pengawasan yang lebih teratur terhadap sekolah, gaji yang lebih tinggi, dan kesejahteraan guru yang meningkat secara keseluruhan. Sebagai perbandingan, laporan ini menunjukkan bahwa tingkat ketidakhadiran guru di kelas pada daerah terpencil masih tetap di angka 23 persen. dalam studi terkait lainnya, UNICEF (2012), yang berfokus pada provinsi Papua,

⁵² ACDP 2014.

⁵³ Untuk memungkinkan perbandingan tingkat ketidakhadiran guru di kelas dengan hasil studi sebelumnya, semua angka ketidakhadiran guru di kelas dinyatakan sebagai proporsi dari semua guru yang dilaporkan dijadwalkan untuk mengajar selama periode pengamatan. dalam sampel studi, berdasarkan laporan kepala sekolah, 1.687 guru dilaporkan dijadwalkan untuk mengajar pada waktu pengamatan dan jumlah ini mendekati jumlah kelas yang diamati pada hari pelaksanaan survei.

⁵⁴ ACDP 2014; Chaudhury et al. 2006.

Tabel 45. Kelas yang Diamati tanpa Kehadiran Guru

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Kelas diamati tanpa kehadiran guru						
# Kelas diamati	1.705	367	301	545	249	243
Kelas diamati tanpa guru (#)	398	118	81	79	65	55
Kelas diamati tanpa guru (%)	23	32	27	14	26	23
Kelas tanpa guru, guru kembali sebelum pengamatan berakhir (#)	327	87	75	67	58	40
Kelas tanpa guru, guru kembali sebelum pengamatan berakhir (%)	19	24	25	12	23	16
Kegiatan murid selama pengamatan						
Kegiatan murid di kelas bersama guru						
Sesi belajar di kelas	88	89	85	85	92	95
Kelompok diskusi	2	2	3	1	0	1
Pekerjaan individu	9	7	11	12	5	4
Ujian/tes	1	1	0	1	2	1
Tidak ada kegiatan yang terstruktur dengan jelas	1	1	1	1	1	0
Kegiatan murid di kelas tanpa guru						
Sesi belajar di kelas	3	3	1	1	3	11
Kelompok diskusi	6	4	6	4	6	11
Pekerjaan individu	48	51	59	47	32	45
Ujian/tes	1	1	0	0	0	2
Tidak ada kegiatan yang terstruktur dengan jelas	41	41	30	46	58	31
Semua murid tidak hadir	2	1	4	3	0	0

menemukan tingkat ketidakhadiran guru di kelas di sekolah sebesar 37 persen dan angka yang hampir mendekati 50 persen di kabupaten-kabupaten di dataran tinggi Papua. Baru-baru ini, ACDP (2014) mencatat tingkat ketidakhadiran guru di sekolah secara nasional 10 persen, dengan tingkat ketidakhadiran di daerah-daerah terpencil hampir mendekati 20 persen dan tingkat ketidakhadiran guru di kelas sekitar 13 persen.

di 85 hingga 90 persen kelas dengan kehadiran guru, murid-murid terlibat dalam kegiatan pembelajaran. di kelas-kelas ini, antara 4 persen (Manggarai Timur) dan 12 persen (Landak) murid bekerja secara individu (Tabel 45). di kelas tanpa guru, murid ditemukan terlibat dalam pekerjaan individu di 48 persen kelas dan murid tidak terlibat dalam kegiatan yang terstruktur dengan jelas di 41 persen kelas. Pada sekitar 2 persen dari kelas tanpa guru, semua murid telah meninggalkan sekolah sebelum pencacah tiba (mulai dari tidak ada sama sekali di kabupaten NTT hingga 4 persen dari kelas yang ditemukan tanpa guru di Landak). Pada akhir kunjungan pencacah, 4 persen dari semua kelas yang diamati (71 kelas) masih juga tidak diawasi oleh guru mana pun.

Ketidakhadiran Guru di Sekolah

Pada hari survei, 2.210 guru (dan kepala sekolah) dijadwalkan untuk bekerja, namun 421 dari mereka yang dijadwalkan mengajar tidak hadir di sekolah (Tabel 46). Temuan ini mirip dengan temuan ACDP (2014) tentang sekitar 20 persen ketidakhadiran guru di sekolah di daerah terpencil. Rata-rata guru yang absen tidak hadir selama rata-rata delapan hari sejak kehadiran terakhir mereka, mulai dari tiga hari di Sintang hingga 11 hari di Landak. Kurang dari setengah guru yang ditemukan absen sudah tidak hadir lebih dari dua hari.

di antara para guru yang absen dari sekolah ketika mereka dijadwalkan hadir, mereka dilaporkan sedang mengerjakan tugas, sakit atau cuti, atau memiliki alasan yang tidak diketahui. Sekitar 30 persen dilaporkan mengerjakan tugas terkait sekolah (Tabel 46). di kabupaten Kalimantan Barat, sekitar seperempat guru yang absen tidak hadir karena alasan ini. Jumlah ini lebih tinggi (40 persen) di kabupaten NTT. Alasan paling signifikan kedua tentang ketidakhadiran guru dari sekolah adalah sakit (14 persen) dan alasan lain (14 persen). Rata-rata 7 persen guru absen tanpa alasan yang diketahui, dengan angka tertinggi di Landak, yakni

Tabel 46. Ketidakhadiran Guru di Sekolah

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
# guru						
Total # guru yang terdaftar di sekolah (termasuk kepala sekolah)	2.293	508	370	700	385	330
# guru yang dijadwalkan hadir di sekolah	2.210	466	365	677	376	326
# guru yang dijadwalkan mengajar	1.687	364	289	537	251	246
Ketidakhadiran guru di sekolah						
# Guru tidak hadir di sekolah	421	91	105	82	77	66
Ketidakhadiran guru dari sekolah (% guru dijadwalkan mengajar)	25	25	36	15	31	27
Durasi ketidakhadiran guru sejak kehadiran terakhir						
Rerata # hari ketidakhadiran guru dari sekolah	8	8	11	3	10	8
Median # hari absen dari sekolah sejak kehadiran terakhir	2	2	1	1	2	2
Ketidakhadiran guru di kelas dibenarkan secara tertulis kepada kepala sekolah (% guru yang absen)	75	79	84	85	64	58
Alasan ketidakhadiran guru di sekolah (% ketidakhadiran guru)						
Mengerjakan tugas terkait sekolah	30	23	26	24	42	36
Sakit	14	9	12	12	18	18
Merawat anggota keluarga yang sakit	10	15	10	12	7	5
Mengerjakan tugas yang tidak berhubungan dengan sekolah	9	14	8	5	4	12
Pergi ke perguruan tinggi/pendidikan lanjutan	5	5	3	11	1	2
Kedatangan terlambat	5	3	3	6	12	5
Jam mengajar yang dijadwalkan belum dimulai	3	2	5	7	0	2
Cuti awal	1	1	0	0	4	0
Jam mengajar yang dijadwalkan sudah selesai	0	1	0	0	0	0
Sedang cuti	3	4	3	1	1	5
Lainnya	14	18	17	12	9	12
Tidak tahu	7	3	14	9	1	5
Tempat tinggal guru yang tidak hadir di sekolah						
Desa yang sama dengan lokasi sekolah	25	23	23	21	27	32
Desa berbeda di dalam kecamatan	14	16	18	13	14	8
Kecamatan tempat ibukota kabupaten berada	16	16	20	22	16	3
Kecamatan berbeda di dalam kabupaten	27	26	16	26	32	38
Kabupaten berbeda di dalam provinsi	8	3	8	9	8	14
Provinsi lain	2	7	1	1	1	0
Negara lain	1	2	0	0	0	2
Tidak tahu	7	5	14	9	1	5

14 persen. Kepala sekolah telah menerima penjelasan tertulis atas tiga perempat dari kasus ketidakhadiran guru di kelas. Sebagai perbandingan, pada tahun 2003, penelitian lain menemukan bahwa 45 persen guru yang absen tidak memiliki alasan yang diketahui; 36 persen sakit atau cuti resmi; dan 19 persen sisanya melakukan tugas resmi di luar sekolah, seperti menghadiri rapat atau mengikuti pelatihan (Usman, Akhmadi, dan

Suryadarma 2004). dalam ACDP (2014), alasan utama yang diberikan untuk ketidakhadiran adalah tugas resmi di luar sekolah (26 persen). Secara signifikan, hasilnya menunjukkan bahwa sebagian besar guru yang absen adalah penduduk kecamatan yang lain dari kecamatan tempat sekolah atau ibukota kabupaten berada (27 persen), atau penduduk desa yang sama dengan lokasi sekolah (25 persen).

Ketidakhadiran Guru pada Kegiatan Belajar Mengajar di Kelas

Di antara 25 persen guru yang tidak hadir di ruang kelas, 5 persen digantikan oleh guru lain yang tidak dijadwalkan untuk mengajar kelas yang diamati.

Berfokus pada guru yang dijadwalkan untuk mengajar, kami menemukan rata-rata tingkat ketidakhadiran guru (pada kegiatan belajar mengajar) 25 persen, mulai dari 16 persen di Sintang hingga 34 persen di Manggarai Barat. Hanya 8 persen guru ditemukan di sekolah tetapi tidak ditemukan mengajar—mulai dari 2 persen di Manggarai Timur hingga 16 persen di Manggarai Barat. Menurut laporan kepala sekolah, 1.687 guru dijadwalkan untuk mengajar pada hari pengamatan. Para guru yang ditemukan mengajar di luar jadwal mereka kemungkinan besar adalah guru pengganti. Untuk mengidentifikasi jumlah kelas yang dibiarkan tanpa guru (pengganti), kami membandingkan jumlah guru yang dijadwalkan untuk mengajar dan ditemukan mengajar dengan jumlah guru yang ditemukan mengajar terlepas apakah itu jadwal mereka. Di antara mereka yang dijadwalkan untuk mengajar, 75 persen ada di kelas. Namun seperti yang terlihat pada Tabel 47, ada 1.354 guru yang ditemukan mengajar di kelas pada hari survei, dan 80 persen dari mereka dijadwalkan untuk mengajar. Temuan ini menyiratkan bahwa di antara guru yang dijadwalkan untuk mengajar tetapi tidak hadir di kelas (25 persen), 5 persen dari mereka digantikan oleh guru lain, sementara 20 persennya lagi dibiarkan tanpa ada guru.

Sebagian besar guru yang tidak hadir di kelas juga tidak hadir di sekolah. Dua pertiga dari guru yang ditemukan absen mengajar dilaporkan sedang mengerjakan kegiatan administrasi terkait sekolah; sisanya sedang istirahat atau terlibat dalam kegiatan yang tidak berkaitan dengan sekolah.

Dapat disimpulkan bahwa, ketidakhadiran guru di kelas cenderung tinggi di wilayah studi. Para pencacah menemukan sekitar satu dari empat kelas tanpa guru. Seperempat dari guru yang dijadwalkan untuk mengajar selama pengamatan tidak hadir di sekolah, dan sepertiga dari guru tersebut dilaporkan tidak hadir karena tugas terkait sekolah. Sekitar 25 persen guru absen dari kegiatan belajar mengajar dan 20 persen dari kelas yang dijadwalkan ditemukan tanpa guru. Data ini kontras dengan informasi laporan diri guru dan kepala sekolah tentang kegiatan belajar mengajar, yang menunjukkan bahwa guru menghabiskan banyak waktu untuk mengajar dan kegiatan lainnya.

Faktor Penentu Ketidakhadiran Guru di Kelas

Pada bagian ini, menjelaskan informasi tambahan tentang karakteristik guru dan sekolah yang terkait dengan ketidakhadiran guru di kelas. Ada hasil dari regresi OLS sederhana pada sebuah *dummy* (sama dengan 1 untuk guru yang absen mengajar) pada sekumpulan karakteristik guru dan sekolah yang diperoleh dari analisis deskriptif yang disajikan pada bagian sebelumnya.

Sebagai variabel penjelas, analisis menggunakan beberapa karakteristik guru dan kepala sekolah.

Ini termasuk variabel *dummy* untuk kepala sekolah, guru/kepala sekolah perempuan, guru PNS, guru bersertifikasi, yang memiliki setidaknya gelar sarjana, bukti penerimaan tunjangan daerah terpencil, bukti penerimaan tunjangan tambahan penghasilan untuk guru yang tidak bersertifikasi, memiliki pekerjaan ekstra, kepuasan tinggi (> 4) terhadap gaji/honorarium mereka, dan telah dievaluasi oleh kepala sekolah pada tahun 2015/16. Dua variabel terakhir hanya digunakan dalam regresi OLS yang dijalankan menggunakan guru sebagai subsampel, karena informasi ini hanya relevan untuk guru. Analisis ini juga menggunakan jumlah tahun senioritas di sekolah tempat mereka bekerja saat ini sebagai karakteristik guru.

Variabel tambahan termasuk karakteristik sekolah.

Analisis ini mencakup variabel *dummy* untuk sekolah dengan toilet untuk guru, sekolah dengan listrik, dan sekolah yang melaporkan telah dikunjungi oleh pengawas sekolah selama tahun 2015/16. Variabel kontinu tambahan termasuk jarak sekolah ke kantor pendidikan kabupaten dan jumlah guru PNS, guru dengan gelar sarjana, guru yang telah bekerja di sekolah saat ini selama lebih dari lima tahun, guru bersertifikasi, guru yang menerima tunjangan daerah terpencil, dan guru dengan kepuasan tinggi (> 4) dengan gaji/honorarium mereka. Kami menjalankan regresi tambahan pada sekolah dengan komite aktif sebagai subsampel, termasuk *dummy* untuk sekolah dengan ketua komite yang dipilih melalui pemungutan suara dalam rapat yang dihadiri oleh orang tua, dan *dummy* untuk komite yang dilaporkan mengadakan rapat terpisah dengan kepala sekolah dan orang tua selama tahun 2015/16. Semua regresi termasuk efek tetap kabupaten untuk mengendalikan perbedaan-perbedaan dalam kebijakan pendidikan daerah.

Tabel 47. Ketidakhadiran Guru di Kelas pada Kegiatan Belajar Mengajar

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Guru ditemukan mengajar di kelas						
# guru ditemukan mengajar di kelas	1.354	260	219	472	198	205
Guru ditemukan mengajar di kelas (% guru dijadwalkan mengajar)	80	71	76	88	79	83
Absen dari mengajar - guru dijadwalkan untuk mengajar						
# Guru dijadwalkan mengajar	1.687	364	289	537	251	246
# Guru ditemukan mengajar di kelas dan memang dijadwalkan untuk mengajar	1.258	247	200	453	166	192
Guru ditemukan mengajar di kelas (% guru dijadwalkan mengajar)	75	68	69	84	66	78
# Guru absen mengajar padahal dijadwalkan untuk mengajar	429	117	89	84	85	54
Guru absen mengajar (% guru dijadwalkan mengajar)	25	32	31	16	34	22
# Guru absen dari sekolah padahal dijadwalkan untuk mengajar	288	66	76	53	45	48
Guru tidak hadir di sekolah (% guru dijadwalkan mengajar)	17	18	26	10	18	20
# Guru ditemukan di sekolah tetapi tidak hadir di kelas saat dijadwalkan untuk mengajar	141	51	13	31	40	6
Guru ditemukan di sekolah tetapi tidak hadir di kelas (% guru dijadwalkan mengajar)	8	14	4	6	16	2
Kegiatan guru yang absen dari mengajar (% guru absen dari mengajar)						
Kegiatan administrasi terkait sekolah	66	62	67	69	66	72
Istirahat/kegiatan yang tidak terkait sekolah	34	38	33	31	34	28

Bagian ini menjelaskan tentang kepala sekolah, guru PNS, guru laki-laki, dan mereka yang telah bekerja di sekolah setidaknya selama lima tahun, dikaitkan dengan ketidakhadiran dalam kegiatan belajar mengajar. Hasil regresi OLS disajikan pada Tabel 48. Hasil regresi hanyalah korelasi dan tidak dapat diartikan sebagai efek kausal. Sebagai contoh, ini luar biasa dan sejalan dengan temuan UNICEF (2012), temuan survei menunjukkan bahwa menjadi kepala sekolah secara positif dan signifikan diasosiasikan dengan tidak adanya tugas mengajar, dan hal ini mengendalikan semua karakteristik lainnya. yang menarik, guru perempuan dan guru yang secara teratur dievaluasi oleh kepala sekolah sangat jauh lebih kecil kemungkinannya untuk absen dari tugas mengajar. Temuan ini kuat dalam berbagai spesifikasi. Karakteristik individu lainnya tidak secara signifikan berkaitan dengan ketidakhadiran dalam kegiatan belajar mengajar. Pengecualian terjadi pada guru yang telah dievaluasi oleh kepala sekolah lebih kecil kemungkinannya untuk absen, seperti yang terlihat pada kolom (3) dan (4), yang menyajikan hasil (dalam subsampel guru) dari regresi ketidakhadiran guru pada kegiatan belajar mengajar, terlepas apakah dijadwalkan untuk mengajar.

Ketua komite sekolah yang dipilih secara demokratis berkorelasi dengan tingkat kehadiran guru yang lebih tinggi di kelas. Pemilihan ketua komite sekolah melalui pemungutan suara peserta rapat pemilihan,⁵⁵ dibandingkan dengan penunjukan oleh kepala sekolah atau dipilih melalui konsensus, sangat berkorelasi secara negatif dengan ketidakhadiran guru pada kegiatan belajar mengajar, terlepas apakah dijadwalkan untuk mengajar. Studi lain di Indonesia menunjukkan bahwa komite sekolah yang dipilih secara demokratis meningkatkan kesadaran masyarakat (Pradhan et al. 2014). Masuk akal bahwa peningkatan kesadaran ini memengaruhi perilaku guru, tetapi survei ini tidak mengumpulkan data tambahan.

⁵⁵ Peserta pada rapat pemilihan dapat mencakup kepala sekolah, guru, orang tua, pejabat desa, anggota masyarakat, dan anggota komite sekolah periode sebelumnya.

Tabel 48. Regresi OLS Ketidakhadiran Guru di Kelas Terkait Karakteristik Guru dan Sekolah Pilihan

	(1)	(2)	(3)	(4)
Kepala sekolah	0.272*** (0.055)	0.276*** (0.054)	-	-
Perempuan	-0.052** (0.023)	-0.051** (0.023)	-0.050** (0.024)	-0.049** (0.024)
PNS	0.042 (0.027)	0.040 (0.026)	0.034 (0.029)	0.033 (0.029)
Bersertifikasi	-0.001 (0.039)	0.001 (0.039)	-0.000 (0.041)	0.001 (0.041)
Sarjana atau lebih tinggi	-0.019 (0.024)	-0.016 (0.024)	-0.031 (0.025)	-0.027 (0.025)
# tahun di sekolah tempat mereka bekerja saat ini	-0.000 (0.002)	-0.000 (0.002)	-0.000 (0.002)	-0.000 (0.002)
Menerima tunjangan khusus	-0.044 (0.041)	-0.044 (0.041)	-0.029 (0.043)	-0.029 (0.044)
Menerima Tamsil	-0.022 (0.025)	-0.019 (0.025)	-0.011 (0.025)	-0.009 (0.026)
Pekerjaan ekstra	-0.021 (0.023)	-0.022 (0.023)	-0.016 (0.024)	-0.018 (0.024)
Lahir di kabupaten yang sama dengan lokasi sekolah	-0.026 (0.043)	-0.020 (0.043)	-0.030 (0.046)	-0.023 (0.046)
Kepuasan gaji tinggi	-	-	-0.002 (0.025)	-0.002 (0.025)
Telah dievaluasi oleh kepala sekolah	-	-	-0.056** (0.028)	-0.051* (0.029)
Jarak ke kantor pendidikan kabupaten	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)	-0.000 (0.000)
Toilet tersedia untuk guru	0.001 (0.027)	0.007 (0.027)	0.006 (0.027)	0.010 (0.027)
Listrik tersedia di sekolah	-0.023 (0.027)	-0.018 (0.027)	-0.028 (0.027)	-0.024 (0.027)
Jumlah guru PNS	-0.183* (0.099)	-0.167 (0.102)	-0.189* (0.106)	-0.187* (0.110)
Jumlah guru dengan minimum gelar sarjana	0.081 (0.073)	0.075 (0.073)	0.072 (0.073)	0.068 (0.073)
Jumlah guru dengan minimal 5 tahun di sekolah	0.147 (0.097)	0.133 (0.094)	0.183* (0.098)	0.172* (0.097)
Jumlah guru bersertifikat	0.073 (0.103)	0.065 (0.102)	0.097 (0.105)	0.093 (0.105)
Jumlah guru yang menerima tunjangan khusus	-0.037 (0.053)	-0.033 (0.053)	-0.060 (0.057)	-0.057 (0.057)
Jumlah guru yang sangat puas dengan gaji mereka	0.013 (0.072)	0.010 (0.070)	0.018 (0.080)	0.018 (0.079)
Pengawas mengunjungi sekolah	-0.073 (0.046)	-0.057 (0.045)	-0.052 (0.047)	-0.040 (0.047)

	(1)	(2)	(3)	(4)
Ketua komite dipilih melalui pemungutan suara	-	-0.069**	-	-0.053*
		(0.027)		(0.028)
Komite mengadakan rapat dengan orang tua dan kepala sekolah	-	0.024	-	0.022
		(0.029)		(0.031)
Konstan	0.360***	0.355***	0.361***	0.353***
	(0.101)	(0.099)	(0.105)	(0.103)
Pengamatan	1,578	1,569	1,440	1,432
R-kuadrat	0.087	0.093	0.054	0.056

Catatan: Kesalahan standar diberi tanda kurung. Semua regresi mencakup dummy kabupaten. Semua responden dari instrumen TAS dipertimbangkan dalam kolom (1) dan (2), sedangkan hanya guru yang dipertimbangkan dalam kolom (3) dan (4). Hanya sekolah dengan komite aktif yang dipertimbangkan dalam kolom (2) dan (4); semua sekolah dipertimbangkan dalam kolom lainnya. PNS = pegawai negeri sipil; TAS = Survei Ketidakhadiran Guru di kelas.

*** $p < 0.01$, ** $p < 0.05$, * $p < 0.1$.



06

Ketidakhadiran dan Hasil Belajar Murid

Ketidakhadiran Murid di Kelas

Terdapat perbedaan antara angka resmi ketidakhadiran murid dan hasil pengamatan pencacah. Hanya 8 persen murid yang absen ketika pencacah berkunjung, menurut buku kehadiran sekolah (Tabel 49, dalam Lampiran A). Namun tingkat ketidakhadiran murid di kelas selama pengamatan lebih tinggi, rata-rata 14 persen. Perbedaan ini sangat signifikan di Ketapang, dengan 9 persen murid tercatat absen secara resmi, namun 24 persen dari murid ditemukan tidak hadir di kelas.

Demikian juga tingkat kehadiran murid berbeda dari angka resmi dan informasi orang tua, yang menunjukkan bahwa ketidakhadiran murid adalah masalah besar yang dapat memengaruhi kinerja guru dan pembelajaran murid. Tingkat ketidakhadiran murid menurun seiring kenaikan ke kelas yang lebih tinggi. di kabupaten NTT, khususnya di Manggarai Timur, ada sedikit perbedaan antara angka resmi ketidakhadiran murid dan hasil pengamatan daripada di kabupaten Kalimantan Barat (Tabel 49, dalam Lampiran A). di sekitar sepertiga dari semua kelas yang diamati, semua murid hadir pada hari kunjungan pencacah. di kelas satu, kehadiran murid penuh berkisar dari 15 persen dari kelas yang diamati di Manggarai Barat hingga 34 persen di Manggarai Timur. Angka ini agak rendah dan sekali lagi kontras dengan catatan resmi kehadiran murid dan laporan orang tua bahwa anak-anak mereka bersekolah pada hampir semua hari yang dijadwalkan.

Jumlah murid laki-laki lebih banyak dari murid perempuan yang terdaftar di semua kelas, dan murid laki-laki memiliki tingkat ketidakhadiran sedikit lebih tinggi daripada murid perempuan. Rata-rata tingkat ketidakhadiran murid laki-laki dan perempuan secara keseluruhan adalah 9 dan 7 persen (Tabel 57, dalam Lampiran A). Tingkat ketidakhadiran murid sedikit menurun seiring kenaikan murid ke kelas yang lebih tinggi, dari 11 persen di kelas satu menjadi 5 persen di kelas enam untuk murid perempuan, dan untuk murid laki-laki, dari 12 persen hingga 7 persen.

Tingkat Hasil Belajar Murid

Hasil tes menunjukkan apakah murid telah menguasai kompetensi tingkat kelas yang seharusnya mereka capai ketika mereka naik ke tingkat kelas saat ini. Pertama, hasil tes murid dinyatakan sebagai persentase dari jawaban yang benar, mulai dari nol hingga 100, seperti yang terlihat pada Tabel 50. Tes adalah pilihan ganda, dengan tiga atau empat pilihan jawaban untuk setiap pertanyaan. Oleh karena itu, seorang murid yang menjawab setiap pertanyaan secara acak memiliki nilai yang diharapkan 25 hingga 33 persen.

Tabel 50. Nilai Ujian Murid: Statistik Deskriptif

Kelas	Mata Pelajaran	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
			Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Bahasa Indonesia							
1	Rerata	32,72	38,81	26,23	36,14	26,98	30,3
	SD	22,65	22,62	20,16	25,4	18,64	18,87
	Median	30,43	34,78	26,09	34,78	26,09	26,09
	Min	0	0	0	0	0	0
	Maks	100	100	95,65	100	95,65	95,65
2	Rerata	44	49,24	36,01	44,88	42,01	45,86
	SD	22,59	23,18	21,28	25,45	18,85	18,11
	Median	43,48	47,83	34,78	43,48	39,13	43,48
	Min	0	0	0	0	0	0
	Maks	100	100	100	100	100	95,65
3	Rerata	28,26	34,16	25,33	31,58	19,87	25,92
	SD	15,84	14,17	13,89	15,31	15,61	15,91
	Median	26,09	34,78	26,09	30,43	17,39	26,09
	Min	0	0	0	0	0	0
	Maks	78,26	69,57	69,57	78,26	65,22	69,57
4	Rerata	35,32	39,96	32,91	39,02	27,99	33,38
	SD	14,73	12,67	12,86	13,6	15,66	15,7
	Median	34,78	39,13	34,78	39,13	30,43	34,78
	Min	0	4,35	0	4,35	0	0
	Maks	78,26	78,26	78,26	73,91	69,57	78,26
5	Rerata	35,3	38,05	32,19	38,86	28,8	34,51
	SD	14,24	13,19	12,53	14,05	13,59	14,86
	Median	34,78	39,13	30,43	39,13	26,09	34,78
	Min	0	4,35	4,35	0	0	0
	Maks	78,26	73,91	73,91	78,26	73,91	73,91
Matematika							
1	Rerata	33,5	44,2	26,61	39,07	22,52	26,5
	SD	24,33	22,81	22,53	25,85	18,68	20,55
	Median	33,33	46,67	23,33	40	16,67	23,33
	Min	0	0	0	0	0	0
	Maks	100	100	100	100	100	96,67
2	Rerata	43,31	51,65	35,62	45,93	35,95	43,03
	SD	23,42	21,92	19,59	25,13	22,02	22,23
	Median	36,67	50	33,33	43,33	30	36,67
	Min	0	0	0	0	0	0
	Maks	100	100	100	100	100	100
3	Rerata	30,38	36,55	27,1	33,21	22,66	28,37
	SD	16,83	14,07	15,26	16,03	18,16	17,23
	Median	30	36,67	26,67	33,33	20	26,67
	Min	0	0	0	0	0	0
	Maks	73,33	70	66,67	73,33	73,33	70
4	Rerata	29,72	32,62	28,23	31,53	25,76	28,82
	SD	10,79	10,27	9,21	9,6	12,41	11,55
	Median	30	33,33	26,67	30	26,67	30
	Min	0	0	0	0	0	0
	Maks	70	66,67	56,67	70	60	63,33

Kelas	Mata Pelajaran	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
			Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Matematika							
5	Rerata	30,7	32,7	30,36	32,67	27,1	28,34
	SD	10,63	10,36	9,31	10,38	10,62	11,17
	Median	30	33,33	30	33,33	26,67	30
	Min	0	0	0	3,33	0	0
	Maks	66,67	63,33	63,33	63,33	66,67	63,33

Tabel 51. Nilai Ujian Murid dalam Mata Pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika - Berdasarkan Pendidikan Orang Tua

	Kelas 1	Kelas 2	Kelas 3	Kelas 4	Kelas 5
Bahasa Indonesia					
Secara keseluruhan	33.490	44.830	28.620	34.450	32.580
Orang tua tidak mengenyam pendidikan	28.910	41.180	27.540	31.940	32.650
Orang tua mengenyam pendidikan dasar	31.25	42.960	27.510	33.300	31.410
Orang tua mengenyam pendidikan menengah pertama	37,5	47.880	30.780	36.960	35.350
Orang tua mengenyam pendidikan menengah atas	36.720	49.300	30.630	37.930	35.050
Orang tua mengenyam pendidikan universitas	50.380	56.370	36.410	42.430	39.350
Matematika					
Secara keseluruhan	34.410	44.230	30.820	29.550	32.030
Orang tua tidak mengenyam pendidikan	33.150	41.740	29.960	28	32.020
Orang tua mengenyam pendidikan dasar	32	42.520	29.940	29.100	31.430
Orang tua mengenyam pendidikan menengah pertama	39.120	47.700	33.120	30.600	32.990
Orang tua mengenyam pendidikan menengah atas	37.540	48.270	32.330	30.700	33.780
Orang tua mengenyam pendidikan universitas	46.780	50.480	35.020	34.530	35.940

Secara keseluruhan, murid memiliki nilai sedikit lebih tinggi dalam pelajaran bahasa Indonesia daripada matematika, dan rata-rata nilai murid perempuan lebih tinggi daripada murid laki-laki.

Perbedaan ini konsisten dengan nilai PISA (OECD 2016). Secara keseluruhan, ada korelasi positif antara tingkat pendidikan orang tua dan nilai murid (Tabel 51). Tabel 56 (dalam Lampiran A) menunjukkan nilai tes murid berdasarkan kelas dan jenis kelamin. Murid perempuan memiliki nilai rata-rata lebih tinggi daripada murid laki-laki dalam bahasa Indonesia dan matematika dan di semua kelas, konsisten dengan temuan dari TIMSS⁵⁶ dan *Progress in International Reading Literacy Study*.⁵⁷

Nilai rata-rata pelajaran bahasa Indonesia dan matematika rendah, dengan beberapa pola regional. di kelas satu, murid memperoleh nilai rata-rata 32,7 untuk bahasa Indonesia, bervariasi dari 26,2 di Landak hingga 38,8 di Ketapang. Nilai tes di kelas satu bervariasi dari nol hingga 100, kecuali di

Landak, Manggarai Barat, dan Manggarai Timur. Nilai di kelas dua berkisar dari 36 di Landak hingga 49 di Ketapang. di kelas tiga, nilai bahasa Indonesia cukup rendah, serendah tolok ukur 25 persen untuk tebakan acak, bervariasi dari 20 di Manggarai Barat hingga 34 di Ketapang. Dari kelas tiga dan seterusnya, nilai maksimum yang diperoleh juga jauh di bawah 100. di kelas empat dan lima, nilai berkisar dari sekitar 28 di Manggarai Barat hingga hampir 40 di Ketapang, dengan standar deviasi yang lebih rendah, menunjukkan lebih banyak homogenitas kemampuan murid dalam bahasa Indonesia di kelas-kelas ini dibandingkan dengan murid di kelas satu dan dua. Nilai matematika menampilkan pola kinerja relatif yang serupa dengan nilai bahasa Indonesia. Murid di Ketapang memiliki nilai tertinggi di semua kelas, sedangkan murid di Manggarai Barat dan Landak memiliki nilai terendah. Nilai matematika di kelas tiga hingga lima adalah nilai terendah dari semua nilai, hanya sedikit lebih tinggi dari nilai perkiraan tolok ukur acak 25 persen. Ada juga standar deviasi yang lebih rendah dalam nilai matematika di kelas empat dan lima.

⁵⁶ Mullis et al. 2016.

⁵⁷ Mullis et al. 2012.

Kedua, hasil belajar murid juga diklasifikasikan berdasarkan kompetensi tingkat kelas yang mengacu kepada standar kurikulum 2006, untuk menyajikan hasil belajar dengan cara yang sederhana dan bermakna bagi pemangku kepentingan pendidikan masyarakat dan daerah.⁵⁸

Klasifikasi dibagi berdasarkan nilai tes murid, yang ditentukan oleh jumlah pertanyaan yang dijawab dengan benar pada tes (Tabel 52 dan 53). Klasifikasi ini diterapkan pada hasil tes bahasa Indonesia dan matematika. Ada empat klasifikasi kompetensi: apakah seorang anak (1) tidak dapat mengenali huruf/angka; (2) mampu mengenali huruf/angka tetapi tidak memiliki kompetensi dasar; (3) memiliki kompetensi di bawah tingkat kelas mereka saat ini; atau (4) memiliki kompetensi pada atau di atas tingkat kelas mereka saat ini. Klasifikasi ini diharapkan dapat berkontribusi untuk menggugah kesadaran pemangku kepentingan tentang prestasi belajar anak-anak mereka serta memberikan informasi tentang kualitas umum pengajaran dan pembelajaran di sekolah mereka. Informasi ini diharapkan menimbulkan tindakan nyata menuju peningkatan hasil belajar murid. Penjelasan lebih lanjut tentang klasifikasi kompetensi murid ada di Lampiran B.

Hasil belajar sangat kontras dengan proporsi orang tua yang melaporkan puas atau sangat puas dengan hasil belajar anak mereka. Tabel 52 dan 53 (dalam Lampiran A) menunjukkan proporsi murid yang telah mencapai masing-masing dari empat klasifikasi kompetensi murid dalam bahasa Indonesia dan matematika. Mengonfirmasi temuan dalam Tabel 50, tabel ini menunjukkan bahwa hasil belajar murid rendah. di Indonesia, hampir tidak ada murid yang mencapai tingkat kompetensi sesuai dengan kelas yang mereka ikuti saat ini, yang mungkin sebagian berkaitan dengan waktu pelaksanaan survei. Untuk matematika, antara 6 dan 13 persen murid di kelas satu hingga tiga mencapai tingkat kelas yang mereka ikuti saat ini. Namun demikian, semua nilai untuk bahasa Indonesia dan matematika, di mana mayoritas murid tertinggal dua tingkat kompetensi di bawah kelas mereka berada saat ini, menyiratkan bahwa murid-murid tersebut belum menguasai kompetensi tingkat kelas yang telah mereka ikuti sebelumnya.

Sebagian besar murid di kelas satu tidak dapat mengenali huruf, dan sebagian besar murid di kelas dua tidak memiliki pemahaman bacaan dasar. di Indonesia, sebagian besar murid di kelas satu (antara 36 persen di Ketapang dan 57 persen di Manggarai Barat) tidak dapat mengenali huruf. Antara 43 persen murid di Manggarai Barat dan 62 persen di Ketapang memiliki pemahaman dasar tentang huruf tetapi tidak memiliki kompetensi membaca dasar. Hanya 3 persen murid kelas satu di Sintang yang mencapai tingkat satu di Indonesia. di kelas dua, antara 2 persen murid di Manggarai Timur dan 8 persen di Sintang dan Landak tidak memiliki pemahaman tentang huruf. Rata-rata 80 persen murid di kelas dua hanya memiliki pemahaman dasar tentang huruf dan tidak memiliki kompetensi membaca. Sekitar 11 persen murid di kelas dua telah mencapai tingkat satu di Indonesia, mulai dari 5 persen murid di Manggarai Barat dan Landak hingga 17 persen di Ketapang.

Sebagian besar murid di kelas tiga hingga lima mencapai tingkat kompetensi membaca dan menulis dua tingkat di bawah tingkat kelas mereka saat ini. di kelas tiga, semua murid mencapai pemahaman dasar tentang huruf, namun sebagian besar murid kelas tiga (antara 57 persen di Ketapang dan 74 persen di Landak) hanya mencapai tingkat satu dalam bahasa Indonesia. di Manggarai Barat, 20 persen murid kelas tiga hanya mencapai pemahaman dasar tentang huruf dan tidak memiliki kemampuan membaca. di Ketapang, Manggarai Timur, dan Sintang, antara seperlima dan dua perlima murid mencapai tingkat dua. Tidak ada murid di kelas tiga di sekolah sampel yang mencapai tingkat tiga dalam bahasa Indonesia. Sebagian besar murid di kelas empat (antara 81 persen di Manggarai Barat dan 93 persen di Landak) mencapai tingkat dua, atau dua tingkat kompetensi tingkat kelas mereka saat ini. Hampir seperlima murid kelas empat di Manggarai Barat tidak memiliki kemampuan dasar membaca dalam bahasa Indonesia. di daerah sampel, rata-rata 4 persen murid di kelas lima (hingga 9 persen murid di Manggarai Barat) tetap dikecualikan dari pembelajaran lebih lanjut karena hanya memiliki pemahaman dasar tentang huruf. Antara 75 persen murid di kelas lima di Sintang dan 87 persen di Landak hanya mencapai tingkat tiga dalam bahasa Indonesia, sedangkan rata-rata 17 persen murid di kelima kabupaten mencapai tingkat empat.

Hasil tes pelajaran matematika mirip dengan hasil tes bahasa Indonesia: secara keseluruhan, sebagian besar murid di setiap kelas rata-rata tertinggal dua tingkat kelas dalam kemampuan mereka. Namun di kelas satu, ada lebih banyak murid yang mencapai kompetensi matematika tingkat satu

⁵⁸ Kerangka kerja klasifikasi untuk menginterpretasikan dan melaporkan hasil tes ini diadopsi dari model yang diterapkan oleh beberapa citizen-led assessment, seperti Annual Status of Education Report and Uwezo (Plaut dan Jamieson Eberhardt 2015). Gerakan citizen-led assessment, yang diprakarsai oleh Pratham, merupakan upaya organisasi masyarakat sipil untuk mengumpulkan bukti tentang pembelajaran, khususnya literasi dan numerasi dasar, dan menggunakannya untuk dua tujuan utama: untuk meningkatkan kesadaran akan hasil pembelajaran yang rendah dan merangsang tindakan yang ditujukan untuk mengatasi kesenjangan pembelajaran (Plaut dan Jamieson Eberhardt 2015).

dibandingkan dengan bahasa Indonesia, termasuk hingga 20 persen murid kelas satu di Ketapang dan Sintang. Proporsi murid yang mencapai kompetensi tingkat kelas mereka menurun dengan cepat setelah kelas satu dan mencapai nol pada kelas tiga. Ada persentase murid yang hampir tidak mempelajari apa pun di semua kelas, dengan jumlah bervariasi di masing-masing kelas. Jumlah terbesar murid yang hanya menunjukkan kompetensi dasar matematika ada di kelas lima. Tingkat kompetensi tertinggi yang dicapai murid kelas lima dalam matematika adalah tingkat tiga.

Faktor Penentu Hasil Belajar Murid

Subbagian ini menyajikan hasil regresi OLS dari nilai tes murid berdasarkan seperangkat karakteristik murid, orang tua, dan sekolah. Karakteristik murid termasuk jenis kelamin, partisipasi pendidikan anak usia dini, apakah mereka tinggal bersama orang tua mereka, dan apakah mereka melaporkan bahwa mereka dibantu oleh orang tua ketika belajar di rumah. Karakteristik orang tua meliputi tingkat pendidikan ibu dan ayah di seluruh sampel. dalam subsampel murid yang orang tuanya juga disurvei menggunakan instrumen orang tua, kami menambahkan variabel *dummy* untuk murid yang orang tuanya dilaporkan membantu belajar anak mereka di rumah dan orang tua yang melaporkan tingkat kepuasan tinggi terhadap hasil murid dalam bahasa Indonesia atau matematika (sangat baik atau baik).

Karakteristik sekolah yang termasuk dalam regresi ini terdiri dari variabel yang sama dalam regresi untuk ketidakhadiran guru di kelas dan variabel untuk karakteristik guru dan efek tetap kabupaten.

Artinya, regresi ini termasuk jumlah guru PNS, guru dengan gelar sarjana, guru yang bekerja di sekolah mereka saat ini selama lebih dari lima tahun, guru bersertifikasi, guru yang menerima tunjangan daerah terpencil, dan guru yang menyatakan kepuasan tinggi (> 4) dengan gaji/honor. Regresi ini juga mencakup *dummy* untuk sekolah dengan ketua komite sekolah yang dipilih melalui pemungutan suara dalam rapat yang dihadiri orang tua, dan di mana komite sekolah melaporkan mengadakan rapat (terpisah atau bersama) dengan kepala sekolah dan orang tua selama tahun 2015/16. Kami juga menyertakan tingkat ketidakhadiran guru di kelas (didefinisikan sebagai guru yang absen dari kegiatan belajar mengajar atau dari kelas yang diamati tanpa guru, tergantung pada spesifikasi), serta efek tetap kabupaten dalam semua regresi, untuk mengendalikan perbedaan kondisi lokal dan khususnya kebijakan pendidikan daerah.

Beberapa karakteristik orang tua berhubungan positif dengan nilai tes murid, namun tidak

termasuk karakteristik sekolah. Tabel 54 menyajikan hasil regresi OLS untuk nilai bahasa Indonesia (kolom (1) hingga (3)) dan matematika (kolom (4) hingga (6)) untuk sampel murid yang orang tuanya juga disurvei menggunakan instrumen orang tua dan murid yang sekolahnya memiliki komite aktif. Sekali lagi, hasil regresi hanyalah korelasi dan tidak dapat diartikan sebagai efek kausal. Kolom (1) dan (4) menyajikan regresi pada karakteristik murid untuk masing-masing nilai tes bahasa Indonesia dan matematika. Ada korelasi umum untuk bahasa Indonesia dan matematika dan korelasi yang secara signifikan terkait dengan hanya satu atau yang lain.

Partisipasi orang tua dalam pendidikan anak usia dini berkorelasi positif kuat dengan hasil belajar anak mereka dalam bahasa Indonesia dan matematika, seperti tingkat pendidikan ibu di atas sekolah menengah pertama dan kepuasan orang tua terhadap hasil belajar anak mereka dalam bahasa Indonesia atau matematika. Tingkat pendidikan ayah berkorelasi kuat dengan nilai bahasa Indonesia, sementara hanya pendidikan ayah di atas tingkat menengah atas saja yang secara statistik sangat berhubungan dengan nilai matematika. Bantuan orang tua dalam proses belajar anak di rumah secara signifikan dan positif berhubungan dengan nilai matematika murid, tetapi tidak dengan nilai bahasa Indonesia mereka. Catatan khusus, menambahkan karakteristik sekolah (kolom (2) - (3) dan (5) - (6)) tidak memengaruhi korelasi variabel tingkat murid dengan nilai tes.

Meskipun regresi ini menemukan beberapa hubungan positif antara karakteristik guru dan nilai tes murid, namun tidak demikian halnya dengan ketidakhadiran guru di kelas.

Ketidakhadiran guru, baik yang diukur sebagai ketidakhadiran di kegiatan belajar mengajar (terlepas dari apakah dijadwalkan untuk mengajar)⁵⁹ atau di sejumlah kelas yang diamati tanpa kehadiran guru (kolom (3) dan (6), masing-masing), secara statistik tidak berhubungan secara signifikan dengan nilai tes murid. Korelasi positif dengan nilai murid, dalam bahasa Indonesia dan matematika, terjadi dengan guru dengan gelar sarjana, jumlah guru bersertifikasi di sekolah, dan sekolah dengan komite sekolah yang telah melakukan rapat dengan kepala sekolah dan orang tua pada tahun akademik sebelumnya. Menariknya, senioritas di tingkat sekolah, diukur dengan jumlah guru yang telah mengajar selama lebih dari lima tahun di sekolah, berkorelasi negatif dengan nilai tes. Ada korelasi positif antara beberapa karakteristik sekolah, seperti jumlah guru yang menerima tunjangan daerah terpencil dan guru yang sangat puas dengan gaji mereka.

⁵⁹ Hasil serupa diperoleh ketika menggunakan ketidakhadiran guru di kelas tanpa syarat di kegiatan belajar mengajar.

Tabel 54. Regresi OLS Nilai Tes Murid Terkait Karakteristik Murid dan Sekolah Pilihan

Variable	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Attended PAUD/ECED	7.348*** (0.939)	7.050*** (0.951)	6.882*** (0.949)	7.652*** (0.916)	7.491*** (0.926)	7.205*** (0.925)
Living with parents	-1.944 (2.248)	-2.460 (2.237)	-2.517 (2.237)	-0.954 (2.194)	-1.573 (2.177)	-1.652 (2.180)
Parents help at home	-0.275 (0.635)	-0.360 (0.633)	-0.353 (0.633)	1.756*** (0.619)	1.798*** (0.616)	1.800*** (0.617)
Mother education: SD	0.459 (1.112)	0.599 (1.109)	0.598 (1.109)	0.862 (1.083)	1.064 (1.078)	1.035 (1.079)
Mother education: SMP	3.063** (1.309)	2.985** (1.310)	2.906** (1.309)	2.682** (1.275)	2.912** (1.273)	2.724** (1.273)
Mother education: SMA or above	5.574*** (1.410)	5.724*** (1.413)	5.675*** (1.412)	3.708*** (1.374)	3.997*** (1.373)	3.861*** (1.374)
Father education: SD	2.311* (1.261)	2.323* (1.255)	2.315* (1.255)	0.159 (1.232)	0.121 (1.223)	0.141 (1.224)
Father education: SMP	3.628*** (1.405)	3.761*** (1.401)	3.738*** (1.401)	0.367 (1.371)	0.522 (1.363)	0.506 (1.365)
Father education: SMA	4.078*** (1.449)	4.010*** (1.445)	4.023*** (1.445)	2.458* (1.415)	2.487* (1.407)	2.537* (1.409)
Satisfied with learning outcome	6.211*** (0.533)	5.919*** (0.534)	5.909*** (0.534)	6.314*** (0.519)	6.055*** (0.519)	6.059*** (0.520)
Teacher absence rate	- (1.263)	1.403 (1.263)	-0.532 (1.169)	- (1.226)	4.109*** (1.226)	0.999 (1.138)
Share of PNS teachers	- (2.067)	-3.124 (2.067)	-3.309 (2.070)	- (2.007)	-1.724 (2.007)	-1.945 (2.012)
Share of teachers with minimum bachelor's degree	- (1.008)	5.220*** (1.008)	5.209*** (1.008)	- (0.979)	4.652*** (0.979)	4.608*** (0.980)
Share of teachers with minimum 5 years at school	- (1.915)	-4.894** (1.915)	-4.732** (1.908)	- (1.861)	-9.962*** (1.861)	-9.425*** (1.857)
Share of certified teachers	- (2.095)	9.561*** (2.095)	9.765*** (2.100)	- (2.033)	12.25*** (2.033)	12.45*** (2.040)
Share of teachers receiving special allowance	- (0.783)	-0.207 (0.783)	-0.348 (0.783)	- (0.763)	1.627** (0.763)	1.408* (0.763)
Share of teachers highly satisfied with their salary	- (1.312)	1.527 (1.312)	1.441 (1.317)	- (1.279)	2.891** (1.279)	2.883** (1.285)
Committee chairperson is selected by voting	- (0.592)	0.913 (0.592)	0.719 (0.580)	- (0.576)	1.191** (0.576)	0.798 (0.565)
Committee had meetings with parents and principal	- (0.631)	2.114*** (0.631)	2.148*** (0.630)	- (0.612)	1.467** (0.612)	1.557** (0.612)
Constant	26.31*** (2.560)	22.96*** (2.958)	23.71*** (2.967)	24.31*** (2.495)	21.87*** (2.876)	22.94*** (2.888)
Observations	4,998	4,963	4,963	5,011	4,975	4,975
R-squared	0.101	0.113	0.113	0.113	0.132	0.130

Catatan: Kesalahan standar diberi tanda kurung. Semua regresi mencakup dummy kabupaten. Kolom (1) hingga (3) melaporkan hasil dari regresi nilai Bahasa Indonesia; kolom (4) hingga (6) melaporkan hasil dari regresi nilai matematika. Semua regresi dijalankan pada sampel murid yang orang tuanya juga disurvei menggunakan instrumen orang tua dan yang berkunjung ke sekolah yang memiliki komite aktif, dalam kolom (2), dan (4), ketidakhadiran guru adalah jumlah guru yang absen dari kegiatan belajar mengajar dengan syarat memang dijadwalkan untuk mengajar, dalam kolom (3) dan (6), ketidakhadiran guru adalah jumlah kelas yang diamati tanpa guru. PAUD = pendidikan anak usia dini; PPAUD = Program Pendidikan Anak Usia Dini; PNS = Pegawai Negeri Sipil; SD = standar deviasi; SMA = Sekolah Menengah Atas; SMP = Sekolah Menengah Pertama. Penting untuk diingat bahwa dalam regresi kita berada pada korelasi parsial. Jadi ketidakhadiran guru di kelas berkorelasi positif dengan nilai matematika, memegang semua variabel konstan. Ada kemungkinan bahwa ini disebabkan oleh beberapa korelasi antara ketidakhadiran guru dan satu atau beberapa korelasi lainnya yang termasuk dalam regresi.

*** p < 0.01, ** p < 0.05, * p < 0.1.

07

Kesimpulan



Laporan ini menyajikan konteks pendidikan dari lima kabupaten yang berlokasi di daerah terpencil Indonesia, yaitu Ketapang, Landak, dan Sintang di Provinsi Kalimantan Barat, serta Manggarai Barat dan Manggarai Timur di Provinsi NTT. Laporan ini didasarkan pada sebuah survei komprehensif atas sekolah dasar dan personelya (kepala sekolah, guru, dan komite) serta asesmen atas ketidakhadiran guru di kelas, hasil belajar murid, dan survei orang tua yang terperinci.



Survei menemukan bahwa prasarana yang buruk sangat menghambat penyediaan layanan pendidikan.

Rata-rata sekolah studi terletak lima jam dari ibukota kabupaten, dan 2,3 jam dari lembaga keuangan terdekat. Waktu perjalanan yang panjang ini memengaruhi kepala sekolah dan guru dalam melakukan perjalanan ke ibukota kabupaten untuk keperluan administrasi dan logistik, atau untuk mengambil gaji mereka secara rutin. Meningkatkan prasarana jalan, telekomunikasi, dan listrik yang lebih baik berpotensi akan berkontribusi pada upaya peningkatan kualitas pendidikan di daerah terpencil Indonesia, karena hal ini dapat meningkatkan daya tarik daerah-daerah tersebut untuk personel yang lebih berkualitas, dan memungkinkan komunikasi, pengambilan uang, dan pengawasan menjadi lebih mudah.



Tingkat kehadiran guru di kelas yang sangat rendah di lima kabupaten studi menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang sangat besar dan ruang yang luas untuk perbaikan.

Tingkat ketidakhadiran guru di kelas tinggi pada wilayah studi dibandingkan dengan perkiraan tingkat ketidakhadiran guru di sekolah seluruh Indonesia, namun relatif sama dibandingkan dengan perkiraan atas sekolah-sekolah di daerah terpencil. Pencacah mengamati bahwa sekitar satu dari empat kelas ditemukan tanpa kehadiran guru. Satu dari empat guru yang dijadwalkan untuk mengajar selama periode pengamatan tidak hadir di sekolah, dan sepertiga dari para guru ini dilaporkan tidak hadir karena tugas terkait sekolah. Secara keseluruhan, 20 persen dari kelas yang dijadwalkan tidak dihadiri guru, dan sekitar 25 persen dari guru yang dijadwalkan tidak hadir untuk mengajar. Pemerintah Indonesia harus mengatasi masalah serius ini karena secara langsung memengaruhi apakah murid mendapatkan pembelajaran di sekolah. Selain itu, berbagai cara untuk meningkatkan kehadiran guru perlu diuji, termasuk memperkuat pengawasan guru, melaksanakan evaluasi guru, dan menerapkan sanksi bagi guru yang berkinerja buruk. Namun perlu dicatat bahwa hasil regresi OLS menunjukkan bahwa jika semuanya setara, ketidakhadiran guru di kelas tidak berkorelasi secara signifikan atau berkorelasi positif dengan nilai tes murid. Dengan demikian, memastikan guru hadir dan terlibat dalam kegiatan belajar mengajar mungkin tidak secara otomatis mengarah pada peningkatan hasil belajar di kalangan murid.



Meninjau ulang ekspektasi orang tua dan masyarakat terhadap kualitas layanan pendidikan yang diterima oleh anak-anak mereka mungkin diperlukan, khususnya dalam hal kehadiran guru.

Orang tua dan masyarakat akan mendapat manfaat dari partisipasi mereka dalam menetapkan standar layanan bersama dengan kepala sekolah dan guru, partisipasi lebih jauh dalam evaluasi kinerja guru berdasarkan standar-standar tersebut, dan adanya wadah yang jelas untuk secara efektif menyuarakan masukan mereka tentang hasil layanan guru. Pada sisi pemberi layanan, kepala sekolah dan guru menyatakan kurangnya keterlibatan orang tua secara aktif dalam pendidikan anak-anak mereka sebagai faktor penting yang menghambat pembelajaran murid. Adanya permintaan dari orang tua dan masyarakat untuk (lebih) bertanggung jawab dapat membuat kepala sekolah dan guru menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka, termasuk dalam hal kehadiran.



Hal lain yang dapat ditingkatkan adalah penyediaan informasi yang lebih akurat kepada orang tua dan komite sekolah mengenai tingkat hasil belajar murid secara aktual.

Hampir tidak ada murid yang mencapai tingkat kemampuan yang sesuai dengan kelas yang mereka ikuti saat ini; mayoritas dari mereka tertinggal dua tingkat kelas. Berlawanan dengan rendahnya kualitas pendidikan yang diamati di wilayah studi, kepala sekolah, orang tua, dan komite sekolah melaporkan tingkat kepuasan yang tinggi terhadap kinerja guru dan hasil belajar murid. Ini sangat kontras dengan jumlah murid yang tidak menunjukkan kemampuan dasar dalam bahasa Indonesia dan/atau matematika. Situasi ini dapat dipengaruhi oleh keterbatasan survei kuantitatif, yang dapat menjadi bias karena responden menjawab apa yang menurut mereka merupakan jawaban yang “benar”. Data kualitatif tambahan dapat mengidentifikasi hal ini sebagai masalah potensial.⁶⁰ Namun demikian, hasil regresi menunjukkan bahwa kepuasan orang tua terhadap hasil belajar anak-anak mereka berkorelasi kuat dengan nilai murid. Jika ini masalahnya, maka hasil belajar murid dapat meningkat dengan pemberian informasi yang relevan dan tepat sasaran kepada orang tua, komite sekolah, dan masyarakat tentang pengembangan pembelajaran murid dan tingkat kualitas layanan yang diharapkan dari para guru.



Selain akuntabilitas sosial, pembayaran tunjangan guru berbasis kinerja harus dipertimbangkan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerja guru.

Pemberian dukungan tambahan, pemantauan, dan evaluasi guru dapat meningkatkan motivasi dan upaya mereka untuk meningkatkan kehadiran dan kinerja layanan mereka. Namun tekanan sosial ini mungkin tidak cukup untuk memengaruhi perubahan perilaku guru yang berkelanjutan. Dengan demikian, mekanisme keuangan dapat memberikan insentif yang lebih kuat, terutama untuk guru yang berkinerja buruk. Seperti yang disebutkan di bagian pendahuluan, Pemerintah Indonesia telah menyediakan Tunjangan Khusus bagi guru yang memenuhi syarat yang bekerja di daerah terpencil, dalam jumlah yang substansial mulai dari Rp1,5 juta hingga satu kali gaji pokok bulanan guru. Namun penerima Tunjangan Khusus ternyata memiliki tingkat ketidakhadiran yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang bukan penerima (Toyamah, et al., 2010). Dengan demikian, mekanisme untuk menjadikan Tunjangan Khusus lebih efektif dalam meningkatkan kehadiran guru atau kinerja layanan secara langsung harus diuji. Survei Bank Dunia 2017 di 100 sekolah di 10 kabupaten, termasuk lima kabupaten yang dicakup dalam penelitian ini, menunjukkan bahwa kepala sekolah dan guru lebih memilih faktor penentu upah dan promosi berbasis kinerja daripada yang berbasis senioritas (Perez-Alvarez, et al. 2019).

⁶⁰ As undertaken in Vernez, Karam, and Marshall (2012).



Terdapat perbedaan temuan penting antara lima kabupaten, terutama dalam manajemen sekolah, kondisi kerja kepala sekolah dan guru, karakteristik dan upaya guru, keterlibatan orang tua, dan prestasi belajar murid.

Banyak guru di sekolah terpencil yang disurvei tidak memiliki tingkat pendidikan tinggi, namun demikian ada variasi substansial di seluruh kabupaten. Sebagai contoh, meskipun lebih dari 70 persen guru non-PNS di sekolah sampel di dua kabupaten NTT memiliki setidaknya satu gelar perguruan tinggi, secara keseluruhan hampir 67 persen guru non-PNS hanya memiliki ijazah sekolah menengah. Namun di semua kabupaten, perbedaan ini tampaknya memiliki pengaruh marginal pada hasil belajar murid dan kinerja guru.



Temuan-temuan ini mendorong perlunya meningkatkan kualifikasi dan keterampilan mengajar kepala sekolah dan guru, terutama pada kabupaten yang memiliki banyak tenaga pengajar dengan kualifikasi yang tidak memadai.

Kualifikasi dan status guru non-PNS, yang mewakili mayoritas guru di daerah terpencil, harus ditingkatkan. UNICEF (2012) menemukan tingkat ketidakhadiran yang lebih tinggi di kalangan guru non-PNS dan lokal. Ada juga perbedaan penting dalam gaji dan honor guru, tergantung pada status mereka. Guru-guru non-PNS menerima gaji yang sangat rendah dan relatif tidak puas dengan jumlah gaji mereka. Lebih lanjut diperlukan upaya untuk meningkatkan motivasi guru yang bekerja di daerah terpencil, khususnya dengan memastikan kelancaran pelaksanaan sertifikasi guru dan tunjangan daerah terpencil. Pendekatan alternatif juga perlu ditinjau lebih jauh lagi karena di tingkat nasional, faktor-faktor ini tidak terbukti berpengaruh besar pada peningkatan hasil belajar.

Lampiran A. Tabel

Tabel 6. Jarak dan Waktu Perjalanan dari Balai Desa ke Lembaga Administrasi dan Keuangan

		Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
			Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Kantor kecamatan	Jarak (km)	28,4	28,3	24,3	37,8	14,4	19,8
	Waktu perjalanan (jam)	1,3	1,1	1,0	1,6	1,5	1,4
Kantor pemerintah kabupaten	Jarak (km)	149,1	268,3	102,6	129,2	94,3	78,3
	Waktu perjalanan (jam)	4,8	6,8	3,2	4,6	4,8	3,5
Kantor pemerintah kabupaten terdekat	Jarak (km)	139,7	200,5	103,6	166,3	71,6	76,4
	Waktu perjalanan (jam)	4,9	5,6	3,5	5,9	3,8	3,5
Kantor pos	Jarak (km)	53,8	45,4	48,9	71,7	34,3	46,2
	Waktu perjalanan (jam)	2,3	1,5	1,9	2,9	2,3	2,4
Bank	Jarak (km)	53,4	44,0	47,4	80,3	28,5	26,9
	Waktu perjalanan (jam)	2,2	1,4	1,8	3,2	1,9	1,4
ATM	Jarak (km)	56,8	54,1	47,2	76,4	32,7	42,6
	Waktu perjalanan (jam)	2,3	1,7	1,8	3,0	2,2	2,1
Koperasi	Jarak (km)	42,1	36,9	40,6	62,9	16,9	22,2
	Waktu perjalanan (jam)	1,6	1,2	1,7	2,3	1,4	1,1
Koperasi kredit	Jarak (km)	26,8	20,2	22,8	18,6	39,1	70
	Waktu perjalanan (jam)	1,2	0,6	1,2	0,9	3,7	3,1

Tabel 10. Distribusi Gender Murid, Berdasarkan Kelas

Kelas	Jenis Kelamin	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
			Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
1	Semua	23	23	19	23	24	26
	Laki-laki	12	13	10	13	13	14
	Perempuan	11	11	9	11	11	12
2	Semua	21	21	18	20	24	27
	Laki-laki	11	11	10	11	13	14
	Perempuan	10	10	8	9	11	13
3	Semua	22	21	17	22	26	26
	Laki-laki	12	11	9	12	13	14
	Perempuan	10	10	8	10	13	11
4	Semua	22	20	20	22	28	27
	Laki-laki	12	10	11	11	15	15
	Perempuan	11	10	9	11	13	12
5	Semua	22	20	18	23	26	27
	Laki-laki	12	10	10	12	14	15
	Perempuan	11	10	8	11	12	13
6	Semua	22	19	20	21	26	25
	Laki-laki	11	9	10	10	13	12
	Perempuan	11	10	10	11	13	13

Tabel 11. Ketersediaan Fasilitas Utama Sekolah (Persentase Sekolah Sampel)

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Bangunan						
Ruang kepala sekolah	48	51	47	63	26	32
Ruang guru	87	86	96	97	87	50
Peralatan/lapangan olah raga	99	100	96	99	100	100
Fasilitas fisik tambahan						
Toilet	91	90	96	97	79	85
Toilet - hanya untuk guru	64	66	80	65	50	50
Toilet - hanya untuk murid perempuan	50	56	61	53	32	35
Toilet - hanya untuk murid laki-laki	41	51	59	40	29	15
Air bersih	54	66	59	52	42	41
Listrik selama jam sekolah	30	36	18	40	24	24
Sinyal telepon seluler	45	44	27	28	68	91
Fasilitas pendukung pengajaran						
Perpustakaan	54	58	43	48	47	91
Buku teks dalam jumlah yang cukup	39	37	35	42	39	41

Tabel 14. Bahasa Pengajaran, Kurikulum, dan Muatan Pengajaran, Tahun Akademik 2015/16

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Bahasa pengajaran utama - laporan kepala sekolah (% sekolah)						
Indonesian	86	92	94	92	63	74
Malay	1	5	0	1	0	0
Dayak	4	3	6	7	0	0
Manggarai	9	0	0	0	37	26
Kurikulum yang digunakan pada tahun 2015/16 - laporan kepala sekolah (% sekolah)						
Kurikulum 2013	1	2	0	1	0	0
Kurikulum 2006 (tingkat satuan pendidikan)	2	5	2	2	0	0
Kurikulum 2004 (berbasis kompetensi)	99	100	98	100	95	100
Kurikulum yang digunakan pada tahun 2015/16 - laporan guru (% guru)						
Kurikulum 2013	1	1	1	1	0	0
Kurikulum 2006 (tingkat satuan pendidikan)	94	94	93	95	93	94
Kurikulum 2004 (berbasis kompetensi)	8	8	9	7	11	6
Mata pelajaran yang diajarkan (% guru)						
Guru mengajar 1 mata pelajaran	14	13	12	11	21	17
Guru mengajar 2-3 mata pelajaran	12	6	6	7	23	22
Guru mengajar 4 mata pelajaran atau lebih	74	81	82	83	56	61

Tabel 15. Waktu Pengajaran, Tahun Akademik 2015/16

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Hari mengajar efektif						
Hari mengajar efektif	226,38	235,37	228,18	206,56	240,24	243,970
Gangguan dalam mengajar (% sekolah)	25	34	31	34	3	0
Jam mengajar mingguan (rata-rata #)						
Kelas 1	26	26	26	25	27	28
Kelas 2	26	27	26	26	27	29
Kelas 3	29	29	28	28	31	32
Kelas 4	31	32	30	30	32	33
Kelas 5	31	32	31	30	32	33
Kelas 6	31	33	31	30	32	33

Tabel 22. Kondisi Keseharian Kepala Sekolah: Jarak Rata-Rata, Waktu Perjalanan, dan Biaya Transportasi dari Rumah ke Sekolah

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Secara keseluruhan						
Jarak dari rumah ke sekolah (km)	0,5	1	6	0,2	0,28	0,32
Waktu perjalanan dari rumah ke sekolah (menit)	5	10	20	5	8,5	5
Biaya transportasi dari rumah ke sekolah (Rp)	0	1.500	3.000	0	0	0
Kepala sekolah tinggal di desa yang sama dengan lokasi sekolah						
Jarak dari rumah ke sekolah (km)	0,15	0,23	0,5	1	1	0,15
Waktu perjalanan dari rumah ke sekolah (menit)	5	5	5	3	3	5
Biaya transportasi dari rumah ke sekolah (Rp)	0	1.000	0	0	0	0
Lainnya						
Jarak dari rumah ke sekolah (km)	8	11	12	7	3	3,5
Waktu perjalanan dari rumah ke sekolah (menit)	30	30	40	30	29	30
Biaya transportasi dari rumah ke sekolah (Rp)	8.000	7.500	10.000	5.000	6.000	10.000

Catatan: km = Kilometer

Tabel 23. Kondisi Keseharian Guru: Jarak Rata-Rata, Waktu Perjalanan, dan Biaya Transportasi dari Rumah ke Sekolah

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Secara keseluruhan						
Jarak dari rumah ke sekolah (km)	0,3	0,4	0,5	0,2	0,16	0,5
Waktu perjalanan dari rumah ke sekolah (menit)	5	5	10	5	6,5	10
Biaya transportasi dari rumah ke sekolah (Rp)	0	900	0	0	0	0
Guru tinggal di desa yang sama dengan lokasi sekolah						
Jarak dari rumah ke sekolah (km)	0,2	0,3	0,2	0,2	1	0,3
Waktu perjalanan dari rumah ke sekolah (menit)	5	5	5	5	5	10
Biaya transportasi dari rumah ke sekolah (Rp)	0	0	0	0	0	0
Lainnya						
Jarak dari rumah ke sekolah (km)	5	7	15	4	3	3
Waktu perjalanan dari rumah ke sekolah (menit)	30	20	45	30	30	30
Biaya transportasi dari rumah ke sekolah (Rp)	4.500	4.500	8.000	4.500	0	3.650

Catatan: km = Kilometer

Tabel 30. Tunjangan Kepala Sekolah

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Total tunjangan						
# Kepala sekolah yang menerima	252	57	44	83	38	30
% kepala sekolah yang menerima	97	100	92	100	100	91
Median bulanan (Rp)	3.575.525	3.058.575	4.064.868	4.605.900	3.125.000	2.766.113
Tunjangan profesi (TP). 12 bulan terakhir						
# Kepala sekolah yang menerima	182	46	32	53	29	22
% kepala sekolah yang menerima	70	81	67	64	76	67
Median bulanan (Rp)	3.257.880	3.079.287	3.706.908	3.602.400	1.850.967	2.920.000
Tunjangan khusus (TK). 12 bulan terakhir						
# Kepala sekolah yang menerima	92	8	10	60	12	2
% kepala sekolah yang menerima	36	14	21	72	32	6
Median bulanan (Rp)	2.678.825	90.625	2.707.200	2.834.425	2.609.500	156.250
Tunjangan tambahan penghasilan (Tamsil). 12 bulan terakhir						
# Kepala sekolah yang menerima	110	35	11	43	15	6
% kepala sekolah yang menerima	42	61	23	52	39	18
Median bulanan (Rp)	408.333	350.000	100.000	775.000	833.333	350.833

Catatan: NTT = East Nusa Tenggara; TK = Tunjangan Khusus (special allowance); TP = Tunjangan Profesi (professional allowance).

Tabel 31. Tunjangan Guru

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Guru PNS						
# Guru menerima tunjangan total	631	130	96	221	114	70
% guru yang menerima	84	93	72	92	83	67
Median total tunjangan bulanan (Rp)	1.333.333	1.227.083	952.099	2.694.500	1.299.533	433.333
# Guru menerima tunjangan profesi (TP)	244	47	41	89	44	23
% guru yang menerima	32	34	31	37	32	22
Median tunjangan profesi bulanan (Rp)	2.898.700	2.800.000	3.333.333	3.133.333	1.782.458	2.023.711
# Guru menerima tunjangan khusus (TK)	144	18	13	80	27	6
% guru yang menerima	19	13	10	33	20	6
Median tunjangan khusus bulanan (Rp)	2.144.583	100.000	2.549.342	2.733.333	1.000.000	736.250
# guru menerima tunjangan tambahan (Tamsil)	265	65	16	87	62	35
% guru yang menerima	0.350	0.460	0.120	0.360	0.450	0.330
Median tunjangan penghasilan tambahan bulanan (Rp)	400.000	380.000	100.000	747.500	683.333	62.500
Guru non-PNS						
# Guru menerima tunjangan total	519	186	37	100	136	60
% guru yang menerima	45	66	22	29	70	34
Median total tunjangan bulanan (Rp)	200.000	300.000	37.500	221.667	164.167	329.167
# Guru menerima tunjangan profesi (TP)	5	2	0	1	2	0
% guru yang menerima	0	1	0	0	1	0
Median tunjangan profesi bulanan (Rp)	1.375.000	1.437.500	-	1.500.000	955.833	-
# Guru menerima tunjangan khusus (TK)	81	21	3	29	20	8
% guru yang menerima	7	8	2	8	10	5
Median tunjangan khusus bulanan (Rp)	1.057.500	1.050.000	416.667	1.375.000	1.025.000	708.333
# guru menerima tunjangan tambahan (Tamsil)	130	70	0	12	25	23
% guru yang menerima	11	25	0	3	13	13
Median tunjangan penghasilan tambahan bulanan (Rp)	366.667	366.667	-	500.000	100.000	1.080.000

Catatan: NTT = Nusa Tenggara Timur; PNS = Pegawai Negeri Sipil; TK = Tunjangan Khusus; TP = Tunjangan Profesi

Tabel 32. Penyediaan Tunjangan Kepala Sekolah dan Guru, 2014-16

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Tunjangan profesi (TP)						
# Kepala sekolah menerimanya pada tahun 2014	149	34	30	46	21	18
Seluruhnya (% menerima)	88	71	87	96	95	94
# Guru menerimanya pada tahun 2014	182	28	35	69	28	22
Seluruhnya (% menerima)	84	54	91	91	82	91
# Kepala sekolah menerimanya pada tahun 2015	167	39	32	53	23	20
Seluruhnya (% menerima)	89	85	88	94	78	95
# Guru menerimanya pada tahun 2015	207	40	40	72	31	24
Seluruhnya (% menerima)	90	85	93	96	74	100
# Kepala sekolah menerimanya pada tahun 2016	180	42	35	54	27	22
Seluruhnya (% menerima)	62	76	66	65	37	55
# Guru menerimanya pada tahun 2016	248	48	46	83	45	26
Seluruhnya (% menerima)	69	67	65	86	47	65
Tunjangan khusus (TK)						
# kepala sekolah menerimanya pada tahun 2014	76	11	12	46	4	3
Seluruhnya (% menerima)	97	100	100	96	100	100
# guru menerimanya pada tahun 2014	189	28	27	116	10	8
Seluruhnya (% menerima)	95	93	93	96	90	100
# kepala sekolah menerimanya pada tahun 2015	75	8	11	48	5	3
Seluruhnya (% menerima)	93	100	100	94	80	67
# guru menerimanya pada tahun 2015	194	33	14	122	16	9
Seluruhnya (% menerima)	94	97	93	97	75	89
# kepala sekolah menerimanya pada tahun 2016	85	1	11	63	9	1
Seluruhnya (% menerima)	76	0	100	79	33	100
# guru menerimanya pada tahun 2016	224	41	18	111	41	13
Seluruhnya (% menerima)	82	76	89	90	66	69
Tunjangan penghasilan tambahan (Tamsil)						
# Kepala sekolah menerimanya pada tahun 2014	116	28	15	58	9	6
Seluruhnya (% menerima)	95	82	100	100	89	100
# guru menerimanya pada tahun 2014	332	116	26	109	39	42
Seluruhnya (% menerima)	90	85	96	94	97	86
# Kepala sekolah menerimanya pada tahun 2015	120	30	14	59	10	7
Seluruhnya (% menerima)	91	77	100	100	80	71
# guru menerimanya pada tahun 2015	340	121	28	104	42	45
Seluruhnya (% menerima)	90	87	96	95	83	89
# Kepala sekolah menerimanya pada tahun 2016	117	29	11	62	14	1
Seluruhnya (% menerima)	66	72	100	65	36	0
# guru menerimanya pada tahun 2016	374	122	23	117	82	30
Seluruhnya (% menerima)	74	66	91	88	66	67

Catatan: NTT = Nusa Tenggara Timur; TK = Tunjangan Khusus; TP = Tunjangan Profesi

Tabel 35. Kepuasan Guru yang Dilaporkan (% Guru)

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
a. Kepuasan dengan apresiasi pemerintah pusat terhadap peran guru						
Sangat rendah (1)	15	16	16	10	17	20
Rendah (2-3)	21	20	28	22	16	20
Rata-rata (4-5)	29	33	30	28	29	26
Tinggi (6-7)	35	31	26	40	38	33
PNS						
Sangat rendah (1)	6	6	11	2	7	6
Rendah (2-3)	13	11	17	11	13	15
Rata-rata (4-5)	28	30	29	26	28	28
Tinggi (6-7)	53	53	43	61	53	50
Bukan PNS						
Sangat rendah (1)	21	21	20	15	25	28
Rendah (2-3)	26	24	37	29	17	23
Rata-rata (4-5)	30	34	31	30	30	26
Tinggi (6-7)	23	20	13	26	27	23
b. Kepuasan dengan kinerja dinas pendidikan kabupaten dalam penyelenggaraan sekolah dasar						
Sangat rendah (1)	7	8	7	5	9	7
Rendah (2-3)	20	19	25	19	20	18
Rata-rata (4-5)	35	36	38	33	32	38
Tinggi (6-7)	38	37	30	43	39	37
PNS						
Sangat rendah (1)	4	4	6	1	5	5
Rendah (2-3)	16	20	18	13	20	10
Rata-rata (4-5)	33	27	39	33	32	37
Tinggi (6-7)	47	49	37	54	43	47
Bukan PNS						
Sangat rendah (1)	9	10	8	8	12	9
Rendah (2-3)	22	18	31	24	20	22
Rata-rata (4-5)	36	41	38	34	31	38
Tinggi (6-7)	32	31	24	34	37	31
c. Kepuasan dengan apresiasi orang-orang di sekitar sekolah dengan peran guru						
Sangat rendah (1)	4	2	5	3	6	6
Rendah (2-3)	15	13	20	13	11	18
Rata-rata (4-5)	30	28	40	34	23	25
Tinggi (6-7)	51	57	35	50	60	51
PNS						
Sangat rendah (1)	2	1	4	0	3	4
Rendah (2-3)	12	13	15	12	7	11
Rata-rata (4-5)	30	26	43	31	23	27
Tinggi (6-7)	56	59	38	57	67	57
Bukan PNS						
Sangat rendah (1)	5	2	5	5	8	7
Rendah (2-3)	16	14	25	14	13	21
Rata-rata (4-5)	30	29	37	36	23	24
Tinggi (6-7)	48	55	33	45	55	47

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
d. Kepuasan dengan kinerja pemerintah dan orang-orang di desa dalam membantu pengelolaan sekolah						
Sangat rendah (1)	6	6	5	4	11	8
Rendah (2-3)	22	25	29	17	23	21
Rata-rata (4-5)	36	35	40	38	32	34
Tinggi (6-7)	36	35	26	42	33	37
PNS						
Sangat rendah (1)	4	4	4	1	9	5
Rendah (2-3)	19	18	27	14	23	16
Rata-rata (4-5)	37	32	39	38	34	39
Tinggi (6-7)	40	46	30	47	34	39
Bukan PNS						
Sangat rendah (1)	8	7	5	6	13	10
Rendah (2-3)	24	28	31	19	24	23
Rata-rata (4-5)	35	36	41	38	30	31
Tinggi (6-7)	33	30	23	38	33	35

Catatan: PNS = Pegawai Negri Sipil

Tabel 36. Tantangan yang Dialami oleh Guru (% Guru)

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Kepuasan dengan gaji/honor yang diterima sebagai guru di sekolah tempat mereka bekerja saat ini						
Sangat rendah (1)	13	11	14	11	14	20
Rendah (2-3)	26	26	35	23	24	25
Rata-rata (4-5)	27	27	27	28	24	31
Tinggi (6-7)	33	36	24	37	38	24
PNS						
Sangat rendah (1)	3	5	3	0	4	6
Rendah (2-3)	15	16	27	11	16	8
Rata-rata (4-5)	28	27	32	26	23	38
Tinggi (6-7)	53	52	38	62	57	48
Bukan PNS						
Sangat rendah (1)	20	14	23	19	21	28
Rendah (2-3)	33	31	41	32	29	35
Rata-rata (4-5)	27	27	22	29	25	27
Tinggi (6-7)	20	28	13	20	25	10
Gaji/honorarium yang ideal						
Jauh Lebih Rendah	1	1	1	1	0	2
Menurunkan	2	1	2	1	2	4
Sama dengan gaji saat ini	19	15	15	21	27	18
Lebih tinggi	66	70	77	68	54	58
Jauh lebih tinggi	12	14	5	9	17	19
PNS						
Jauh Lebih Rendah	0	0	0	0	1	1
Menurunkan	2	0	2	2	1	4
Sama dengan gaji saat ini	25	16	24	28	33	23
Lebih tinggi	63	71	68	65	55	55
Jauh lebih tinggi	9	13	6	5	10	17
Bukan PNS						
Jauh Lebih Rendah	1	1	1	1	0	3
Menurunkan	2	1	3	1	2	3
Sama dengan gaji saat ini	16	14	8	17	23	14
Lebih tinggi	67	69	83	70	54	60
Jauh lebih tinggi	14	15	4	12	21	20

Catatan: PNS = Pegawai Negri Sipil

Tabel 41. Latar Belakang Komite Sekolah

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
# sekolah yang memiliki komite aktif	254	56	48	82	35	33
# sekolah yang memiliki komite tidak aktif	14	2	2	6	3	1
(Aktif) karakteristik komite sekolah (% komite aktif)						
Pembentukan komite sekolah saat ini						
Pembentukan komite sekolah saat ini	20	22	19	27	6	10
2016-17	63	69	55	65	52	69
2010-15	14	5	23	6	32	17
2005-09	4	4	2	3	10	3
Sebelum 2005	93	95	88	95	97	91
Komite hanya mengelola sekolah ini	15	16	13	17	6	18
Komite memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga	12	13	7	20	6	7
Komite menerima dana dari sekolah untuk kegiatan pada 2015/2016	326.000	300.000	200.000	301.000	2.300.000	300.000
Median dana yang diterima dari sekolah (Rp)	2	4	2	1	0	3
Sekolah menyediakan ruang kantor untuk komite						

Tabel 44. Kegiatan Komite Sekolah, 2015/16 (% Komite)

	Pilot Area	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Rapat komite dengan kepala sekolah dan orang tua						
Rapat komite dengan kepala sekolah dan orang tua, 2015/16	78	75	70	87	71	85
Inisiatif pelaksanaan rapat:						
Selalu dari kepala sekolah	40	27	50	51	28	29
Selalu dari komite	9	7	6	6	20	14
Terkadang kepala sekolah, terkadang komite	51	66	44	44	52	57
Topik yang dibahas selama rapat						
Persiapan evaluasi murid	84	90	88	82	83	75
Saran dan keluhan dari orang tua	83	80	84	85	83	79
Anggaran sekolah dan sumber daya keuangan	77	73	72	75	96	75
Disiplin dan perilaku murid	76	83	69	72	71	89
Hasil belajar murid	76	85	72	73	79	71
Disiplin dan perilaku guru	68	73	69	69	58	64
Rekrutmen guru	55	56	44	51	63	68
Kurikulum dan metode pengajaran	49	54	44	62	38	25
Kontribusi komite/orang tua	44	41	38	31	68	68
Lainnya	83	80	84	82	79	89
Rapat komite dengan kepala sekolah saja						
Rapat komite dengan kepala sekolah, bulan lalu	35	39	40	49	11	9
Rapat komite dengan kepala sekolah, 2015/16	48	54	52	56	37	27
Inisiatif organisasi rapat:						
Selalu dari kepala sekolah	38	23	42	46	54	11
Selalu dari komite	18	17	13	15	31	33
Terkadang kepala sekolah, terkadang komite	44	60	46	39	15	56
Rapat komite internal						
Rapat komite internal, bulan lalu	14	18	17	15	3	12
Rapat komite internal, 2015/16	21	27	20	21	11	24
Rapat internal menghasilkan saran/umpan balik untuk sekolah	91	93	100	94	50	88
Saran dari komite ke sekolah						
Rehabilitasi infrastruktur dan furnitur	63	71	56	63	50	57
Peningkatan kedisiplinan guru dan/atau murid	46	57	56	38	50	29
Proses belajar mengajar	29	43	56	13	0	14
Peningkatan kualitas guru	17	7	33	13	50	14
Pembelian perangkat belajar mengajar	10	14	22	0	0	14
Peningkatan kesejahteraan guru	8	14	11	0	50	0
Lainnya	40	21	44	56	0	43
Sekolah menerapkan beberapa saran dari komite	81	93	89	75	50	71
Saran dari komite dilaksanakan oleh sekolah						
Rehabilitasi infrastruktur dan furnitur	33	46	25	33	0	20
Peningkatan kedisiplinan guru dan/atau murid	54	62	63	42	100	40
Proses belajar mengajar	23	31	38	17	0	0
Peningkatan kualitas guru	5	8	13	0	0	0
Pembelian perangkat belajar mengajar	10	15	13	0	0	20
Peningkatan kesejahteraan guru	10	15	0	8	100	0
Lainnya	41	15	25	75	0	60

Tabel 49. Ketidakhadiran Murid dan Penyebab, Berdasarkan Nilai

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Secara keseluruhan						
# Murid terdaftar	35543	7350	5682	11449	5709	5353
Tingkat ketidakhadiran murid resmi (%)	8	9	9	7	9	7
Tingkat ketidakhadiran murid yang diamati (%)	14	24	13	13	11	8
# Ruang kelas	1702	366	301	543	249	243
% Ruang kelas dengan semua murid hadir	35	35	37	39	26	36
Kelas 1						
# Murid terdaftar	6195	1373	982	2058	884	898
Tingkat ketidakhadiran murid resmi (%)	11	11	13	11	13	7
Tingkat ketidakhadiran murid yang diamati (%)	19	27	17	19	16	8
# Ruang kelas	289	64	51	94	39	41
% Ruang kelas dengan semua murid hadir	25	20	20	31	15	34
Kelas 2						
# Murid terdaftar	5663	1257	895	1739	859	913
Tingkat ketidakhadiran murid resmi (%)	9	11	8	8	9	7
Tingkat ketidakhadiran murid yang diamati (%)	16	27	8	16	12	10
# Ruang kelas	289	62	52	91	41	43
% Ruang kelas dengan semua murid hadir	37	29	40	41	37	35
Kelas 3						
# Murid terdaftar	5848	1231	863	1908	974	872
Tingkat ketidakhadiran murid resmi (%)	8	10	10	6	9	7
Tingkat ketidakhadiran murid yang diamati (%)	13	24	12	10	13	9
# Ruang kelas	290	61	51	92	45	41
% Ruang kelas dengan semua murid hadir	36	34	45	39	22	34
Kelas 4						
# Murid terdaftar	6015	1187	1004	1897	1039	888
Tingkat ketidakhadiran murid resmi (%)	7	9	8	6	7	6
Tingkat ketidakhadiran murid yang diamati (%)	14	27	15	12	8	6
# Ruang kelas	280	60	49	89	43	39
% Ruang kelas dengan semua murid hadir	36	37	47	39	19	36
Kelas 5						
# Murid terdaftar	6048	1179	942	2012	984	931
Tingkat ketidakhadiran murid resmi (%)	7	9	8	5	8	6
Tingkat ketidakhadiran murid yang diamati (%)	11	20	13	8	11	7
# Ruang kelas	281	59	49	90	42	41
% Ruang kelas dengan semua murid hadir	37	41	37	42	26	32
Kelas 6						
# Murid terdaftar	5774	1123	996	1835	969	851
Tingkat ketidakhadiran murid resmi (%)	6	6	9	4	5	7
Tingkat ketidakhadiran murid yang diamati (%)	11	15	12	11	8	6
# Ruang kelas	273	60	49	87	39	38
% Ruang kelas dengan semua murid hadir	42	48	33	45	36	45

Tabel 52. Klasifikasi Kompetensi Murid dalam Bahasa Indonesia

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Kelas 1 (% murid)						
BMH - tidak ada pemahaman tentang huruf	47	36	56	43	57	51
BMKD - mengerti huruf tetapi tidak memiliki kompetensi dasar	51	62	44	55	43	49
KD1 - tingkat kelas 1	1	2	1	3	0	0
Kelas 2 (% murid)						
BMH - tidak ada pemahaman tentang huruf	6	5	8	8	5	2
BMKD - mengerti huruf tetapi tidak memiliki kompetensi dasar	80	74	85	73	90	88
KD1 - tingkat kelas 1	11	17	5	14	5	9
KD2 - tingkat kelas 2	3	5	2	4	1	1
Kelas 2 (% murid)						
BMKD - mengerti huruf tetapi tidak memiliki kompetensi dasar	7	2	6	3	20	8
KD1 - tingkat kelas 1	64	57	74	63	65	66
KD2 - tingkat kelas 2	29	41	20	34	15	26
KD3 - tingkat kelas 3	0	0	0	0	0	0
Kelas 4 (% murid)						
BMKD - mengerti huruf tetapi tidak memiliki kompetensi dasar	6	1	4	1	17	9
KD2 - tingkat kelas 2	89	91	93	91	81	86
KD3 - tingkat kelas 3	6	8	3	8	3	4
KD4 - tingkat kelas 4	0	0	0	0	0	0
Kelas 5 (% murid)						
BMKD - mengerti huruf tetapi tidak memiliki kompetensi dasar	4	1	3	1	9	6
KD3 - tingkat kelas 3	80	79	87	75	85	79
KD4 - tingkat kelas 4	17	20	10	23	6	16
KD5 - tingkat kelas 5	0	0	0	0	0	0

Tabel 53. Klasifikasi Kompetensi Murid dalam Matematika

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Kelas 1 (% murid)						
BMH - tidak dapat mengenali angka	37	17	49	28	56	47
BMKD - memahami angka tetapi tidak memiliki kompetensi dasar	50	62	44	52	41	48
KD1 - tingkat kelas 1	13	21	7	20	3	5
Kelas 2 (% murid)						
BMH - tidak dapat mengenali angka	6	2	7	7	9	4
BMKD - memahami angka tetapi tidak memiliki kompetensi dasar	49	36	64	42	60	51
KD1 - tingkat kelas 1	41	58	27	44	29	42
KD2 - tingkat kelas 2	4	4	2	7	2	3
Kelas 3 (% murid)						
BMKD - memahami angka tetapi tidak memiliki kompetensi dasar	12	2	13	7	30	16
KD1 - tingkat kelas 1	82	90	84	86	66	80
KD2 - tingkat kelas 2	6	8	3	7	3	4
KD3 - tingkat kelas 3	0	0	0	0	0	0
Kelas 4 (% murid)						
BMKD - memahami angka tetapi tidak memiliki kompetensi dasar	3	1	2	1	11	5
KD2 - tingkat kelas 2	93	93	96	95	87	91
KD3 - tingkat kelas 3	4	6	2	4	3	4
KD4 - tingkat kelas 4	0	0	0	0	0	0
Kelas 5 (% murid)						
BMKD - memahami angka tetapi tidak memiliki kompetensi dasar	19	13	18	14	27	26
KD3 - tingkat kelas 3	81	87	82	86	73	74
KD4 - tingkat kelas 4	0	0	0	0	0	0
KD5 - tingkat kelas 5	0	0	0	0	0	0

Note: NTT = East Nusa Tenggara.

Tabel 55. Ketersediaan Sekolah Dasar di Tingkat Kecamatan

	Kecamatan	# desa	# SD	# desa dengan 1 SD	# desa dengan 2 SD	# SD negeri	# SD swasta
Semua wilayah	0	235	270	184	51	248	22
Ketapang	0	59	59	59	0	58	1
	Jelai Hulu	8	8	8	0	8	0
	Kendawangan	9	9	9	0	9	0
	Manis Mata	8	8	8	0	8	0
	Marau	4	4	4	0	4	0
	Sandai	6	6	6	0	6	0
	Simpang Dua	4	4	4	0	4	0
	Simpang Hulu	10	10	10	0	10	0
	Sungai Laur	10	10	10	0	9	1
Landak		38	51	25	13	51	0
	Air Besar	12	17	7	5	17	0
	Jelimpo	5	7	3	2	7	0
	Mempawah Hulu	7	10	4	3	10	0
	Menjalin	3	4	2	1	4	0
	Menyuke	4	4	4	0	4	0
	Ngabang	3	4	2	1	4	0
	Sebangki	4	5	3	1	5	0
Sintang		82	88	63	19	87	1
	Kayan Hilir	17	17	12	5	17	0
	Kayan Hulu	13	13	12	1	13	0
	Ketungau Hilir	5	5	5	0	5	0
	Ketungau Hulu	16	16	12	4	16	0
	Ketungau Tengah	11	13	8	3	13	0
	Sepauk	12	13	9	3	12	1
	Tempunak	8	11	5	3	11	0
M. Barat		27	38	15	12	29	9
	Boleng	4	6	2	2	5	1
	Komodo	2	4	0	2	4	0
	Kuwus	5	7	3	2	3	4
	Macang Pacar	5	6	4	1	5	1
	Ndoso	5	7	2	3	7	0
	Welak	6	8	4	2	5	3
M. Timur		29	34	22	7	23	11
	Elar	5	5	5	0	4	1
	Kota Komba	2	4	0	2	3	1
	Lamba Leda	6	6	5	1	3	3
	Rana Mese	9	11	6	3	7	4
	Sambi Rampas	7	8	6	1	6	2

Catatan: Jumlah total sekolah dan desa di setiap kecamatan, kecamatan percontohan. SD = sekolah dasar.

Tabel 56. Rerata Nilai Tes Murid, Berdasarkan Kelas dan Jenis Kelamin

Kelas	Mata Pelajaran	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
			Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Secara keseluruhan							
1	Bahasa	32.720	38.810	26.230	36.140	26.980	30.300
	Matematika	33.5	44.200	26.610	39.070	22.520	26.5
2	Bahasa	44	49.240	36.010	44.880	42.010	45.860
	Matematika	43.310	51.650	35.620	45.930	35.950	43.030
3	Bahasa	28.180	33.930	25.170	31.430	20.070	25.940
	Matematika	30.320	36.430	27.360	32.930	23.030	28.100
4	Bahasa	34.240	38.870	31.670	37.970	27.040	32.290
	Matematika	29.420	32.490	27.570	31.5	25.370	28.260
5	Bahasa	32.440	35.220	29.900	35.350	26.330	32.020
	Matematika	31.920	34.390	31.200	34.170	27.680	29.510
Murid perempuan							
1	Bahasa	33.730	40.25	26.630	38	27.320	30.560
	Matematika	32.470	43.210	26.130	38.470	21.25	24.610
2	Bahasa	46.540	52.240	37.390	47.770	45.640	47.200
	Matematika	43.960	52.770	35.880	47.390	36.430	41.880
3	Bahasa	29.560	35.580	26.380	33.550	21.880	26.060
	Matematika	31.230	36.600	28.660	34.520	24.770	27.980
4	Bahasa	35.870	40.300	32.910	39.440	29.020	33.710
	Matematika	29.840	32.890	27.400	31.980	26.030	28.440
5	Bahasa	34.010	36.710	31.240	36.830	28.270	32.900
	Matematika	32.310	35.030	31.520	34.330	28.440	29.160
Murid laki-laki							
1	Bahasa	31.880	37.620	25.870	34.570	26.700	30.120
	Matematika	34.380	45.010	27.040	39.570	23.570	28.170
2	Bahasa	41.810	46.5	34.830	42.400	38.900	44.740
	Matematika	42.75	50.630	35.390	44.690	35.530	43.990
3	Bahasa	26.960	32.600	24.080	29.620	18.260	25.820
	Matematika	29.520	36.290	26.200	31.570	21.300	28.200
4	Bahasa	32.730	37.480	30.650	36.490	25.210	31.130
	Matematika	29.020	32.100	27.710	31.010	24.75	28.120
5	Bahasa	30.980	33.710	28.760	33.860	24.670	31.240
	Matematika	31.570	33.740	30.930	34.010	27.040	29.810

Tabel 57. Ketidakhadiran Murid, Berdasarkan Kelas dan Jenis Kelamin

	Semua Wilayah	Kalimantan Barat			Nusa Tenggara Timur	
		Ketapang	Landak	Sintang	Manggarai Barat	Manggarai Timur
Secara keseluruhan						
Pelajar perempuan yang terdaftar	16.837	3.503	2.634	5.481	2.714	2.505
Murid perempuan yang absen	1.179	288	222	343	192	134
Murid laki-laki yang terdaftar	18.706	3.847	3.048	5.968	2.995	2.848
Murid laki-laki yang absen	1.673	406	310	430	299	228
Kelas 1						
Pelajar perempuan yang terdaftar	2.851	626	457	940	408	420
Murid perempuan yang absen	307	70	59	96	49	33
Murid laki-laki yang terdaftar	3.344	747	525	1.118	476	478
Murid laki-laki yang absen	389	87	73	127	69	33
Kelas 2						
Pelajar perempuan yang terdaftar	2.615	601	401	800	388	425
Murid perempuan yang absen	220	61	33	63	35	28
Murid laki-laki yang terdaftar	3.048	656	494	939	471	488
Murid laki-laki yang absen	272	72	38	77	46	39
Kelas 3						
Pelajar perempuan yang terdaftar	2.691	557	406	864	476	388
Murid perempuan yang absen	179	45	37	48	31	18
Murid laki-laki yang terdaftar	3.157	674	457	1.044	498	484
Murid laki-laki yang absen	292	78	48	65	58	43
Kelas 4						
Pelajar perempuan yang terdaftar	2.865	571	451	952	495	396
Murid perempuan yang absen	179	41	32	56	32	18
Murid laki-laki yang terdaftar	3.150	616	553	945	544	492
Murid laki-laki yang absen	254	66	46	66	43	33
Kelas 5						
Pelajar perempuan yang terdaftar	2.908	583	430	999	460	436
Murid perempuan yang absen	154	42	28	38	32	14
Murid laki-laki yang terdaftar	3.140	596	512	1.013	524	495
Murid laki-laki yang absen	258	61	50	55	46	46
Kelas 6						
Pelajar perempuan yang terdaftar	2.907	565	489	926	487	440
Murid perempuan yang absen	140	29	33	42	13	23
Murid laki-laki yang terdaftar	2.867	558	507	909	482	411
Murid laki-laki yang absen	208	42	55	40	37	34

Tabel 58. Regresi OLS Sekolah, Kepala Sekolah, dan Karakteristik Guru Terkait Kekurangan Guru yang Dilaporkan di Sekolah

Variabel	(1)	(2)
# Guru di sekolah	-0,110*** (0,016)	-0,208*** (0,014)
# Guru pns di sekolah	-0,016 (0,018)	-0,070*** (0,016)
# Murid di sekolah	0,002*** (0,001)	0,005*** (0,001)
# Kelas di sekolah	0,004 (0,032)	-0,018 (0,026)
Kehadiran guru (# guru hadir / # guru) di sekolah	-0,244* (0,142)	-1,010*** (0,135)
Usia kepala sekolah	-0,004 (0,003)	-0,001 (0,003)
Kepala sekolah adalah perempuan	0,041 (0,071)	0,061 (0,066)
Kepala sekolah sudah menikah	-0,102 (0,144)	-0,177 (0,131)
Usia guru		-0,001 (0,003)
Guru adalah perempuan		-0,050 (0,049)
Guru sudah menikah		0,064 (0,068)
Guru bukan pegawai negeri		-0,110*** (0,035)
Konstan	1,879*** (0,282)	4,636*** (0,303)
R2 yang disesuaikan	0,203	0,166
Jumlah pengamatan	259	1,918

Catatan: Kesalahan standar diberi di tanda kurung. Semua regresi termasuk dummy kabupaten. Variabel dependen adalah biner (1 = kekurangan guru, 0 = tidak ada kekurangan guru yang dilaporkan). Kolom 1 berisi hasil terkait kepala sekolah sedangkan kolom 2 menampilkan hasil dari regresi guru.

*** p < 0,01, ** p < 0,05, * p < 0,1.

Lampiran B. Klasifikasi Kompetensi Murid

Klasifikasi ini diterapkan berdasarkan nilai tes murid, yang ditentukan oleh jumlah pertanyaan tes yang dijawab dengan benar. Klasifikasi ini diterapkan pada hasil tes bahasa Indonesia dan matematika. Ada empat klasifikasi kompetensi yang menentukan apakah seorang anak (1) tidak dapat mengenali huruf/angka; (2) memiliki kompetensi di bawah tingkat dasar; (3) memiliki kompetensi di bawah tingkat kompetensi kelas mereka saat ini; atau (4) memiliki kompetensi pada atau di atas tingkat kompetensi kelas mereka saat ini.

Seorang murid diklasifikasikan sebagai **tidak dapat mengenali huruf/ angka**—tingkat kompetensi terendah—ketika ia tidak dapat menjawab semua pertanyaan pengenalan huruf dan angka dalam tes bahasa Indonesia dan matematika. Kondisi hasil belajar ini hanya dapat dideteksi pada murid di kelas satu dan dua, yang diberikan pertanyaan pengenalan huruf dan angka. Seorang murid diklasifikasikan sebagai **memiliki kompetensi di bawah tingkat dasar** ketika ia mampu mengenali huruf dan angka namun tidak mampu menjawab setidaknya lebih dari setengah jumlah total pertanyaan tes pada dua tingkat di bawah standar tingkat kelas mereka saat ini.⁶¹ Seorang murid diklasifikasikan sebagai **memiliki kompetensi di bawah tingkat kompetensi kelas mereka saat ini** ketika ia tidak dapat menjawab setidaknya lebih dari setengah dari jumlah total pertanyaan tes pada standar tingkat kelas mereka saat ini. Terakhir, seorang murid digolongkan **memiliki kompetensi pada atau di atas tingkat kompetensi kelas mereka saat ini** ketika ia dapat menjawab lebih dari setengah jumlah total pertanyaan tes pada atau di atas standar tingkat kelas mereka saat ini, yang merupakan hasil pembelajaran ideal yang diharapkan dari murid. Untuk klasifikasi tipe 3 dan 4, tingkat kompetensi khusus murid ditentukan oleh jumlah pertanyaan pada standar tingkat kelas tertinggi yang dapat dijawab oleh murid dengan benar, di mana ia dapat menjawab setidaknya lebih dari setengah jumlah pertanyaan tingkat kelas tertinggi yang diberikan dalam tes.

⁶¹ Pengecualian untuk aturan ini adalah kelas satu di Indonesia, di mana murid diklasifikasikan dalam jenis kompetensi ini ketika mereka tidak dapat menjawab setidaknya satu set pertanyaan tentang pemahaman bacaan tingkat kelas satu. Pengecualian ini diterapkan karena hanya ada dua set pertanyaan pemahaman bacaan dalam tes bahasa Indonesia kelas satu.

ROSTER BELAJAR KELOMPOK

- Nama kelompok BELAJAR KELOMPOK LUMBU
- Merca Pelajaran 1
- Hari/Tanggal 2
- Nama-nama anggota kelompok:
1. GLEDYSIA LODONG (LENY)
 2. FLAFIANUS TANGIS (FLAFI)
 3. SRILIA JENIA (SRI)
 4. FORTUNATUS BARUNG (MBAKIF)
 5. KOLINTUS POGOL (KOLIN)
- Tugas Belajar Kelompok
- Mengajarakan PK
- Belajar mata Pelajaran hari itu
- Belajar mata Pelajaran besok
- Waktu belajar

ROSTER HARIAN

KELAS IV IAN DEWANA

PKK	MARUK	IPA
BIMBO	AGAMA	PILIBK
AGAMA	PJOK	PIATEK
KAMIS	JUMAT	SABTU
IPS	BIMBO	IPS
BIMBO	IPA	
SBK		

BELAJAR KELOMPOK LUMBU-DA
TIN AYUR 2017/2018



Referensi

- ACDP (Education Sector Analytical and Capacity Development Partnership). 2014. *Study on Teacher Absenteeism in Indonesia 2014*. Jakarta, Indonesia: ACDP.
- Al-Samarrai, Samer, and Pedro Cerdan-Infantes. 2013. "Where Did All the Money Go? Financing Basic Education in Indonesia." In *Education in Indonesia*, edited by D. Suryadarma and G. Jones, 109–38. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- ASER (Annual Status of Education Report). 2014. *Annual Status of Education Report (Rural) 2013*. New Delhi, India: ASER Centre.
- BPS. 2018. *Statistik Indonesia: Statistical Yearbook of Indonesia 2017*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2019. *Profil Kemiskinan di Indonesia September 2018*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Beatty, Amanda, Emelie Berkhout, Luhur Bima, Thomas Coen, Menno Pradhan and Daniel Suryadarma. 2018. "Indonesia Got Schooled: 15 Years of Rising Schooling and Flat Learning Profiles." RISE Working Paper 18/026, Research on Improving Systems of Education, Oxford, United Kingdom.
- Bjork, Christopher, and Dewi Susanti. "Community Participation and Teacher Accountability: Improving Learning Outcomes in Remote Areas of Indonesia." Unpublished manuscript, last modified 11 June, 2019. Microsoft Word file.
- Chaudhury, Nazmul, Jeffrey Hammer, Michael Kremer, Karthik Muralidharan, and Hasley F. Rogers. 2006. "Missing in Action: Teacher and Health Worker Absence in Developing Countries." *Journal of Economic Perspectives* 20 (1): 91–116.
- Chen, Dandan. 2011. "School-Based Management, School Decision-Making and Education Outcomes in Indonesian Primary Schools." Policy Research Working Paper 5809, World Bank, Washington, DC, <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/3572>.
- De Ree, Joppe, Karthik Muralidharan, Menno Pradhan, and Halsey Rogers. 2018. "Double for Nothing? Experimental Evidence on an Unconditional Teacher Salary Increase in Indonesia." *Quarterly Journal of Economics* 133 (2): 993–1039.
- Duflo, Esther. 2001. "Schooling and Labor Market Consequences of School Construction in Indonesia: Evidence from an Unusual Policy Experiment." *American Economic Review* 91 (4): 795–813.
- Gaduh, Arya, Menno Pradhan, Jan Priebe, and Dewi Susanti. "Scores, Camera, Action? Incentivizing Teachers in Remote Areas." Unpublished manuscript, last modified 28 March, 2019. Microsoft Word file.
- Gove, Amber, and Anna Wetterberg, eds. 2011. *The Early Grade Reading Assessment: Applications and Interventions to Improve Basic Literacy*. Research Triangle Park, NC: RTI Press.
- Hanushek, Eric A., and Ludger Woessmann. 2007. "The Role of Education Quality for Economic Growth." Policy Research Working Paper 4122, World Bank, Washington, DC, <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/7154>.
- Little, Angela W., ed. 2006. *Education for All and Multi-Grade Teaching: Challenges and Opportunities*. London: Springer.
- Ministry of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration. 2016. *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republic Indonesia. Nomor 2, Tahun 2016. Tentang Indeks Membangun Desa*. Jakarta, Indonesia: Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

- Mullis, Ina V. S., Michael O. Martin, Pierre Foy, and Kathleen T. Drucker. 2012. *PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) 2011 International Results in Reading*. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
- Mullis, Ina V. S., Michael O. Martin, Pierre Foy, and M. Hooper. 2016. *TIMSS (Trends in International Mathematics and Science Study) 2015 International Results in Mathematics*. Chestnut Hill, MA: TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College.
- OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). 2016. *PISA 2015 Results in Focus*. Paris: OECD, Program for International Student Assessment.
- Perez-Alvarez, Marcello, Jan Priebe, and Dewi Susanti. 2019. "Teacher Accountability and Pay-for-Performance Schemes in (Semi-) Urban Indonesia: What do Education Stakeholders Think?" Unpublished manuscript, last modified 25 January, 2019. Microsoft Word file.
- Platas, Linda M., Leanne R. Ketterlin-Gellar, Aarnout Brombacher, and Yasmin Sitabkhan. 2014. *Early Grade Mathematics Assessment (EGMA) Toolkit*. Research Triangle Park, NC: Research Triangle Park Press.
- Plaut, Daniel, and Molly Jamieson Eberhardt. 2015. *Bringing Learning to Light: The Role of Citizen-Led Assessments in Shifting the Education Agenda*. Washington, DC: Results for Development Institute.
- Pradhan, Menno, Daniel Suryadharma, Amanda Beatty, Maisy Wong, Armida Alishjabana, Arya Gaduh, and Rima Prama Artha. 2014. "Improving Educational Quality through Enhancing Community Participation: Results from a Randomized Field Experiment in Indonesia." Policy Research Working Paper 5795, World Bank, Washington, DC, <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/3559>.
- Pritchett, Lant. 2013. *The Rebirth of Education: Schooling Ain't Learning*. Baltimore, MD: Brookings Institution Press.
- Stern, Jonathan, and Lee Nordstrum. 2014. *Indonesia 2014: The National Early Grade Reading Assessment and Snapshot of School Management Effectiveness Survey Report and Findings*. Research Triangle Park, NC: Research Triangle Park Press.
- Suharti. 2013. "Trends in Education in Indonesia." In *Education in Indonesia*, edited by Daniel Suryadarma and Gavin W. Jones, 15–52. Singapore: ISEAS–Yusof Ishak Institute.
- Suryadarma, Daniel, Asep Suryahadi, Sudarno Sumarto, and F. Hasley Rogers. 2006. "Improving Student Performance in Public Primary Schools in Developing Countries: Evidence from Indonesia." *Education Economics* 14 (4): 401–29.
- Toyamah, Nina, Bambang Sulakson, Meuthia Rosfadhila, Silvia Devina, Sirojuddin Arif, Stella Aleida Hutagalung, Eduwin Pakpahan, and Asri Yusrina. 2010. *Teacher Absenteeism and Remote Area Allowance: Baseline Survey*. Jakarta, Indonesia: SMERU Research Institute.
- UNICEF (United Nations Children's Emergency Fund). 2012. *We Like Being Taught: A Study on Teacher Absenteeism in Papua and West Papua*. Jakarta, Indonesia: UNICEF.
- Usman, Syaikhu, Akhmedi, and Daniel Suryadarma. 2004. *When Teachers Are Absent: Where Do They Go and What Is the Impact on Students?* Jakarta, Indonesia: SMERU Research Institute.
- Uwezo. 2012. *Are Our Children Learning? Annual Learning Assessment Report*. Kampala, Uganda: Uwezo.
- Vernez, Gorges, Rita Karam, and Jeffrey H. Marshall. 2012. *Implementation of School-Based Management in Indonesia*. Santa Monica, CA: RAND Corporation, sponsored by the World Bank.
- World Bank. 2004. *World Development Report 2004: Making Services Work for Poor People*. Washington, DC: World Bank and Oxford University Press.
- World Bank. 2008. *Teacher Employment and Deployment in Indonesia: Opportunities for Equity, Efficiency and Quality Improvement*. Washington, DC: World Bank.
- . 2013a. *Early Childhood Education and Development in Poor Villages of Indonesia: Strong Foundations, Later Success*. Jakarta, Indonesia: World Bank.
- . 2013b. *Indonesia: Spending More or Spending Better: Improving Education Financing in Indonesia*. Jakarta, Indonesia: World Bank.

- . 2015. *The Role of BOS in Improving Education Outcomes in Indonesia*. Jakarta, Indonesia: World Bank.
- . 2016. *Indonesia's Rising Divide*. Washington, D.C., USA: World Bank
- . 2018. *World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise*. Washington, DC: World Bank, doi:10.1596/978-1-4648-1096-1.
- . 2018b. *Indonesia Economic Quarterly June 2018: Learning More, Growing Faster*. Washington, DC: World Bank, <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29921> License: CC BY 3.0 IGO.

